



# LAPORAN KINERJA 2023

**BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI PONTIANAK**



**BPM Net Zero Carbon Programme**

Kolaborasi UPT BPOM dan Pemuka Kepentingan Obat dan Makanan dalam Mewujudkan Net Zero Carbon di Indonesia melalui Inisiatif Berpermainan Main Game



-  @BPOM Pontianak
-  [pontianak.pom.go.id](http://pontianak.pom.go.id)
-   Balai Besar POM di Pontianak
-  @bpom.pontianak
-  0822-5547-0600

**kata  
BPOM**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM di Pontianak, dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan Good governance dan Clean government yang mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, kepada masyarakat dan stakeholders.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM telah berupaya melaksanakan visi yaitu Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024. Tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra 2020-2024, maka disusun Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak berisi penjelasan kemajuan pencapaian target kinerja berdasarkan evaluasi berbagai kegiatan baik keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Dalam Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020 - 2024, evaluasi dan analisis secara memadai terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan POM, laporan kinerja ini juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di masa mendatang. Balai Besar POM di Pontianak terus berupaya dan berinovasi sehingga kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan tetap optimal.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator *output* sasaran yang diperoleh rata-rata sudah dalam kategori Sangat Baik. Tugas dan tanggung jawab pengawasan di bidang Obat dan Makanan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas dan kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi yang terus dikembangkan dengan berbagai pihak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dalam memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Pontianak, 27 Februari 2024  
Kepala Balai Besar POM di Pontianak,



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.





## EXECUTIVE SUMMARY

Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 telah ditetapkan 11 sasaran strategis dengan masing-masing capaian sebagai berikut :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **102,48% (Sangat Baik)**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terjaminnya keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **101,26% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat Kalimantan Barat yang ditunjukkan oleh kemampuan melindungi diri dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **103,54% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya persepsi dan pemenuhan ekspektasi pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak.



4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian kinerja **105,46% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya kualitas sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Barat yang sesuai standar.
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak; dengan capaian kinerja sebesar **100,17% (Sangat Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah meningkatnya jumlah, persepsi, pemahaman, minat, dan respon masyarakat Kalimantan Barat terhadap informasi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat.
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar **100% (Baik)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah menguatnya fungsi pengawasan untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak, dengan capaian sebesar **96,22% (Cukup)**. *Outcome* dari indikator kinerja ini adalah adanya kepastian hukum pelaku kejahatan Obat dan Makanan, dan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan capaian sebesar **94,70% (Cukup)**. *Outcome* yang diharapkan dari indikator kinerja ini adalah terselenggaranya manajemen kinerja Balai Besar POM di Pontianak yang cepat, mudah, transparan, akuntabel.
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal, dengan capaian sebesar **108,31% (Sangat Baik)**. *Outcome* yang berhasil dicapai adalah meningkatnya kompetensi dan profesionalitas ASN yang bekerja di Balai Besar POM di Pontianak.
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar **120% (Sangat Baik)**. *Outcome* yang diharapkan adalah terpenuhinya laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dan pemanfaatan sistem





informasi yang optimal digunakan dalam pelaksanaan bisnis proses di Balai Besar POM di Pontianak.

11. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel dengan capaian sebesar **95,38% (Cukup)**. *Outcome* yang berhasil dicapai adalah kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia di Balai Besar POM di Pontianak secara efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Rerata capaian 11 (sebelas) sasaran strategis kegiatan tercapai dengan predikat **Istimewa** dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) **104,16%**. Capaian 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak tersebut dikategorikan sebagai berikut:

1. terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja dengan capaian kategori **Sangat Baik**, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Indeks Pelayanan Publik, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.
2. terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kategori **Baik**, yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat





- waktu, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
3. terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kategori **Cukup**, yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, dan Nilai Kinerja Anggaran UPT, serta
  4. terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, yaitu indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan, Indeks Efisiensi seluruh indikator kinerja kegiatan berada indeks efisiensi rerata (IE) 1,1 dan Tingkat Efisiensi rerata (TE) 0,1. Suatu capaian sasaran kegiatan dikatakan efisien apabila nilai  $IE \geq 1,00$ . Dari nilai IE tersebut, Balai Besar POM di Pontianak berhasil melaksanakan sasaran kegiatan dengan **Efisien**. Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

*Outcome* yang ingin dicapai dalam pengukuran efisiensi ini adalah komitmen akuntabilitas anggaran Balai Besar POM di Pontianak agar membawa manfaat yang ideal kepada masyarakat di Kalimantan Barat sesuai dengan perencanaan. Anggaran Balai Besar POM di Pontianak merupakan Uang Negara yang diamankan dan harus dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah, pengukuran kinerja kegiatan ini tidak diwajibkan, namun pengukuran kinerja kegiatan tetap dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan intern organisasi sebagai salah satu bentuk evaluasi efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Adapun penyerapan anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp27.479.679.221 (**98,77%**) dari Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp 27.822.443.000. Hal ini sangat menunjang capaian sasaran semua kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat. Hal ini tercermin dari tercapainya Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) 104,16% dengan predikat kinerja organisasi **Istimewa**.

Seiring dengan hasil pencapaian kinerja tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan proses penerapan Zona Integritas untuk mewujudkan Balai Besar POM di Pontianak menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Tanpa Izin Edar (TIE) melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan serta kerjasama dengan lintas sektor.
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama maupun komunikasi/koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Badan Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Ombudsman Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD IAI Kalimantan Barat, Organisasi Profesi PD PAFI Kalimantan Barat, Universitas Tanjungpura, Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Fakultas Pertanian Universitas





Tanjungpura, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjungpura, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Politeknik Negeri Pontianak, Politeknis Kesehatan Pontianak, Persaudaraan Muslimah Kalimantan Barat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak, serta Instansi terkait lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya semakin efektif meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat.

4. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan integrasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017
5. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016 sebagai bentuk komitmen anti segala bentuk praktik penyuapan.
6. Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat.
7. Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan melalui penggalangan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.





## HIGHLIGHT

# Highlight

B P O M P O N T I A N A K 2 0 2 3

### JANUARI



Bimbingan Teknis Awereness dan Audit Internal ISO/IEC17025: 2017

Asesmen Surveilans ISO/IEC 17025: 2017 di Balai Besar POM di Pontianak

### FEBRUARI



JUARA 1 LOMBA KARYA TULIS POPULER

### FEBRUARI



Bimbingan Teknis Pengujian Laboratorium Kosmetik

### MARET





# Highlight

BPOM PONTIANAK 2023



## MARET



PERINGKAT 1 dan nilai akademik tertinggi Diklat Intelejen lanjutan

Kolaborasi Bersama Pramuka Kwarda Provinsi Kalbar dalam Intensifikasi Pengawasan Pangan Juadah

## APRIL



Advokasi Stunting

## MEI



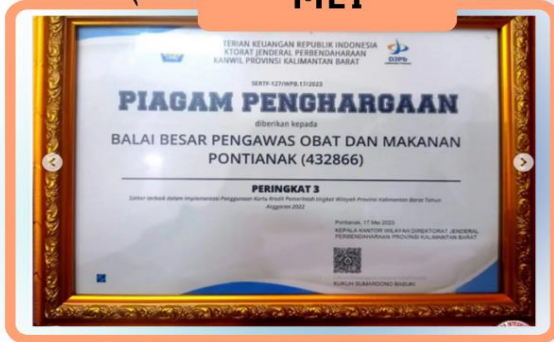


# Highlight

BPOM PONTIANAK 2023



MEI



Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Provinsi Kalimantan Barat

Pelatihan Internal Pengujian Mikrobiologi BBPOM di Pontianak

MEI



MEI



Bimbingan Teknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan Tahun 2023





# Highlight

B P O M P O N T I A N A K 2 0 2 3



MEI



Audit Internal ISO 9001: 2015 Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

JUARA 2 ARSIPARIS TELADAN NASIONAL

MEI



JUNI



PENDAMPINGAN AGIJAKK

Pelestarian Lingkungan Serentak Bersama Badan POM, BBPOM di Pontianak Selenggarakan Gerakan Menanam Tanaman Obat

JULI





# Highlight

B P O M P O N T I A N A K 2 0 2 3

## JULI



AKSELERASI Pelayanan Publik terpadu BBPOM di Pontianak Semarakkan HUT Kab. Kubu Raya ke - 16

PRESS CONFERENCE : HASIL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN BALAI BESAR POM DI PONTIANAK TAHUN 2023

## AGUSTUS



## AGUSTUS



Internalisasi Reformasi Birokrasi Tingkatkan Motivasi Pegawai BBPOM di Pontianak



# Highlight

B P O M P O N T I A N A K 2 0 2 3



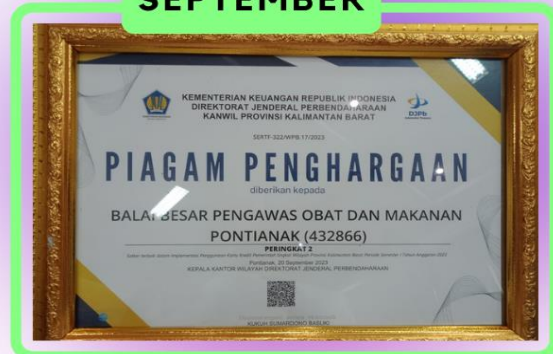
## SEPTEMBER



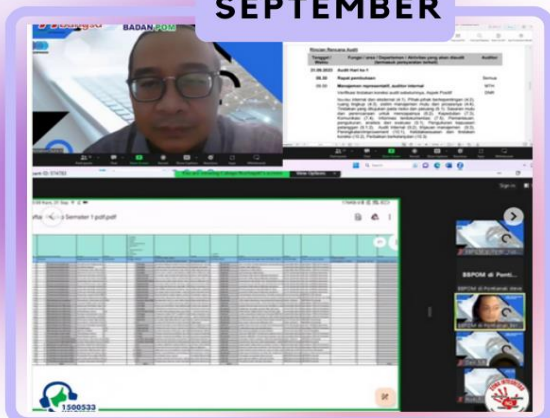
Pelatihan Sistem Manajemen Anti  
Penyuapan ISO 37001: 2016 di  
BBPOM di Pontianak

Peringkat Kedua Satker Terbaik  
implementasi penggunaan Kartu  
Kredit Pemerintah (KKP) tingkat  
Wilayah Provinsi Kalimantan Barat  
Periode Semester I TA 2023

## SEPTEMBER



## SEPTEMBER



audit surveillance ISO 9001: 2015





# Highlight

B P O M P O N T I A N A K 2 0 2 3



## SEPTEMBER



Galang Komitmen Bersama  
Stakeholder dalam Pengawasan  
Obat dan Makanan

Piagam Penghargaan Pelayanan  
Prima

## SEPTEMBER



## OKTOBER



Jemput Bola Registrasi Pangan  
Olahan di Pontianak Tahun 2023



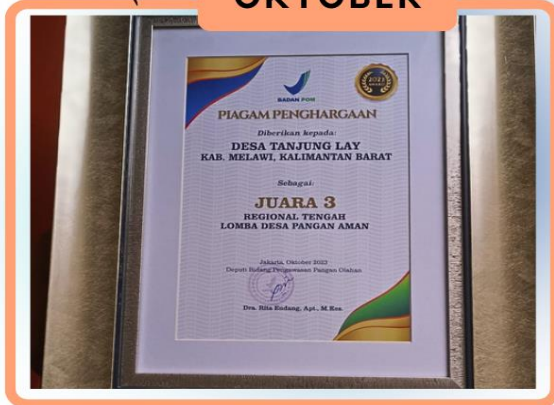


# Highlight

B P O M P O N T I A N A K 2 0 2 3



## OKTOBER



Juara III Desa Pangan Aman  
Regional Tengah Tahun 2023

PENANAMAN MANGROVE

## OKTOBER



Tuan Rumah Monitoring dan  
Evaluasi Regionalisasi  
Laboratorium Regional Samarinda  
TW III 2023 di Kubu Raya

## NOVEMBER





# Highlight

B P O M P O N T I A N A K 2 0 2 3



## NOVEMBER



Tuan Rumah Penguatan dan Pembinaan Kompetensi bersama PPSDM POM Wilayah Kalimantan di Kota Pontianak

Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan

## NOVEMBER



## NOVEMBER



PELANTIKAN PENGURUS MABI SAKA DAN PINSAKA POM KOTA PONTIANAK TAHUN 2023





# Highlight

BPOM PONTIANAK 2023



**NOVEMBER**



ANUGRAH KATEGORI PPID  
INFORMATIF

Sertifikat ISO 37001: 2016

**NOVEMBER**



**DESEMBER**



Desk CAPA dan Monitoring Hasil  
Pemeriksaan Sarana Obat dan  
Makanan Tahun 2023





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
EXECUTIVE SUMMARY .....	III
HIGHLIGHT .....	IX
DAFTAR ISI .....	XIX
DAFTAR GAMBAR .....	XX
DAFTAR GRAFIK .....	XXI
DAFTAR TABEL.....	XXIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak.....	15
1.4. Isu Strategis.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	20
2.1. Rencana Strategis .....	20
2.2. Visi, Misi, dan Tujuan .....	21
2.3. Budaya Organisasi.....	31
2.4. Sasaran Strategis .....	32
2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	42
2.6. Perjanjian Kinerja.....	45
2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) .....	48
2.8. Kriteria Pencapaian Indikator .....	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	51
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	51
3.2 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022.....	255
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	258
3.4 Realisasi Anggaran.....	261
BAB IV PENUTUP .....	276
4.1. Kesimpulan .....	276
4.2. Saran .....	278



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	4
Gambar 1.2 2 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak .....	8
Gambar 2.2 1 Visi, Misi dan Tujuan Badan POM .....	21
Gambar 2.2 2 Tiga Pilar Sistem Pengawasan BPOM .....	25
Gambar 2.2 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan .....	25
Gambar 2.4. 1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 .....	32
Gambar 3.1. 1 Capaian Perspektif dan Sasaran Strategis pada E-Performance .....	51





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.2. 1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	14
Grafik 3.1. 1 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	59
Grafik 3.1. 2 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	67
Grafik 3.1. 3 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	81
Grafik 3.1. 4 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	89
Grafik 3.1. 5 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	96
Grafik 3.1. 6 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	104
Grafik 3.1. 7 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	111
Grafik 3.1. 8 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	124
Grafik 3.1. 9 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	131
Grafik 3.1. 10 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	136
Grafik 3.1. 11 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	143
Grafik 3.1. 12 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	150





Grafik 3.1. 13 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	156
Grafik 3.1. 14 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	163
Grafik 3.1. 15 Perbandingan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	171
Grafik 3.1. 16 Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	178
Grafik 3.1. 17 Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	184
Grafik 3.1. 18 Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	190
Grafik 3.1. 19 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	195
Grafik 3.1. 20 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	202
Grafik 3.1. 21 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding .....	208
Grafik 3.1. 22 Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan BBPOM dengan Balai lain sebagai pembanding .....	214
Grafik 3.1. 23 Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	221
Grafik 3.1. 24 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	226
Grafik 3.1. 25 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	233
Grafik 3.1. 26 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis .....	239
Grafik 3.1. 27 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	246





Grafik 3.1. 28 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding ..... 252





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2. 1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 .....	11
Tabel 1.2. 2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK.....	12
Tabel 1.2. 3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak .....	14
Tabel 1.2. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan Loka POM di Kabupaten Sambas Berdasarkan Gender .....	14
Tabel 2.2. 1 SWOT BBPOM Pontianak .....	30
Tabel 2.3. 1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 2.5. 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 .....	43
Tabel 2.6. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak .....	45
Tabel 2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak .....	48
Tabel 2.8. 1 Kriteria Pencapaian Indikator .....	49
Tabel 2.8. 2 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi .....	50
Tabel 3.1. 1 Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023.....	52
Tabel 3.1. 2 Perbandingan Capaian NPSS Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya .....	53
Tabel 3.1. 3 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	53
Tabel 3.1. 4 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023.....	57
Tabel 3.1. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	58
Tabel 3.1. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 .....	58
Tabel 3.1. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	59
Tabel 3.1. 8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan SDM dengan Target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023.....	60



Tabel 3.1. 9 Analisis Tingkat efisiensi indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 ..... 61

Tabel 3.1. 10 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 ..... 62

Tabel 3.1. 11 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 ..... 65

Tabel 3.1. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 ..... 65

Tabel 3.1. 13 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024..... 66

Tabel 3.1. 14 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding ..... 66

Tabel 3.1. 15 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 ..... 69

Tabel 3.1. 16 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 ..... 78

Tabel 3.1. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 ..... 79

Tabel 3.1. 18 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 ..... 80

Tabel 3.1. 19 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding ..... 80

Tabel 3.1. 20 Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu ..... 82

Tabel 3.1. 21 Analisis Tingkat efisiensi indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Syarat Tahun 2023..... 83

Tabel 3.1. 22 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 ..... 84

Tabel 3.1. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 ..... 87

Tabel 3.1. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 ..... 87

Tabel 3.1. 25 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 ..... 88





Tabel 3.1. 26 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	88
Tabel 3.1. 27 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 .....	92
Tabel 3.1. 28 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 ..	94
Tabel 3.1. 29 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 .....	95
Tabel 3.1. 30 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	96
Tabel 3.1. 31 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2023 .....	98
Tabel 3.1. 32 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat .....	101
Tabel 3.1. 33 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat ( <i>Awareness Index</i> ) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 .....	101
Tabel 3.1. 34 Profil Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat ( <i>Awareness Index</i> ) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	102
Tabel 3.1. 35 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat ( <i>Awareness Index</i> ) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 .....	102
Tabel 3.1. 36 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat ( <i>Awareness Index</i> ) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	103
Tabel 3.1. 37 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat ( <i>Awareness Index</i> ) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu .....	107
Tabel 3.1. 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 .....	109
Tabel 3.1. 39 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	109
Tabel 3.1. 40 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 .....	110



Tabel 3.1. 41 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	111
Tabel 3.1. 42 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan .....	113
Tabel 3.1. 43 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM. ....	115
Tabel 3.1. 44 Perbandingan dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023. ....	116
Tabel 3.1. 45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2022. ....	116
Tabel 3.1. 46 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024.....	117
Tabel 3.1. 47 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	117
Tabel 3.1. 48 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	118
Tabel 3.1. 49 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan .....	120
Tabel 3.1. 50 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik .....	121
Tabel 3.1. 51 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2023 .....	122
Tabel 3.1. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya .....	122
Tabel 3.1. 53 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024.....	123
Tabel 3.1. 54 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan BBPOM dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	124
Tabel 3.1. 55 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM .....	127
Tabel 3.1. 56 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023. ....	129



Tabel 3.1. 57 Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	129
Tabel 3.1. 58 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan Target 2024 .....	130
Tabel 3.1. 59 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	130
Tabel 3.1. 60 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan .....	133
Tabel 3.1. 61 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak. ....	134
Tabel 3.1. 62 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	135
Tabel 3.1. 63 Pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024	135
Tabel 3.1. 64 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	136
Tabel 3.1. 65 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan .....	138
Tabel 3.1. 66 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 .....	141
Tabel 3.1. 67 Profil Pencapaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun 2022 .....	142
Tabel 3.1. 68 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	142
Tabel 3.1. 69 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	143
Tabel 3.1. 70 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.....	146
Tabel 3.1. 71 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023. ....	147



Tabel 3.1. 72 Pencapaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022.....	148
Tabel 3.1. 73 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024.....	148
Tabel 3.1. 74 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	149
Tabel 3.1. 75Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan .....	152
Tabel 3.1. 76 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak. ....	154
Tabel 3.1. 77 Perbandingan pencapaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan tahun 2022. ....	154
Tabel 3.1. 78 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	155
Tabel 3.1. 79 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	155
Tabel 3.1. 80 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan .....	158
Tabel 3.1. 81 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 .....	160
Tabel 3.1. 82 Perbandingan Pencapaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022.....	160
Tabel 3.1. 83 Perbandingan Persentase Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	161
Tabel 3.1. 84 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	161
Tabel 3.1. 85Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Indeks Pelayanan Publik .....	166
Tabel 3.1. 86 Perbandingan target dan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik....	169
Tabel 3.1. 87 Perbandingan target dan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	169





Tabel 3.1. 88 Perbandingan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan target tahun 2024 .....	170
Tabel 3.1. 89 Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	171
Tabel 3.1. 90 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik .....	174
Tabel 3.1. 91 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE .....	175
Tabel 3.1. 92 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan .....	176
Tabel 3.1. 93 Perbandingan Pencapaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 .....	176
Tabel 3.1. 94 Perbandingan Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	177
Tabel 3.1. 95 Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	177
Tabel 3.1. 96 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan .....	181
Tabel 3.1. 97 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman .....	182
Tabel 3.1. 98 Perbandingan Pencapaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2022 dan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2023 .....	183
Tabel 3.1. 99 Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	183
Tabel 3.1. 100 Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	184
Tabel 3.1. 101 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman .....	187
Tabel 3.1. 102 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman ....	188
Tabel 3.1. 103 Perbandingan Pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	188





Tabel 3.1. 104 Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	189
Tabel 3.1. 105 Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	189
Tabel 3.1. 106 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman .....	192
Tabel 3.1. 107 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 .....	193
Tabel 3.1. 108 Perbandingan Pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	194
Tabel 3.1. 109 Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	194
Tabel 3.1. 110 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	195
Tabel 3.1. 111 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas .....	198
Tabel 3.1. 112 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar .....	200
Tabel 3.1. 113 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Tahun 2023 .....	201
Tabel 3.1. 114 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 .....	201
Tabel 3.1. 115 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	202
Tabel 3.1. 116 SDM yang mendukung Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar .....	203
Tabel 3.1. 117 Analisis Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar .....	204
Tabel 3.1. 118 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 .....	206
Tabel 3.1. 119 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	207
Tabel 3.1. 120 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun 2024 .....	207



Tabel 3.1. 121 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembanding .....	208
Tabel 3.1. 122 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 .....	212
Tabel 3.1. 123 Perbandingan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	212
Tabel 3.1. 124 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 .....	213
Tabel 3.1. 125 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Balai lain Sebagai Pembanding .....	213
Tabel 3.1. 126 Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 .....	219
Tabel 3.1. 127 Perbandingan Pencapaian Indeks RB BBPOM Pontianak Tahun 2022 dan 2023 .....	219
Tabel 3.1. 128 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024 .....	220
Tabel 3.1. 129 Perbandingan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding .....	220
Tabel 3.1. 130 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 .....	224
Tabel 3.1. 131 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	225
Tabel 3.1. 132 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 .....	225
Tabel 3.1. 133 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding .....	226
Tabel 3.1. 134 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 .....	231
Tabel 3.1. 135 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Tahun 2022 .....	231
Tabel 3.1. 136 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 .....	232





Tabel 3.1. 137 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai 104. Perbandingan Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding ..... 232

Tabel 3.1. 138 Perbandingan Target Internal dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium ..... 237

Tabel 3.1. 139 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan tahun 2022 ..... 237

Tabel 3.1. 140 Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 .. 238

Tabel 3.1. 141 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain sebagai Pembanding ..... 238

Tabel 3.1. 142 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 ..... 244

Tabel 3.1. 143 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan tahun 2022 . 244

Tabel 3.1. 144 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024..... 245

Tabel 3.1. 145 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding..... 245

Tabel 3.1. 146 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 ..... 250

Tabel 3.1. 147 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan tahun 2022 ..... 250

Tabel 3.1. 148 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024 ..... 251

Tabel 3.1. 149 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding ..... 251

Tabel 3.3. 1Tabel Perubahan Target Balai Besar POM di Pontianak ..... 259

Tabel 3.4. 1Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 ..... 261

Tabel 3.4. 2Rincian Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja (sumber: Web OMSPAN 2023) ..... 263

Tabel 3.4. 3 Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 ..... 267



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia saat ini tengah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024. Fokus pembangunan pada periode RPJMN keempat ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Penekanan dilakukan untuk terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, dikarenakan berbagai tantangan yang dihadapi. Tantangan pengawasan Obat dan Makanan semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan kemudahan transportasi, meliputi pengawasan sebelum beredar sampai selama beredar. Berdasarkan analisis di RPJMN keempat, Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain :

- 1) aspek kesehatan, menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu;
- 2) aspek sosial, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
- 3) aspek ekonomi, mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan.





Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan pula bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan sebelum beredar dan selama beredar (*pre* dan *post market*) Obat dan Makanan yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas, penguatan laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan; peningkatan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan perluasan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan

## 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;



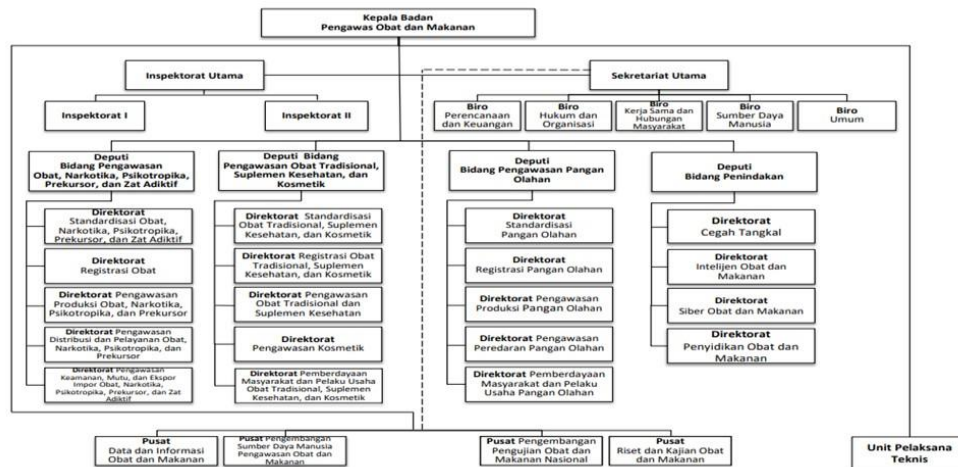
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai kewenangan, yaitu:

- 1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan POM melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan sejak sebelum beredar sampai selama beredar (*pre* dan *post market*). Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.





Gambar 1.2 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

### 1.2.1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Balai Besar POM di Pontianak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Badan POM yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 tersebut juga mengatur wilayah kerja UPT di lingkungan Badan POM.

Terdapat 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. UPT Badan POM yang berada di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Balai Besar POM di Pontianak, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Sambas. Loka POM di Kabupaten Sambas baru dibentuk pada tahun 2023 sehingga wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan





nya masih di-cover oleh BBPOM di Pontianak. Sehingga wilayah kerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 meliputi 12 (dua belas) kabupaten/kota yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Sanggau wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

#### 1.2.1.1 Lingkungan Eksternal

Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km<sup>2</sup>, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa. Memiliki garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km<sup>2</sup> dan garis lintas laut sekitar 900 km<sup>2</sup>. Provinsi ini memiliki 14 kabupaten/kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten. Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, antara lain Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh dari Kota Pontianak (ibukota Provinsi Kalimantan Barat) ke kabupaten/kota yang lain secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

- a. Kota Singkawang : ± 4 jam (± 152 km)
- b. Kabupaten Kubu Raya : kabupaten terdekat dengan Kota Pontianak (rata-rata waktu tempuh 1 jam), beberapa kecamatan ditempuh menggunakan transportasi air sekitar 3-4 jam
- c. Kabupaten Mempawah : ± 2 jam (± 75 km)
- d. Kabupaten Bengkayang : ± 5 jam (± 160 km)
- e. Kabupaten Sambas : ± 6 jam (± 225 km)





- f. Kabupaten Landak : ± 4 jam (± 163 km)
- g. Kabupaten Sanggau : ± 5 jam (± 186 km)
- h. Kabupaten Sekadau : ± 7 jam (± 273 km)
- i. Kabupaten Sintang : ± 8 jam (± 332 km), atau 40 menit melalui jalur udara
- j. Kabupaten Melawi : ± 9 jam (± 440 km), atau jalur udara ke Kabupaten Sintang kemudian dilanjutkan jalur darat ke Kabupaten Melawi 2 jam (± 90 km)
- k. Kabupaten Kapuas Hulu : ± 15 jam (sekitar 780 km), atau 70 menit melalui jalur udara
- l. Kabupaten Ketapang : ± 12 jam (± 458 km), atau 40 menit melalui jalur udara
- m. Kabupaten Kayong Utara : ± 13 jam (± 540 km), atau jalur udara melalui Ketapang ± 40 menit, dan dilanjutkan 2 jam jalur darat ke Kayong (± 90 km)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang tidak memiliki izin edar. Ada 5 (lima) wilayah di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan negara Malaysia yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang) dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Namun baru 3 (tiga) PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang beroperasi resmi, yaitu PLBN Entikong, Badau dan Aruk. Disinyalir terdapat lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan-jalan kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya





praktek perdagangan ilegal melalui peredaran produk tidak memenuhi ketentuan seperti Obat dan Makanan tidak memiliki izin edar dan/atau mengandung bahan berbahaya atau bahan kimia obat, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Untuk melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM Aruk. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan Makanan, Pos POM Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.



Gambar 1.2 2 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Pontianak





### 1.2.1.2. Lingkungan Internal

#### 1) Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

##### a. Luas Tanah (m<sup>2</sup>)

- Kantor Balai Besar POM di Pontianak terletak di Jl. Dr. Soedarso Pontianak diatas tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup>.
- Pos POM Aruk terletak di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas di atas tanah seluas 3.533 m<sup>2</sup>.
- Rumah Negara Golongan I terletak di Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI di atas tanah seluas 788 m<sup>2</sup>.
- Loka POM di Kabupaten Sambas terletak di Jl. Pembangunan, Dalam Kaum, Kab. Sambas di atas tanah seluas 2.758 m<sup>2</sup>.

##### b. Luas Bangunan (m<sup>2</sup>)

- Balai Besar POM di Pontianak menempati bangunan dengan berlantai dua seluas 3.157 m<sup>2</sup>.
- Luas Bangunan Pos POM Aruk adalah 400 m<sup>2</sup>.

##### c. Status Kepemilikan Tanah

- Tanah tempat berdirinya gedung Balai Besar POM di Pontianak adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Pos POM Aruk di Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 31 tanggal 23 Desember 2019.
- Tanah Rumah Negara Golongan I adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan POM RI Sertifikat No. 19 tanggal 26 Juni 2012.
- Tanah Loka POM di Kabupaten Sambas adalah hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Sambas Sertifikat No. 28 tanggal 30 Desember 2021.





#### d. Rumah Dinas

- Rumah Dinas Jl. dr. Wahidin Gg. Sepakat VI sudah dilakukan penghapusan Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen atas lelang 1 (satu) unit bongkaran rumah Negara golongan 1 tipe B permanen dalam keadaan rusak berat, sebesar Rp 5.777.000,00, dengan Risalah Lelang No : 343/53/2023 tanggal 05 Juni 2023, NTPN : 15F410N9VR8V5GOA tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pontianak tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara Gol I Tipe B nomor PL.03.09.20A.20A5.06.23.121 tanggal 15 Juni 2023.

#### e. Penerangan

- Penerangan yang digunakan gedung Balai Besar POM di Pontianak menggunakan jasa PLN dengan dengan kapasitas :
- PLN : 82,5 kVA dan 82,5 kVA
- Generator Set : 100 kVA dan 150 kVA

#### f. Sarana Komunikasi

Untuk kelancaran komunikasi sarana yang tersedia di kantor Balai Besar POM Pontianak adalah :

- Nomor Telepon : 0561-572417 (Ruang Staf Infokom)  
0561-743858 (Ruang Kepala Balai)  
0561-737720 (Lobby BBPOM di Pontianak)
- Alamat e-mail : [bpom\\_pontianak@pom.go.id](mailto:bpom_pontianak@pom.go.id)  
[balaipom\\_pontianak@yahoo.com](mailto:balaipom_pontianak@yahoo.com)
- Handphone : 0822 5547 0600 (Informasi dan Pengaduan Masyarakat)  
0822 5547 0601 (Pengujian Obat dan makanan)  
0822 5547 0602 (Sertifikasi /Registrasi/Penerbitaan SKI/SKE)
- Sosial Media : [bpom.pontianak](#) (Instagram)  
Balai Besar POM di Pontianak (Facebook)  
[@BPOMPontianak](#) (Twitter)  
Balai Besar POM di Pontianak (Youtube)
- Subsite : [pontianak.pom.go.id](http://pontianak.pom.go.id)





### g. Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Balai Besar POM di Pontianak berasal dari PDAM.

### h. Kendaraan

Kendaraan yang digunakan di Balai Besar POM Pontianak tercantum pada tabel 1.2.1 berikut :

Tabel 1.2. 1 Kendaraan Dinas di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Merk	Type	Tahun	Kondisi	Unit Pengguna
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1519 QP	Mitsu bishi	Outlan der Sport	2015	Baik	BBPOM Pontianak
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1425 WO	Toyota	Kijang Innova 2.0 G M/T	2018	Baik	BBPOM Pontianak
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B 9065 PQW I	Isuzu	NHR /Penyi dikan	2018	Baik	BBPOM Pontianak
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	B 9196 PQE	Isuzu	NHR / Incenn erator	2019	Baik	BBPOM Pontianak
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	KB 1914 WS	Toyot a	Rush	2020	Baik	BBPOM Pontianak
6	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB 9674 WW	Isuzu , ELF, NHR 5SE	ELF,N HR 55E	2013	Baik	BBPOM Pontianak
7	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	KB 8676 AU	Mitsu bishi	Triton 2,5L SC HDX	2017	Baik	BBPOM Pontianak
8	Sepeda Motor	KB 5044 W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak
9	Sepeda Motor	KB 5045 W	Honda NF 125 SD	Honda NF 125 SD	2007	Baik	BBPOM Pontianak



## 2) Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak oleh sumber daya manusia sebanyak 96 orang dengan rincian 75 ASN dan 8 orang PPNPN di Balai Besar POM di Pontianak, 13 Pegawai *outsourcing*. Komposisi pegawai terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional, dan PPNPN guna melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak. sedangkan Loka POM di Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugasnya didukung SDM yang terdiri dari 1 PNS, 1 PPNPN dan 2 Pegawai *outsourcing*.

Tabel 1.2. 2 Presentase Pegawai Berdasarkan Pemenuhan ABK

No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Pontianak	1	1	100%
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	1	100%
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	100%
5	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	100%
6	Arsiparis Terampil	1	1	100%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	11	9	81.82%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	30	16	53.33%
9	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	32	23	71.88%
10	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	5	100%
11	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	4	100%
12	Perencana Ahli Pertama	3	1	33.33%
13	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	100%
14	Pranata Komputer Terampil	2	1	50%



No	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Persentase Pemenuhan
15	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	100%
16	Analisis Barang Milik Negara	0	2	100%
17	Analisis Obat dan Makanan	0	1	100%
18	Pelaksana	0	1	100%
19	Pengadministrasian Keuangan	0	1	100%
20	Pengadministrasian Persuratan	0	1	100%
21	Pramu Laboratorium	0	1	100%
22	Pranata Pengambilan Sampel	0	1	100%
23	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0%
24	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0%
25	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0%
26	Arsiparis Mahir	1	0	0%
27	Arsiparis Penyelia	1	0	0%
28	Penata Laksana Barang Terampil	3	0	0%
29	Perencana Ahli Madya	1	0	0%
30	Perencana Ahli Muda	2	0	0%
31	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0%
32	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	0%
33	Pranata Komputer Mahir	1	0	0%
34	Pranata Komputer Penyelia	1	0	0%
35	Pranata SDM Aparatur Penyelia	1	0	0%
TOTAL		102	75	73.53%

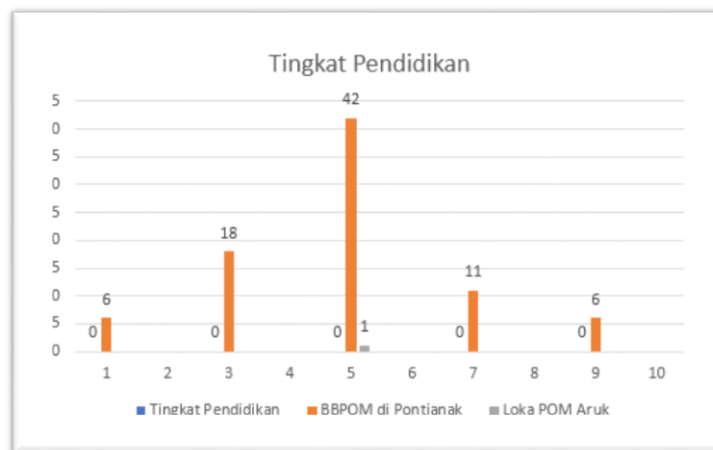
Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan Strata dua (S2) sebanyak 6 orang, Profesi Apoteker sebanyak 18 orang, Strata satu (S1)/ sederajat 42 orang, Diploma tiga (D3) sebanyak 11 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 19 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan



memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar.

Tabel 1.2. 3 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan POS POM Aruk

Tingkat Pendidikan	BBPOM di Pontianak	POS POM Aruk
S2	6	
Profesi	18	
S1/D4	42	1
D3	11	
SMA/Sederajat	6	
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>1</b>



Grafik 1.2. 1. Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2. 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Pontianak dan POS POM Aruk Berdasarkan Gender

No	Gender	BBPOM di Pontianak	POS POM Aruk
1	Pria	25	1
2	Wanita	58	0





### 1.3. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Pontianak

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak sesuai Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 1) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Bagian ini terdiri dari kepala bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

#### 2) Kelompok Jabatan Fungsional

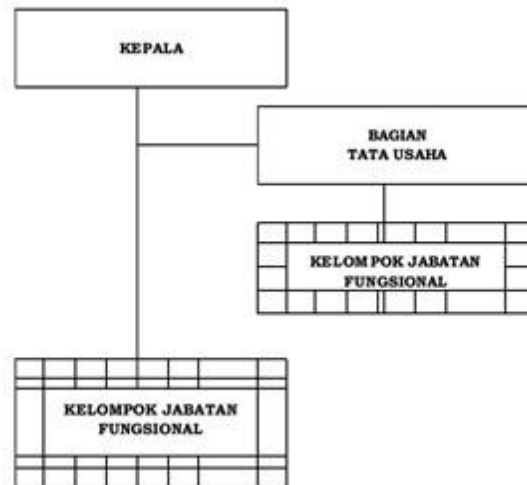
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, kelompok jabatan fungsional bekerja dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim.

Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1. 1 Struktur Organisasi BBPOM di Pontianak

#### 1.4. Isu Strategis

Balai Besar POM di Pontianak mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai Besar POM di Pontianak perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

##### 1) Isu Internal

- a. Penyesuaian sistem kerja baru (satu level) dengan membentuk tim kerja yang dikoordinir oleh ketua tim dan bertanggung jawab langsung ke pimpinan unit.





- b. Kondisi Alat Pengolah Data yang rusak dan belum mutakhir serta teknologi informasi yang tidak optimal dalam hal mendukung pencapaian kinerja dan digitalisasi administrasi pemerintahan.
- c. Proporsi SDM yang perlu disesuaikan dengan adanya beberapa perubahan dalam organisasi seperti pembentukan Loka POM baru yaitu Loka POM di Kabupaten Sambas, *re-catchment* area di Loka POM di Kabupaten Sanggau dan regionalisasi laboratorium.
- d. Adanya sistem regionalisasi laboratorium yang baru dalam sampling dan pengujian sampel rutin menyebabkan adanya rencana pemindahan alat, pemindahan SDM, dan masa transisi dalam pelaksanaan sampling dan pengujian.
- e. Pencapaian maturitas manajemen risiko (SPIP terintegrasi) dan standar pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkelas dunia.
- f. Penetapan kebijakan anti penyuapan yang akan membantu organisasi untuk identifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait melalui penerapan ISO 37001:2016 (*Anti Bribery Management System*).
- g. Pengawasan distribusi dan pelayanan antibiotik dalam rangka mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba/AMR (*Antimicrobial Resistance*).
- h. Pengawasan pemasukan Obat dan Makanan terhadap bawaan penumpang, dan pelintas batas dari luar negeri melalui PLBN dalam rangka menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu Obat dan Makanan.
- i. Pengawasan produk Obat dan Makanan, terkait Kratom (*Mitragyna Speciosa*), mengingat wilayah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu habitat dan budidaya kratom.

## 2) Isu Eksternal

- a. Pada bulan Mei 2023 WHO telah mencabut status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau darurat kesehatan global untuk Covid-19 sehingga kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Saluan Tugas penanganan Covid-19 Nomor 1





- Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pada Masa Transisi Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- b. Perkembangan penanganan dan pencegahan kejahatan di bidang obat dan makanan pada *Criminal Justice System (CJS)* menggunakan teknologi informasi.
  - c. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pengawasan distribusi Obat dan Makanan secara online mendorong pengembangan metode pengawasan, pembinaan, dan KIE berbasis teknologi informasi.
  - d. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang hari Kerja dan Jam Kerja instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan pada fleksibilitas kerja.
  - e. Adanya peningkatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia seperti pembangunan *industrial zone, dry port*, dan rancangan konsep *goods in transit* yang menyebabkan perlu adanya intensifikasi pengawalan mutu dan keamanan Obat dan Makanan.
  - f. Terbitnya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebabkan perubahan pada pola perizinan berusaha menjadi berbasis risiko, perubahan pola tindak lanjut pada pengawasan dan penindakan Obat dan Makanan.
  - g. Isu cemaran *Etilen Glikol (EG)* dan *Dieti/en Glikol (DEG)* pada produk Obat yang marak terjadi menimbulkan polemik di masyarakat dan tenaga kesehatan sehingga diperlukan pengembangan metode uji dan standar cemaran tersebut serta lebih intensif dalam memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya.
  - h. Penyederhanaan Birokrasi sesuai Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada instansi Pemerintah dengan penyederhanaan struktur, jabatan, sistem kerja, peta proses bisnis dan *standard operational procedure (SOP)*.
  - i. Angka stunting di Provinsi Kalimantan Barat yang masih tinggi sehingga diperlukan sinergitas multisektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting.





- j. Tahun 2023 menjadi tahun politik menjelang dilaksanakannya pemilihan umum serentak tahun 2024. Netralitas dan profesionalitas ASN harus terus dipertahankan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- k. Perubahan strategi dalam reformasi birokrasi nasional yaitu mendorong percepatan digitalisasi birokrasi serta melaksanakan RB tematik untuk mendorong percepatan penyelesaian isu nasional, khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

### 3) Peluang

- a. Pemanfaatan Laboratorium BSL-2 yang telah dimiliki Balai Besar POM di Pontianak pasca pandemi Covid-19 untuk tahapan pengujian sampel lainnya yang sesuai.
- b. Penguatan organisasi melalui pembentukan Loka POM baru (wilayah kerja Sambas dan Bengkayang)
- c. Prestasi dari pegawai Balai Besar POM di Pontianak dalam beberapa kegiatan yang banyak diraih.
- d. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan Balai Besar POM di Pontianak Terjalannya kerjasama yang baik dengan lintas sektor.
- e. Adanya beberapa inovasi terbaru yang mendukung kinerja seperti ASTAGA, SIPOPI, SIPERKASA, TRACKING, KAPUAS, AGIJAKK, SIMPATIK, AKSELERASI.
- f. Adanya pedoman dan acuan kerja yang jelas.





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

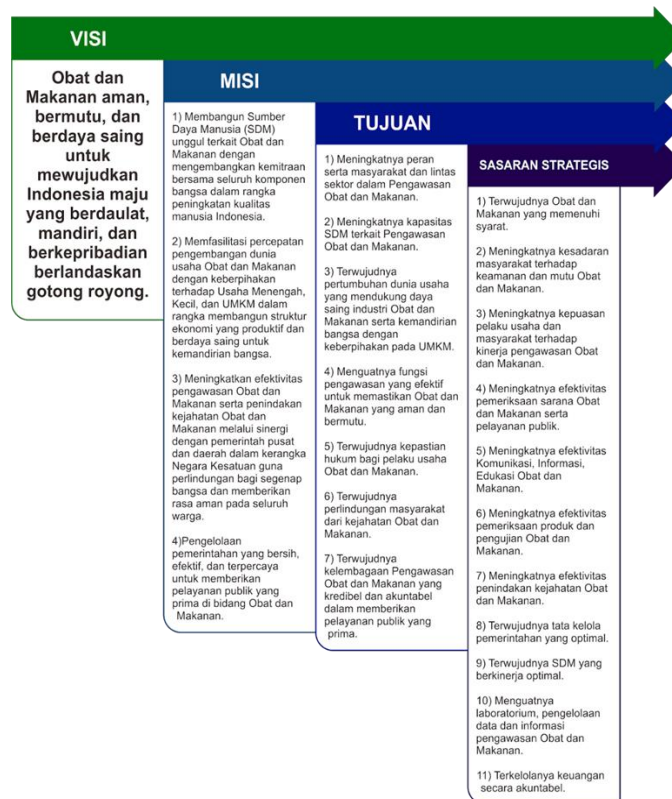
Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana pembangunan Nasional serta peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Balai Besar POM di Pontianak menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang undangan tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya didalam negeri, jaringan pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai human capital akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.



## 2.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Pontianak dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.



Gambar 2.2 1Visi, Misi dan Tujuan Badan POM





## A. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dan Visi Presiden RI 2019-2024, maka Balai Besar POM di Pontianak telah menerapkan Visi Badan POM berdasarkan Renstra 2020-2024 yaitu **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.





Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan POM tersebut, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Menengah, Kecil dan UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Misi Badan POM merupakan penjabaran dari Misi Presiden RI 2019-2024 sebagai berikut :

- 1) **Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: *Peningkatan kualitas manusia Indonesia*. Salah satu agenda



pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Pontianak sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Barat, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Pontianak ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Pontianak melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.





Gambar 2.2 2 Tiga Pilar Sistem Pengawasan BPOM

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan





**2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu: *Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing*. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk sektor makanan dan minuman pada peta Making Indonesia 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan



dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

**3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: *Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga* dan ke- 9 yaitu: *Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan*.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

(1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan,



kehasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

(2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

(3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Pontianak melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

(4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.



(5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

**4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya*. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Pontianak juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

**C. Tujuan**

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.



4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai Besar POM di Pontianak, digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak periode

2020-2024 serta telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan isu-isu strategis yang beredar di masyarakat, maka Balai Besar POM di Pontianak melakukan *update* matriks SWOT untuk menyesuaikan strategi yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Pontianak di pada periode selanjutnya. Berikut matriks SWOT terbaru Balai Besar POM di Pontianak:

Tabel 2.2. 1 SWOT BBPOM Pontianak

UPDATE SWOT BBPOM DI PONTIANAK				
No.	Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weaknesses)	Peluang (opportunities)	Ancaman (threats)
1	Memiliki SDM yang memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi, melacak aktivitas legal, pembinaan, dan melakukan pengujian di laboratorium terkait peredaran Obat dan Makanan.	Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang ancaman/bahaya menggunakan/mengonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan.	Peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya seperti Bea Cukai, Otoritas Pelabuhan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Aspeindo, Pokairud dan Karantina Kesehatan yang dapat bermanfaat dalam upaya menghentikan arus barang ilegal dan luar negeri ke dalam negeri maupun antar Provinsi.	Adanya perubahan/cara peredaran Obat dan Makanan yang semakin mudah melalui media online yang menyebabkan peningkatan tindak kejahatan peredaran Obat dan Makanan.
2	Telah terjalin kemitraan dan kolaborasi yang baik dengan berbagai lintas sektor dan pemangku kepentingan antara lain TNI-Polri, Pengadilan, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Ormas, dan Akademisi.	Masih rendahnya jumlah dan kemampuan alat khusus yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Pontianak jika dibandingkan dengan peningkatan kemampuan pelaku peredaran Obat dan Makanan dalam menjalankan tindak kejahatannya.	Akses internet ke wilayah <i>perifer</i> dan kedekatan anak-anak usia sekolah dengan teknologi yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi Obat dan Makanan secara online melalui kanal-kanal informasi media sosial BBPOM di Pontianak dan semakin terbukanya akses jalan untuk mencapai wilayah <i>perifer</i> untuk pelaksanaan KIE secara tatap langsung.	Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi Obat dan Makanan.
3	Memiliki Loka POM di Kabupaten untuk memperkuat kelembagaan dan sistem pengawasan termasuk perbatasan.	Dukungan pengelolaan fasilitas pengujian belum memadai, misalnya pemeliharaan jaringan listrik, pengelolaan limbah belum tertata, ketersediaan material pengujian (reagen, media, bahan habis pakai) dan perbaikan kerusakan alat laboratorium, sistem pengolahan data baik software maupun hardware.	Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi BBPOM Pontianak.	Terdapat tren baru penyalahgunaan Nisaza yang dilaporkan oleh stakeholder yang belum dapat dilakukan pengujian karena belum tersedianya metode analisa dan baku pembanding.
4	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.	Jumlah SDM BBPOM di Pontianak yang belum memadai untuk target, beban kerja dalam cakupan wilayah / <i>catchment area</i> .	Perkembangan UMKM yang memanfaatkan bahan baku spesifik lokal.	Perubahan regulasi yang belum disertai dengan kesiapan sistem yang dapat diaplikasikan oleh pihak-pihak terkait.
5	Memiliki aplikasi digital yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik.	Dukungan sarana prasarana untuk Teknologi Informasi yang belum optimal.	Digitalisasi bisnis proses yang terus dilakukan untuk mendukung pengawasan OM.	Letak geografis Kalimantan Barat dan panjangnya perbatasan darat dengan negara tetangga mengakibatkan maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui jalur ilegal.





Berdasarkan SWOT yang terbaru diatas, maka strategi yang akan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak sebagai berikut:

- Melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan dan lintas sektor untuk meningkatkan pengawasan di daerah perbatasan.
- Melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas UMKM dengan layanan digitalisasi.
- Melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai menyesuaikan dengan regulasi dan kondisi yang terkini.
- Mengajak masyarakat berpartisipasi aktif mengkampanyekan Obat dan Makanan yang aman dengan memanfaatkan media sosial.
- Melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman.
- Menambah sarana dan prasarana pendukung pengawasan Obat dan Makanan yang lebih modern .
- Melakukan digitalisasi proses bisnis yang memudahkan pengawasan Obat dan Makanan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.

### 2.3. Budaya Organisasi

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core Values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah.

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detil dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;

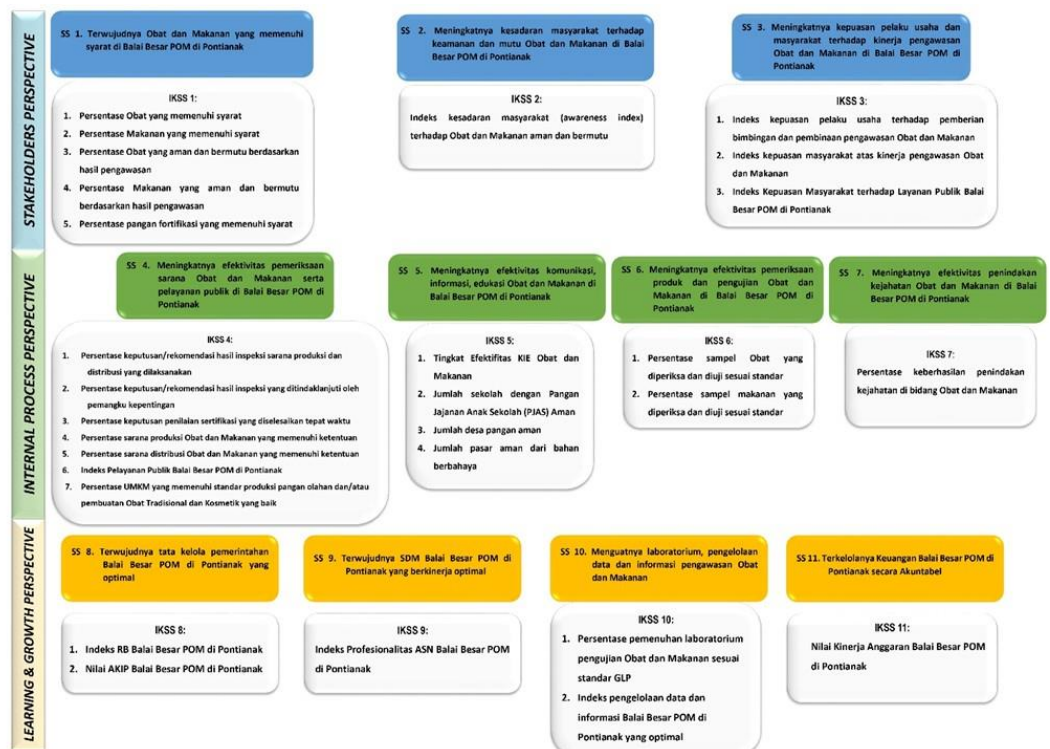




2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

## 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Pontianak dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Pontianak. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Pontianak akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi yang berdasarkan hasil reviu diubah menjadi sebagai berikut:



Gambar 2.4. 1 Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Pontianak 2020-2024





Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak menetapkan sasaran kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reuiu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel

2.3.1 berikut:

Tabel 2.3.1 Perubahan Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024

No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</b>									
<b>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	86,6	90	92,3	88	89	90	91
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	82	84	86	80	82	84	86
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	95	95	96	86	87	88	89
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	75	77	80	73	75	77	80
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	95	96,3	97,6	99
<b>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73	76	79	82	81	83	85	87
<b>3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	89	90,5	92	91,1	92,3	93,4	94,6



No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	68,07	70,38	72,7	75,01
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90	90,5	91	92	90	90,5	91	92
<b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>									
<b>4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	46	47	47	89	91	93	95
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8	46,9	55,9	65	60	65	70	75
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	90	90	99	100	100	100
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	22	23	24	30	40	50	60
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	65	78	80	83	85
15	Indeks Pelayanan Publik	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	50	55	60
<b>5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	75	78	81	85	90,1	91,9	93,8	95,6



No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	62	82	104	40	62	84	106
19	Jumlah desa pangan aman	12	19	25	32	12	19	25	32
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4	7	10	13	4	7	10	13
<b>6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	92	93	94	100	100	100	100
<b>7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak</b>									
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	92	93	95	91	92	93	94
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>									
<b>8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal</b>									
24	Indeks RB UPT	91	93	94	95	84,9	85,9	86,9	87,9
25	Nilai AKIP UPT	84	89	91	92	80,1	82,6	85,1	87,6
<b>9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal</b>									
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	80	82	85	83	83,25	83,5	83,75
<b>10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>									
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	86	87	88	76	81	86	91
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	2,26	2,5	3	2	2,25	2,5	3
<b>11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel</b>									
29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	95	96	97	92,8	93,4	94,6	95,8



No.	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	TARGET (SEMULA)				TARGET (MENJADI)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
30	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	83	85	87	90	95	Indikator dihapus		

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Pontianak sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. Adapun Sasaran Strategis Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut :

#### 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Pontianak tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru. Penilaian dilakukan terpusat di Badan POM, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Kedua, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian



laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 89% pada akhir tahun 2024.
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 80% pada akhir tahun 2024.
- 5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target 99% pada akhir tahun 2024.

## 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan



bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Pontianak melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 87 pada akhir tahun 2024.

### 3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Pontianak berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Pontianak, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai Besar POM di Pontianak bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 94,6 pada akhir tahun 2024.
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 75,01 pada akhir tahun 2024.
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, dengan target 92 pada akhir tahun 2024.



#### 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak

Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan Balai Besar POM di Pontianak merupakan pengawasan komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* melalui rekomendasi Pemeriksaan Sarana Baru, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Pontianak mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 95% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 60% pada akhir tahun 2024.
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.
- 7) Persentase UMKM yang memenuhi syarat, dengan target 60% pada tahun 2024 (berlaku mulai tahun 2022)

#### 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 95,6 pada akhir tahun 2024.
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024.
- 3) Jumlah desa pangan aman, dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024.



- 4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 13 pasar pada akhir tahun 2024.

## 6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Capaian sasaran kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

## 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan

Balai Besar POM di Pontianak menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 94% pada akhir tahun 2024.

## 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal

Sejalan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai Besar POM di Pontianak berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB). Hal



ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,9 pada akhir tahun 2024.
- 2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 87,6 pada akhir tahun 2024.

#### **9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 83,75 pada akhir tahun 2024.

#### **10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi



adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini.

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target 91% pada akhir tahun 2024.
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal, dengan target 3 pada akhir tahun 2024.

#### 11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah Terkelolanya keuangan secara akuntabel yang diukur melalui indikator kinerja :

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target 95,8 pada akhir tahun 2024.
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Pontianak, dengan target - pada akhir tahun 2024.(mulai tahun 2022 dihapuskan dari IKU)

#### 2.5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.20A.20A5.07.22.90 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Balai



Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.5.1 berikut:

Tabel 2.5. 1 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,6%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,7
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83%
	Indeks Pelayanan Publik	4,40
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84
	Jumlah desa pangan aman	25
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86,9
	Nilai AKIP UPT	85,1
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,6





## 2.6. Perjanjian Kinerja

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Pontianak Tahun Anggaran 2023, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan RKT Tahun 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp 27,729,090,000.

Tabel 2.6. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77%
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,6%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	85
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,7
Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91





Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83%
	Indeks Pelayanan Publik	4,40
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84
	Jumlah desa pangan aman	25
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86,9
	Nilai AKIP UPT	85,1
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,5



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,6

**Anggaran Program Pengawasan Obat dan Makanan :**

**Semula : Rp27.729.090.000,-**

**Menjadi : Rp27.822.443.000,-(setelah penambahan belanja pegawai)**





### 2.7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Pontianak beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.7.1 berikut:

Tabel 2.7. 1 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023														
BBPOM di Pontianak Badan Pengawas Obat dan Makanan														
No.	Indikator Kinerja	Target										Anggaran		
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	528.184.000,00	
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	147.967.000,00	
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	223.710.000,00	
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	174.147.500,00	
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	97,6	49.925.000,00	
6.	Indeks kesedaran masyarakat (consumer index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu											85	25.520.000,00	
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan											93,4	48.800.000,00	
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan											72,7	223.988.000,00	
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	4.698.217.000,00	
18.	Jumlah sekolah dengan Pajanan Anak Sekolah (PAS) aman	10	15	15	22	37	50	67	70	87	84		493.579.000,00	
19.	Jumlah desa pangan aman	10	12,5	16,5	16,6	33,5	38,5	50	74,5	84,5	25		836.366.000,00	
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	22	45	56	59	61	70	76	82	90	95	100	223.710.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	22	37	53	55	60	65	70	77	85	90	100	174.147.500,00
22.	Persentase keberhasilan pendidikan kesehatan di bidang Obat dan Makanan	2	10	24	36	45	53	67	79	88	90	93		879.532.000,00
23.	Indeks RB UPT											86,9	174.359.000,00	
24.	Nilai AKSP UPT											85,1	31.548.000,00	
25.	Indeks Profesionalitas AKSP UPT											83,5	87.676.000,00	
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											86	2.841.787.000,00	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	71.249.000,00	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	71.249.000,00	
No.	Indikator Kinerja	Target										Anggaran		
Obat dan Makanan														
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT														
91												25.280.000,00		
3.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	4.637.000,00	
4.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	44.760.000,00	
5.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	77.764.000,00	
Indikator Kinerja														
B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12														
1.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	54.120.000,00	
4.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	470.350.000,00	
5.	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	35.000.000,00	
6.	Persentase UPMN yang memenuhi standar prosedur pangan rahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	30	40	50	60	70	80	85	90	95	78.000.000,00	
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	71.249.000,00	
No.	Indikator Kinerja	Target										Anggaran		
yang optimal														
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	20	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	94,6	14.818.689.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	12,5	20	24	37,5	57,5	71	71	85	97,5	10		185.998.000,00	
Total												27.729.090.000,00		
Pontianak, 22 Desember 2022														
Kepala Balai Besar POM di Pontianak														
Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt														





## 2.8. Kriteria Pencapaian Indikator

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap instansi melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timeable).

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin **tinggi** realisasi menunjukkan capaian yang semakin **rendah**, maka digunakan rumus No. 2 sbb :

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 2.8. 1 Kriteria Pencapaian Indikator

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	●
Baik	=100%	●
Cukup	70% ≤ x < 100%	●
Kurang	<70%	●

Berdasarkan nilai pencapaian masing-masing indikator maka akan dihitung NPSS, NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan





kerja yang memiliki peta strategi. NPSS berguna sebagai penetapan predikat kinerja organisasi.. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

Tabel 2.8. 2 Kriteria Predikat Kinerja Organisasi

Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

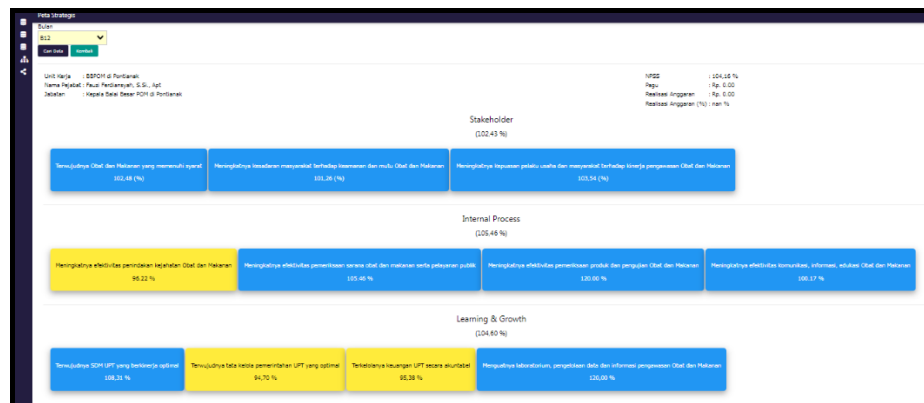




## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran indikator kinerja dari masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tahun 2023 dihitung dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023. Selanjutnya perhitungan/pengukuran kinerja dilakukan analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, yaitu (1) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan; (2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya; (3) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; (4) membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Balai lain yang setara; (5) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan (8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya; (9) Informasi tentang



Gambar 3.1.2 Capaian Perspektif dan Sasaran Strategis pada E-Performance





Berdasarkan aplikasi simetris pada menu e-performance yang merupakan aplikasi kinerja yang diimplementasikan di Balai Besar POM di Pontianak, diperoleh nilai NPSS sebesar 104,16 % dengan kriteria **Istimewa**, terdiri dari NPS *Stakeholder Perspective* sebesar 102,43%, NPS *Internal Process Perspective* sebesar 105,46%, NPS *Learning and Growth Perspective* sebesar 104,60%.

Terhadap 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan pada tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mencapai 8 (delapan) kriteria Sangat Baik, dan 3 (tiga) kriteria Cukup, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. 1 Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
<b>STAKEHOLDER (102,43%)</b>			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	102,48%	<b>Sangat Baik</b>
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	101,26%	<b>Sangat Baik</b>
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	103,54%	<b>Sangat Baik</b>
<b>Internal Process (105,46%)</b>			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	105,46%	<b>Sangat Baik</b>
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	100,17%	<b>Sangat Baik</b>
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	120%	<b>Sangat Baik</b>
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	96,22%	<b>Cukup</b>
<b>Learning &amp; Growth (104,60%)</b>			
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	94,70%	<b>Cukup</b>



No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	108,31%	Sangat Baik
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120%	Sangat Baik
11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara akuntabel	95,38%	Cukup

Bila dibandingkan dengan pencapaian NPSS tahun 2022, pencapaian NPSS tahun 2023 mengalami peningkatan. Adapun rincian pencapaian masing-masing perspektif dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 3.1. 2 Perbandingan Capaian NPSS Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Stakeholder Perspective	Internal Process Perspective	Learning & Growth Perspective	NPSS
2023	102,43%	105,46%	104,60%	104,16%
2022	98,77%	98,13%	103,04%	99,98%

Pada laporan ini juga membahas mengenai perbandingan Sasaran Kegiatan 2 Balai lain dengan beban kerja setara yang terdapat pada Klaster 5 yaitu BBPOM di Mataram, dan BBPOM di Palembang maka diperoleh hasil seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.1. 3 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemandangan

Perspective	No	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Mataram	Capaian BBPOM di Palembang
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di UPT	102,48%	99,28%	97,75%
	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di UPT	101,26%	97,33%	98,31%
	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	103,54%	104,78%	104,11%



Perspective	No	Sasaran Kegiatan	Capaian BBPOM di Pontianak	Capaian BBPOM di Mataram	Capaian BBPOM di Palembang
		Obat dan Makanan di UPT			
	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di UPT	105,46%	<b>113,29%</b>	105,82%
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di UPT	100,17%	<b>102,79%</b>	100,32%
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di UPT	<b>120%</b>	<b>120%</b>	99,15%
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di UPT	96,21%	101,01%	<b>102,09%</b>
	8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	94,70%	<b>100,54%</b>	97,12%
	9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	<b>108,31%</b>	107,27%	106,38%
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	<b>120%</b>	116%	<b>120%</b>
	11	Terkelolanya keuangan UPT	<b>95,38%</b>	94,48%	90,70%

Keterangan : ■ capaian tertinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Balai Besar POM di Pontianak memiliki nilai tertinggi pada 6 sasaran strategis, Balai Besar POM di Mataram 5 sasaran strategis, dan Balai Besar POM di Palembang 2 sasaran strategis. Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Adapun penjelasan masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :





### SASARAN STRATEGIS 1

#### Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **102,48%** dengan Predikat **Sangat Baik**

Tantangan Pengawasan Obat dan Makanan saat ini diantaranya banyaknya produk obat dan makanan ilegal, munculnya berbagai penyakit yang mendorong masyarakat mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan sehingga mendorong peningkatan tren transaksi *online*. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan terkait keamanan dan mutu makanan khususnya UMKM pangan, pangan siap saji dan pangan jajanan.

Dengan tingginya kompleksitas pengawasan Obat dan Makanan, maka diperlukan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut, karena komoditi yang diawasi merupakan produk berisiko tinggi, tidak ada toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Balai Besar POM di Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan setelah beredar (*post-market*). Pengawasan *pre-market* dilakukan untuk memastikan Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Untuk kegiatan pengawasan *pre-market*, Balai Besar POM di Pontianak melakukan Pemeriksaan Sarana Baru (PSB) serta memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha dalam



rangka registrasi produk ke Badan POM. Pengawasan *post-market* dilakukan untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu dan informasi produk, yang dilakukan melalui sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta pengawasan label/penandaan dan produk yang disampling kemudian diuji laboratorium dimana hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan suatu produk Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang handal, maka produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Barat aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk menilai keberhasilan sasaran strategis ini dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja sebagai berikut:

**SK.1.IKSK.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang beredar berdasarkan Survei Produk Beredar dengan kerangka sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Tidak Memenuhi Syarat. Obat yang dimaksud dalam indikator ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun

2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut :

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak MS}}{\text{Total sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$





Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian menggunakan laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- Tidak Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 4 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00	94,47	104,97	Sangat Baik

Target capaian untuk indikator kinerja persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 yaitu 90,00%. Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 mencapai 94,47%. Capaian tersebut didapatkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 mencapai target yaitu sebesar 104,97% dengan kriteria **Sangat Baik**.





## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya


Tabel 3.1. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	2020	80,80	88,17	109,12	Sangat Baik
	2021	88,00	86,02	97,75	Cukup
	2022	89,00	77,69	87,30	Cukup
	2023	90,00	94,47	104,97	Sangat Baik

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022 sebesar 87,30% sedangkan capaian pada tahun 2023 sebesar 104,97%. Capaian indikator kinerja ini naik sebesar 17,67% dari tahun sebelumnya.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 6 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	91	94,47	103,81	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 yaitu 94,47%, mencapai 103,81% dari target tahun 2024. Balai Besar POM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

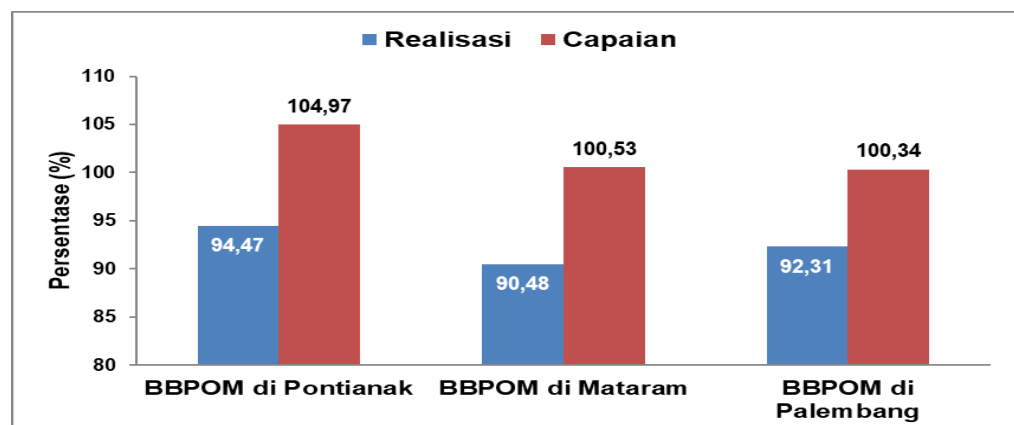




#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	Realisasi	94,47	90,48	92,31
	Capaian	104,97	100,53	100,34



Grafik 3.1. 1 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pemanding

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh dari capaian Balai Besar POM di Pontianak, Sedangkan nilai terendah diperoleh dari Balai Besar POM di Palembang. Meskipun demikian ketiga Balai tersebut masuk dalam kriteria **Sangat baik**.

#### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan, hal ini didukung oleh :





- Terlaksananya sampling dan pengujian Obat sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman prioritas sampling Obat tahun 2023.
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, ditunjang dengan sistem pelaksanaan pengujian yang efektif.
- Tersedianya baku pembanding, reagen kimia, media mikrobiologi, dan peralatan laboratorium yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Komunikasi petugas penyampling dengan penguji yang efektif.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala antara penyampling dan penguji.
- Adanya perubahan kebijakan terhadap kategorisasi dalam evaluasi penandaan.

#### 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat terdiri dari tim kerja inspeksi dan pengujian dengan pemetaan kompetensi sebagai berikut:

Tabel 3.1. 8 Analisis atas Efisiensi Penggunaan SDM dengan Target Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Tim Kerja	Pemenuhan Kompetensi	Gap
Pemeriksaan	60,00%	40,00%
Pengujian	80,57%	19,43%
Rata-rata	70,29%	29,71%

Berdasarkan tabel di atas, gap pemenuhan kompetensi SDM untuk melaksanakan proses indikator kinerja ini sebesar 29,71% namun dapat memenuhi target dengan capaian sebesar 104,97% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Dalam hal efisiensi indikator kinerja ini dapat dikatakan efisien dalam penggunaan SDM namun tetap perlu diupayakan peningkatan kompetensi SDM untuk menurunkan gap sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan dengan





waktu yang efisien.

Tabel 3.1. 9 Analisis Tingkat efisiensi indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	IE	TE
Terwujud nya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	104,97%	99,94%	1	0,05

Dalam hal penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan yaitu sebesar 1 termasuk ke dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi indikator kinerja adalah sebesar 0,05 artinya tingkat pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan proses indikator kinerja ini sedikit namun dapat meraih capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** sehingga dapat dikatakan efisien dalam penggunaan anggaran.

#### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Obat yang Memenuhi Syarat belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan pengawasan dengan memberikan pembinaan dan sanksi kepada sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan.
- b. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.





- c. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
- e. Melaksanakan KIE, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha mengenai penerapan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi.

### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 10 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Telah melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pengujian dalam operasional instrumen GCMS (TW I) dan LCMSMS (TW III) Telah mengikuti Bimbingan Teknis sampling dan penandaan Obat pada TW II dan TW IV		





NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
		Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.	Telah melaksanakan Audit eksternal ISO IEC 17025:2017 tgl 9-10 Februari 2023; audit internal 29-30 Mei 2023, audit eksternal 9001:2015 dilaksanakan 21-22 September 2023, RTM dilaksanakan 19 Juni dan 9 Juli 2023		

### 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

- Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Obat pada tahun berikutnya.
- Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium
- Meningkatkan kepercayaan *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
- Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.
- Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.





### SK.1.IKSK.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang beredar dengan metode sampling acak yang ditujukan untuk memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar sehingga dapat diketahui proporsi produk yang Memenuhi Syarat. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling secara acak yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\%Makanan MS = \frac{\text{Jumlah sampel Acak MS}}{\text{Total sampel Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi :

- Tidak memiliki NIE/produk illegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa



- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 11 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00	86,10	102,51	Sangat Baik

Pada tahun 2023, untuk indikator kinerja persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi sebesar 86,10% berada di atas target (84,00%) dengan capaian sebesar 102,51%, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	2020	78,00	78,02	100,03	Sangat Baik
	2021	80,00	82,68	103,35	Sangat Baik
	2022	82,00	80,09	97,67	Cukup
	2023	84,00	86,10	102,51	Sangat Baik

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 sebesar 102,51% sedangkan






capaian pada tahun 2022 sebesar 97,67%. Capaian indikator kinerja ini naik sebesar 4,84 % dari tahun sebelumnya.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 13 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86,00	86,10	100,12	 Tercapai/ Melampaui

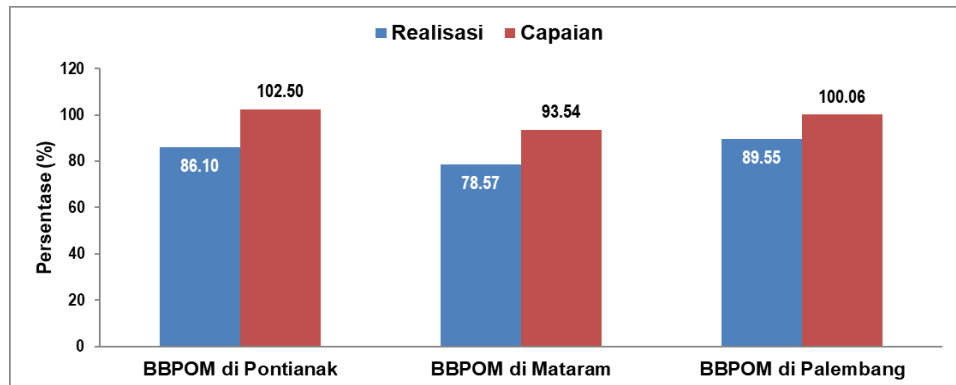
Realisasi indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 mencapai 86,10% dari target tahun 2024. Balai Besar POM di Pontianak akan terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 14 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Realisasi (%)	86,10	78,57	89,55
	Capaian (%)	102,50	93,54	100,06





Grafik 3.1. 2 Perbandingan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembandingan

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh dari capaian Balai Besar POM di Pontianak, Sedangkan nilai terendah diperoleh dari Balai Besar POM di Mataram.

## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab realisasi makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 telah mencapai target karena :

- Terlaksananya sampling dan pengujian Pangan sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman prioritas sampling Pangan tahun 2023.
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, ditunjang dengan sistem pelaksanaan pengujian yang efektif.
- Tersedianya baku pembandingan, reagen kimia, media mikrobiologi, dan peralatan laboratorium yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Komunikasi petugas sampling dengan penguji yang efektif.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala antara penyampling dan penguji.
- Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sampel Makanan yang sesuai dengan ketentuan.





## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat terdiri dari tim kerja inspeksi dan pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja tahun 2023, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 60 orang sedangkan sumber daya manusia yang ada saat ini adalah 36 orang sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia yang sudah ada.

Meskipun terdapat kesenjangan kebutuhan ABK, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, nilai efisiensi untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 1,11 dengan kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Farmasi dan Makanan, penguatan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan, dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

## 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian target persentase Makanan yang Memenuhi Syarat belum mencapai hasil yang optimal. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- b. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- c. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem



Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.

- d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.
- e. Pembinaan terhadap sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh petugas pada saat pelaksanaan pengawasan dalam pemenuhan cara peredaran pangan yang baik.

### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 15 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai*	Belum**	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Telah melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pengujian dalam operasional instrumen GCMS (TW I) dan LCMSMS (TW III)		
		Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten.	Telah melaksanakan Audit eksternal ISO IEC 17025:2017 tgl 9-10 Februari 2023; audit internal 29-30 Mei 2023, audit eksternal		





## 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

- Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada tahun berikutnya.
- Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Meningkatkan kepercayaan *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
- Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.
- Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

### SK.1.IKSK.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Obat yang disampling secara *targeted/purposive*, yaitu Obat yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Obat yang dimaksud dalam indikator ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Obat dinyatakan aman apabila risiko yang mungkin timbul pada penggunaannya tidak membahayakan pada saat digunakan dan dinyatakan bermutu apabila diproduksi / didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar.





Pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targetes yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium.

Pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Obat palsu dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Berdasarkan Pengujian

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 16 Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan oleh Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	88,00	94,59	107,49	Sangat Baik





Pada tahun 2023, realisasi yang dicapai untuk Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 94,59% dengan capaian 107,49% terhadap target 88,00%. Berdasarkan data tersebut capaian terhadap indikator ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 17 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	2020	94,00	82,81	88,1	Cukup
	2021	86,00	68,49	79,64	Cukup
	2022	87,00	79,77	91,69	Cukup
	2023	88,00	94,59	107,49	Sangat Baik


Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 sebesar 91,69% dengan kategori **Cukup**. Hal tersebut dikarenakan banyaknya Obat TMS karena penandaan. Pada tahun 2023 terdapat kebijakan penyeragaman kategorisasi temuan pelanggaran penandaan dan iklan disertai peningkatan kinerja menyebabkan kenaikan capaian indikator kinerja menjadi 107,49% dan termasuk ke dalam kategori **Sangat Baik**.





### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.1. 18 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	89,00	94,59	106,28	 Tercapai/ Melampaui

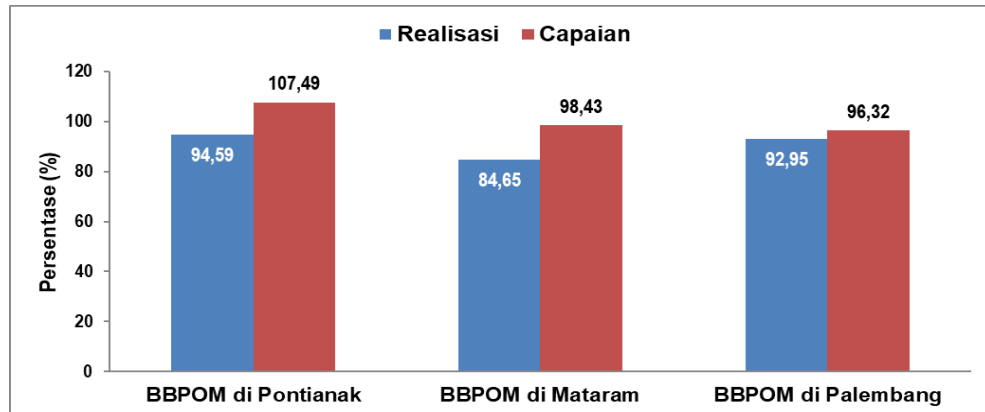
Realisasi Indikator Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 sebesar 94,59% dari target 88,00%. Dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2020-2024, capaian Tahun 2023 sebesar 106,28% telah melampaui target akhir renstra.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 19 Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Realisasi	<b>94,59</b>	<b>84,65</b>	<b>92,95</b>
	Capaian	<b>107,49</b>	<b>98,43</b>	<b>96,32</b>





Grafik 3.1. 3Perbandingan Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Berdasarkan grafik, realisasi kinerja untuk Indikator Kinerja persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan secara berturut-turut dari yang paling tinggi dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak kemudian BBPOM di Palembang dan BBPOM di Mataram. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan maka capaian indikator kinerja ini secara berturut-turut dari yang paling tinggi diraih BBPOM di Pontianak kemudian BBPOM di Mataram dan BBPOM di Palembang.

##### 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:

- Terlaksananya sampling dan pengujian Obat sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman sampling Obat tahun 2023.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian dan petugas sampling.
- Tersedianya baku pembanding dan reagen yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.





- Peningkatan ruang lingkup pengujian terhadap perkembangan isu terkini, yaitu uji cemaran EG/DEG pada produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Komunikasi yang efektif antara petugas sampling dengan pengujian.
- Terlaksananya perbaikan dan perawatan alat pada sebagian besar alat-alat laboratorium yang dilaksanakan dalam program perbaikan dan kalibrasi untuk alat-alat ukur
- Monitoring dan evaluasi secara berkala antara penyampling dan penguji.
- Adanya perubahan kebijakan terhadap kategorisasi dalam evaluasi penandaan.

#### 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat terdiri dari tim kerja inspeksi dan pengujian dengan pemetaan kompetensi sebagai berikut:

Tabel 3.1. 20 Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

Tim Kerja	Pemenuhan Kompetensi	Gap
Pemeriksaan	60,00%	40,00%
Pengujian	80,57%	19,43%
Rata-rata	70,29%	29,71%

Berdasarkan tabel di atas, gap pemenuhan kompetensi SDM untuk melaksanakan proses indikator kinerja ini sebesar 29,71% namun dapat memenuhi target dengan capaian sebesar 107,49% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Dalam hal efisiensi indikator kinerja ini dapat dikatakan efisien dalam penggunaan SDM namun





tetap perlu diupayakan peningkatan kompetensi SDM untuk menurunkan gap sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan dengan waktu yang efisien.

Tabel 3.1. 21 Analisis Tingkat efisiensi indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Syarat Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	IE	TE
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	107,49%	99,97%	1,1	0,08

Dalam hal penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan yaitu sebesar 1,1 termasuk ke dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi indikator kinerja adalah sebesar 0,08 artinya tingkat pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan proses indikator kinerja ini sedikit namun dapat meraih capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** sehingga dapat dikatakan efisien dalam penggunaan anggaran.

#### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemenuhan target kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 telah mencapai hasil target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan antara lain :

- Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian sampel Obat *post market* secara terpadu, konsisten dan terstandar sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian.
- Melaksanakan pengawasan label/penandaan dan iklan sesuai pedoman dan melaporkan data tersebut ke Badan POM.





- c. Melaksanakan pengujian di laboratorium sesuai dengan standar ISO 17025:2017 terintegrasi dengan ISO 9001:2015.
- d. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengujian di Laboratorium dalam rangka peningkatan kompetensi personil laboratorium.
- e. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka pengawasan Obat yang diproduksi/didistribusi yang beredar di wilayah Kalimantan Barat dan di daerah perbatasan antar negara.
- f. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemastian mutu Obat yang diproduksi dan beredar.

### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya antara lain :

Tabel 3.1. 22 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2023

NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai*	Belum**	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan	Melakukan peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Telah melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pengujian dalam operasional instrumen GCMS (TW I) dan LCMSMS (TW III)Telah mengikuti Bimbingan Teknis sampling dan penandaan Obat pada TW II dan TW IV		





		Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.	Telah melakukan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal (TW III)		
--	--	---	---	--	--

### 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

- Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Obat pada tahun berikutnya.
- Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Meningkatkan kepercayaan *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.
- Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.
- Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

#### SK.1.IKSK.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan yang disampling dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan yang dilakukan agar produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang



diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Pangan dengan menggunakan sampling *targeted/purposive*. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel yang disampling *targeted* yang

Memenuhi Syarat terhadap total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted MS}}{\text{Total sampel Targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Sampel yang diperiksa adalah sampel yang dilakukan pengecekan Nomor Izin Edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Sampel yang diuji adalah sampel yang dilakukan pengujian laboratorium

Pemeriksaan hasil sampling Makanan dilakukan secara berjenjang dan berurutan berdasarkan kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat yang meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal, termasuk Makanan Tidak Memenuhi Syarat dan NIE yang kedaluwarsa
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Pengujian

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.





## 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 23 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	77,00	77,78	101,01	Sangat Baik

Capaian indikator kinerja persentase Makanan yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 termasuk dalam kriteria “Sangat Baik” yaitu sebesar 101,01%, dengan realisasi (77,78%) berada di atas target (77,00%).

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	2020	71,00	63,18	88,99	Cukup
	2021	73,00	82,80	113,42	Sangat Baik
	2022	75	83,21	110,94	Sangat Baik
	2023	77	77,78	101,01	Sangat Baik

Persentase capaian kinerja untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2023 sebesar 101,01%, sedangkan capaian pada tahun 2022 sebesar






110,94, capaian ini menurun sebesar 9,93%, namun sudah berada di atas target.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 25 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023(%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	80,00	77,78	97,22	 Akan Tercapai

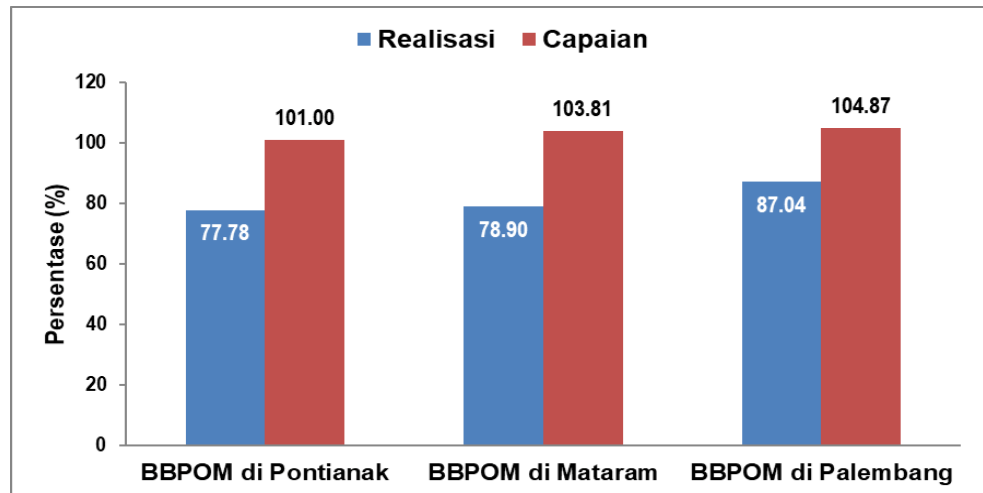
Realisasi Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2023 sebesar 77,78% sudah mencapai 97,22% dari target 80% di akhir tahun Renstra 2020-2024. Realisasi 80% di tahun 2024 diperkirakan akan tercapai.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1.26 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	Realisasi	77,78	78,90	87,04
	Capaian	101,00	103,81	104,87





Grafik 3.1. 4 Perbandingan Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Perbandingan

Berdasarkan grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak (realisasi 77,78, capaian 101,00%) lebih rendah dibanding 2 (dua) Balai perbandingan yaitu BBPOM di Mataram (realisasi 78,90, capaian 103,81%) dan BBPOM di Palembang (realisasi 87,04, capaian 104,87%). Ketiga Balai untuk indikator kinerja ini masuk kategori **sangat baik**.

#### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 mendapat kategori Sangat Baik. Realisasi yang dicapai di atas target yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa makanan yang beredar di Provinsi Kalimantan Barat secara umum telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat dan mutu berdasarkan hasil evaluasi produk meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :





- Terlaksananya sampling dan pengujian Pangan sesuai dengan target yang telah disusun berdasarkan pedoman prioritas sampling Pangan tahun 2023.
- Tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten, ditunjang dengan sistem pelaksanaan pengujian yang efektif.
- Tersedianya baku pembanding, reagen kimia, media mikrobiologi, dan peralatan laboratorium yang memadai sehingga parameter uji dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Komunikasi petugas sampling dengan penguji yang efektif.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala antara penyampling dan penguji.
- Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sampel Makanan yang sesuai dengan ketentuan.

## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat berada di Tim Kerja Pemeriksaan dan Tim Kerja Pengujian. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Tim Kerja pemeriksaan sebesar 60%, dan tim kerja pengujian sebesar 80,57%, sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 40% pada tim kerja pemeriksaan dan 19,43% pada tim kerja pengujian. Adanya gap pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di tim kerja baik Pemeriksaan maupun pengujian

Meskipun terdapat gap kompetensi Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, nilai efisiensi untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 1,1 dengan kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di





masing-masing level PFM, penguatan komitmen petugas, realisasi anggaran sesuai perencanaan, dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

## 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian target kinerja Persentase Makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 antara lain :

- a. Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang,berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- b. Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
- c. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan peredaran pangan olahan.
- e. Pembinaan terhadap sarana distribusi pangan yang dilakukan oleh petugas pada saat pelaksanaan pengawasan dalam pemenuhan cara peredaran pangan yang baik.





### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya antara lain :

Tabel 3.1. 27 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023

NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai*	Belum**	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan	Peningkatan Kompetensi Petugas Pengawas dan Penguji Secara Berjenjang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan PK Pb, Cd, Hg, Sn,As dalam tepung Terigu secara ICPMS ( TW II 2023)</li> <li>2. Penetapan Kadar Senyawa Golongan Ciprofloxacin dalam Udang secara LC MS/MS</li> <li>3. Telah mengikuti Bimbingan Teknis sampling dan penandaan Obat pada TW II dan TW IV</li> </ol>		
		Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.	<p>Telah melakukan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal (TW II 2023)</p>		



### 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

- Sebagai dasar perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan pada tahun berikutnya.
- Digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium
- Meningkatkan kepercayaan stakeholder dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan
- Memberikan rasa aman pada masyarakat dalam mengonsumsi Obat dan Makanan
- Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.
- Penambahan alokasi dana perbaikan dan perawatan instrumen laboratorium yang direvisi dari pengurangan dana perjalanan dinas koordinasi maupun optimalisasi bimtek secara daring.

#### SK.1.IKSK.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

Pengukuran indikator ini dilakukan terhadap Makanan berfortifikasi yang beredar dengan metode sampling *targeted*. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujiannya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan. Adapun pengukuran terhadap indikator dilakukan dengan membagi jumlah sampel fortifikasi yang disampling *targeted* yang Memenuhi Syarat terhadap total sampel fortifikasi *targeted* yang diperiksa dan diuji dengan formula sebagai berikut:





$$\% \text{Pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{jumlah sampel pangan fortifikasi MS}}{\text{Total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Keterangan : Sumber data total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji berasal dari pedoman sampling.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.27 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	97,60	94,12	96,43	Cukup

Pada tahun 2023, untuk indikator kinerja persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak mencapai realisasi sebesar 94,12% berada di bawah target (97,60%) dengan capaian sebesar 96,43%, termasuk dalam kriteria **Cukup**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 28 Perbandingan Target dengan Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Presentase Pangan Fortifikasi yang	2020				
	2021	95,00	85,26	89,75	Cukup






Memenuhi Syarat	2022	96.30	87.00	90.34	Cukup
	2023	97,60	94,12	96,43	Cukup

Persentase capaian Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2023 sebesar 96,43% sedangkan capaian pada tahun 2022 sebesar 90,34%. Capaian indikator kinerja ini naik sebesar 6,09% dari tahun sebelumnya

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 29 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	94,00	94,12	100,1	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi terhadap indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2023 mencapai 94,12% dengan target 94,00%. Capaian yang sudah dilaksanakan sebesar 100,1% dari target akhir tahun Renstra 2020-2024 (ada penyesuaian target 2024 dari 99,00% menjadi 94,00%)

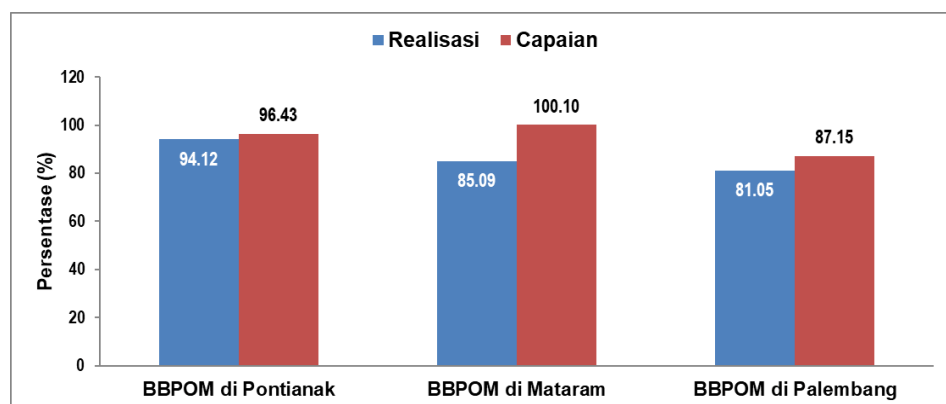




#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 30 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Presentase Pangan Fortifikasi Memenuhi Syarat	Realisasi (%)	94,12	85,09	81,05
	Capaian (%)	96,43	100,10	87,15



Grafik 3.1. 5 Perbandingan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Berdasarkan grafik capaian Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Balai Besar POM di Pontianak menempati urutan kedua setelah Balai Besar POM di Mataram.





## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Penyebab capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 belum optimal karena :

- Hasil pengujian mutu sampel fortifikasi tepung terigu yang Tidak Memenuhi Syarat meliputi kadar Vitamin B2 dan Vitamin B9. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman produsen dalam efektivitas proses penambahan fortifikan ke dalam produk.
- Ketidapatuhan sarana produksi pangan fortifikasi dalam penambahan zat fortifikan sesuai standar.
- Produsen produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat berada di luar cakupan wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pontianak, sehingga tidak dapat dilakukan intervensi secara langsung melainkan perlu melibatkan *stakeholder* di luar wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pontianak.

## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat terdiri dari tim kerja pemeriksaan dan pengujian. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada tim kerja pemeriksaan sebesar 60%, dan tim kerja pengujian sebesar 80,57%, sehingga masih ada kesenjangan pemenuhan kompetensi sebesar 40% pada tim kerja pemeriksaan dan 19,43% pada tim kerja pengujian. Meskipun terdapat kesenjangan, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja.

Dalam hal penggunaan anggaran, nilai efisiensi untuk indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 1 dengan kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penguatan komitmen petugas, realisasi





anggaran sesuai perencanaan, dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Balai Besar POM di Pontianak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung sebagai upaya pencapaian keberhasilan indikator kinerja ini, antara lain:

- a. Melaksanakan sampling pangan fortifikasi sesuai dengan Pedoman Sampling.
- b. Meningkatkan kompetensi petugas terkait sampling, pengujian dan pemeriksaan sarana pangan fortifikasi.
- c. Melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium dilakukan secara rutin untuk menjamin performa alat.
- d. Menerapkan ISO 17025:2017 yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara konsisten.
- e. Melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi terkait penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta monitoring kesesuaian penambahan zat fortifikan pada pangan.

### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 31 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat  
Tahun 2023

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.	Telah mengikuti Bimbingan Teknis pengawasan fortifikasi pangan TW I dan refreshment pengawasan pangan fortifikasi TW IV		





No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.	Telah melakukan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal (TW III 2023)		

## 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

### a. Internal

- Hasil analisis program yang mendukung pencapaian indikator ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

### b. Eksternal

- Sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan program penanganan *stunting* di daerah.
- Meningkatkan kepercayaan *Stakeholder* dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.





**SASARAN STRATEGIS 2**  
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan  
dan Mutu Obat dan Makanan

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **101,26%** dengan Predikat **Sangat Baik**

**SK.2.IKSK.1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu**

Indeks Kesadaran Masyarakat diperoleh dari Survei Pengukuran Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, yang mencakup:

- 1) Aspek Pengetahuan/*knowledge* bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Dari sini terlihat sejauh mana pengaruh informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- 2) Aspek Sikap/*attitude* bertujuan untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 3) Aspek Perilaku/*practices* bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.





Tabel 3.1. 32 Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	$\leq 45$
2	Kurang Baik	45,01 - 60,00
3	Cukup Baik	60,01 - 75,00
4	Baik	75,01 - 90,00
5	Sangat Baik	$\geq 90,01$

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 33 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat ( <i>Awareness Index</i> ) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	85,00	86,07	101,26	Sangat Baik

Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2023 termasuk *awareness index* terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, menunjukkan realisasi 86,07 diatas target 85,00 dengan persentase capaian 101,26%. Capaian indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.





## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya


Tabel 3.1. 34 Profil Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	2020	70	80,54	115,06	Sangat Baik
	2021	81	77,95	96,23	Cukup
	2022	83	82,55	99,46	Cukup
	2023	85	86,07	101,26	Sangat Baik

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Pada tahun 2022, realisasi nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu adalah 82,55 dengan capaian 99,46%. Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 adalah 86,07 dengan capaian 101,26%. Terlihat peningkatan Nilai Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dibandingkan dengan Tahun 2022.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra.

Tabel 3.1. 35 Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	87,00	86,07	98,93	 Akan Tercapai





Realisasi indikator kinerja kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu Tahun 2023 mencapai 86,07. Capaian Tahun 2023 sebesar 98,93 % dari target akhir tahun Renstra 2020-2024 dengan kategori **Akan Tercapai**. Program dan kegiatan tahun 2023 yang mendukung capaian tersebut akan dipertahankan dan ditingkatkan agar capaiannya memenuhi target jangka menengah sesuai renstra.

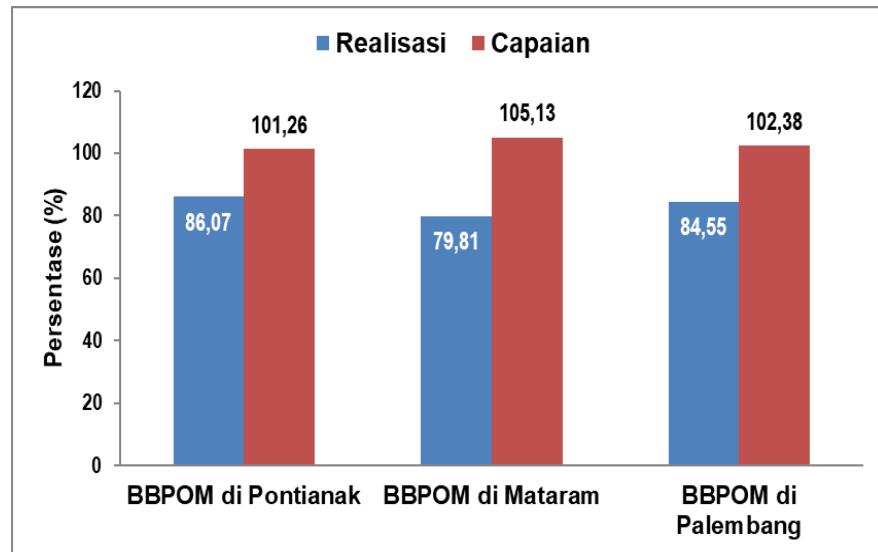
#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 36 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Realisasi	86,07	79,81	84,55
	Capaian	101,26	105,13	102,38

Capaian paling rendah diraih oleh BBPOM di Mataram. Capaian paling tinggi diraih oleh BPOM di Pontianak, capaian tertinggi kedua oleh BBPOM di Palembang.





Grafik 3.1. 6 Perbandingan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Berdasarkan tren Kesadaran Masyarakat dapat dianalisis bahwa tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat tentang Obat dan Makanan cenderung meningkat, terutama terkait variabel kedaluwarsa tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Untuk perilaku masyarakat variabel tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label / kemasan produk. Penyebab keberhasilan pencapaian indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Pontianak antara lain sebagai berikut:

- a. Intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan cara memfokuskan tujuan dan tema / materi / pesan KIE dengan mempertimbangkan ragam





- audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah serta melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas masyarakat
- b. Penyampaian KIE dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan dengan target / kelompok sasaran penerima KIE. Media yang banyak diakses antara lain media televisi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, kemasan produk dengan cara pemberian informasi adanya Nomor Izin Edar (NIE) atau 2D Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan, media sosial yang disesuaikan dengan usia dan platform serta media luar ruang.
  - c. Sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi keamanan Obat dan Makanan dengan melibatkan perangkat daerah/ tokoh masyarakat/ tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media dan *influencer* yang memiliki pengaruh dan jangkauan luas di kalangan masyarakat, menguatkan kemitraan dan mengedukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja agar dapat menjadi *peer educator* untuk menyebarkan informasi keamanan Obat dan makanan melalui pesan Cek KLIK seperti pada kegiatan KIE bersama Komisi IX DPR RI dan Gerakan Pramuka.

## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu yang dilaksanakan berada di Tim Kerja Informasi dan Komunikasi. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Substansi Informasi dan Komunikasi sebesar 75% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 25%. Adanya gap pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di substansi Informasi dan Komunikasi.





Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh petugas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.

### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang melibatkan tokoh masyarakat seperti Anggota Komisi IX DPR RI dilaksanakan merata sampai ke wilayah pelosok.
2. Pemberdayaan masyarakat yang intensif melalui kegiatan terpadu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS yang aman dilaksanakan di daerah yang merupakan lokus *stunting* dengan melibatkan secara aktif Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) setempat.
3. Membagikan informasi Obat dan Makanan terkini kepada masyarakat secara intensif dengan pemanfaatan berbagai media informasi, berupa media cetak, radio, *videotron*, baliho, leaflet, dan media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube*).
4. Menyusun materi informasi Obat dan Makanan yang sesuai dengan sasaran kegiatan dan kondisi terkini.
5. Meningkatkan peran aktif Organisasi Perangkat Daerah, akademisi, asosiasi, pelaku usaha, media, dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan KIE.
6. Melibatkan partisipasi aktif anggota SAKA POM dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan KIE.





## 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 37 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi Obat dan Makanan	Melibatkan tokoh masyarakat, Pramuka dan komunitas masyarakat (PKK, Posyand, Kader Keamanan Pangan) dalam kegiatan KIE Pemberdayaan Masyarakat bersama DPR RI		

## 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Dengan adanya rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kesadaran Masyarakat, misalnya terlaksananya Kegiatan KIE yang melibatkan anggota SAKA POM untuk menjangkau lebih banyak generasi muda dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di tahun 2023 termasuk kriteria "Sangat Baik". Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.





**SASARAN STRATEGIS 3**  
**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **103,54%** dengan Predikat **Sangat Baik**

**SK.3.IKSK.1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan**

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pontianak. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD) kepada pelaku usaha Obat dan Makanan.

Aspek pengukuran dalam survei ini adalah :

1. Aspek bimbingan dan pembinaan
2. Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
3. Aspek penanganan saran dan masukan
4. Aspek manfaat
5. Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan
6. Aspek pengetahuan dan pemahaman.





## 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 38 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan	93,40	97,10	103,96	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 mencapai 97,10%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 93,40%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,96% sehingga termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 39 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2020	86	92,19	107,2	Sangat Baik
	2021	91,1	91	99,89	Cukup
	2022	92,3	90,8	98,37	Cukup
	2023	93,40	97,10	103,96	Sangat Baik

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,59% bila dibandingkan dengan realisasi





tahun sebelumnya, yaitu dari 98,37% pada tahun 2022 menjadi 103,96% pada tahun 2023.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 40 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,60	97,10	102,64%	 Tercapai / Melampaui

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 mencapai 97,10%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra sebesar 94,6%, persentase realisasi kinerja tahun 2023 mencapai 102,64% dari target akhir Renstra 2020-2024.



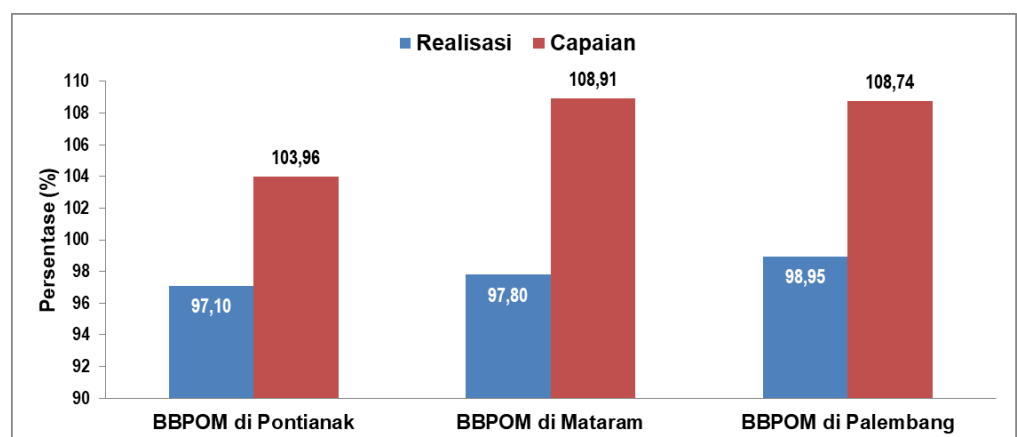


#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 41 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Realisasi	97.10	97,8	98,95
	Capaian	103.96	108,91	108,74

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian realisasi dan capaian kinerja indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak lebih rendah dari capaian kinerja UPT pembanding. Namun demikian, realisasi kinerja Balai Besar POM di Pontianak di atas target yang telah ditetapkan yaitu 97,10% dengan capaian kinerja yaitu 103,96%.



Grafik 3.1. 7 Perbandingan Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding





## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab tercapainya indikator kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- a) Pelaksanaan secara optimal inovasi AGI JAKK (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) sehingga program pendampingan UMKM yang dilaksanakan secara komprehensif dan jempot bola.
- b) Peningkatan kompetensi petugas yang dilakukan secara berkala dan konsisten khususnya terkait pelayanan publik.
- c) Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

## 6) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan berada di Tim Kerja Sertifikasi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 2 orang PFM Ahli. Sumber daya manusia yang ada sebanyak 5 orang PFM terdiri dari 1 orang Ahli Madya, 2 orang PFM Ahli Muda dan 2 orang PFM Ahli Pertama di Tim Kerja Sertifikasi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar 1 yang termasuk kriteria **Efisien**. Hal ini menunjukkan Balai Besar POM di Pontianak mampu menggunakan input anggaran untuk mencapai *output* kinerja dengan efisien.





## 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
- Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui inovasi Agi Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.
- Melakukan sosialisasi/publikasi terkait keringanan biaya bagi UMK sebesar 50% untuk pendaftaran produk, dan fasilitasi pengujian sampel untuk produk UMK.
- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait penyelesaian CAPA (*Corrective Action & Preventive Action*).

## 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 42 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap  
Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat  
dan Makanan

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.	Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan <i>coaching clinic</i> yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.	Pada tahun 2023 (Maret), telah dilakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.		





## 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022, diketahui bahwa tingkat kepuasan pelaku usaha dalam pemberian bimbingan dan pembinaan terkait cara produksi Obat dan Makanan yang baik memiliki peran penting dalam peningkatan nilai indeks kepuasan pelaku usaha, sehingga pada tahun 2023 dilakukan optimalisasi pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dengan inovasi yang ada.

### SK.3.IKSK.2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang merupakan dampak atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan.

Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan dilakukan terhadap produk Obat dan Makanan yang menjadi obyek pengawasan Badan POM yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi indeks kepuasan terhadap kinerja Badan POM atau bisa juga disebut sebagai indeks

kepuasan tidak langsung, karena masyarakat secara tidak langsung merasakan manfaat dari kinerja pengawasan Badan POM.

Aspek pembentuk kepuasan berdasarkan konsep *Service Quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu :

1. Kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan.





2. Kepuasan masyarakat atas upaya BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan.
3. Kepuasan masyarakat atas jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat.
4. Kepuasan masyarakat atas tindakan BPOM terhadap produk yang berbahaya bagi kesehatan yang beredar di masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM diukur dalam rentang indeks 0 - 100 dengan pengkategorian indeks sebagai berikut :

Tabel 3.1. 43 Kategori indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM.

Skor	Kategori Indeks
$\leq 45,00$	Tidak Puas
45,01 – 60,00	Kurang Puas
60.01 – 75,00	Cukup Puas
75.01 – 90,00	Puas
$\geq 90,01$	Sangat Puas

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 yang diterbitkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM, nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah 77,79 sehingga termasuk dalam kategori indeks **Puas**.

Nilai indeks tersebut melebihi target tahun 2023 yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 72,70 dengan nilai capaian indikator kinerja sebesar 107,00% sehingga termasuk dalam Kategori **Sangat Baik**.





Tabel 3.1. 44 Perbandingan dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,70	77,79	107,00	Sangat Baik

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 45 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	2020	69	65,76	95,3	Cukup
	2021	68,07	69,52	102,13	Sangat Baik
	2022	70,38	73,51	104,45	Sangat Baik
	2023	72,70	77,79	107,00	Sangat Baik

Realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,56 bila dibandingkan dengan tahun 2022. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 juga meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, yaitu dari 104,44% menjadi 107,00%.





### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 46 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75,01	77,79	103,71	 Tercapai / Melampaui

Realisasi indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 mencapai nilai indeks 77,79. Realisasi ini telah mencapai target Renstra tahun 2024 sebesar 75,01 dengan capaian 103,71%.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 47 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

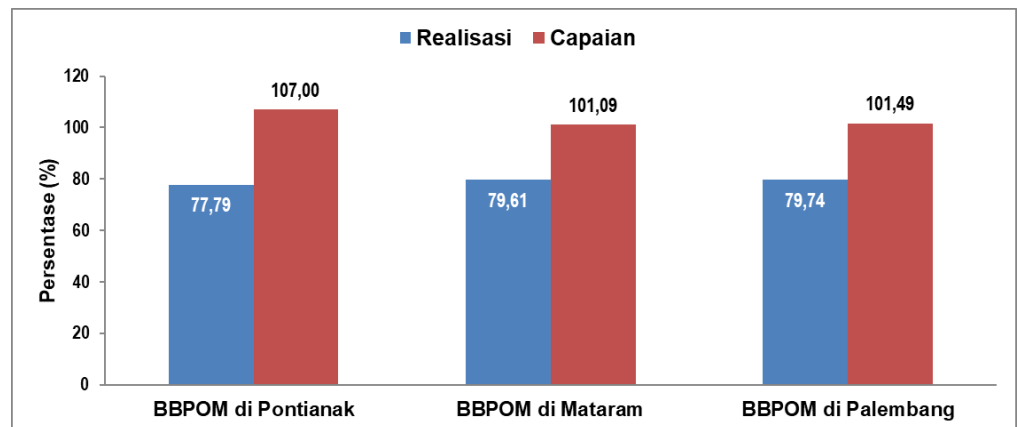
Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Realisasi	77,79	79,61	79,74
	Capaian	107,00	101,09	101,49





Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak lebih rendah dari capaian UPT lain pada Klaster 5 Klasifikasi Balai Besar POM Perbandingan. Namun demikian, capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sebesar 107,00% berada di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Mataram dan Balai Besar POM di Palembang.

Tabel 3.1. 48 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Perbandingan



### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 mencapai kategori Sangat Baik, dengan nilai indeks 77,79. Hal ini menunjukkan masyarakat puas dengan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja Balai Besar POM di Pontianak dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian tersebut, antara lain :





- Kemudahan akses informasi yang benar tentang Obat dan Makanan oleh masyarakat melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan media sosial.
- Kepastian respon dan tindak lanjut yang dilakukan atas pengaduan masyarakat terkait Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan secara rutin serta secara intensif menjelang perayaan hari raya.
- Kompetensi petugas yang terus ditingkatkan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan KIE.

#### 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan berada di tim kerja Informasi dan Komunikasi serta tim kerja Pemeriksaan. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi personel pada tim kerja Informasi dan Komunikasi sebesar 75%, sementara rata-rata pemenuhan kompetensi personel pada tim kerja Pemeriksaan sebesar 60%. Hal ini dikarenakan beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1 yang termasuk kategori. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

#### 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menyebabkan tercapainya target kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :



- Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat secara masif bersama dengan mitra kerja Badan POM yaitu Komisi IX DPR RI.
- Melakukan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui *platform* media sosial.
- Melaksanakan pemeriksaan rutin berdasarkan kajian risiko terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian.
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait obat dan makanan secara responsif.
- Melakukan publikasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dan tindak lanjutnya.

## 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 49 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan kemudahan akses informasi tentang Obat dan Makanan bagi masyarakat.	Telah dilakukan peningkatan penyebaran informasi, baik melalui KIE yang melibatkan tokoh masyarakat, juga melalui melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk		





			melalui <i>platform</i> media sosial pada TW I s/d TW IV 2023.		
--	--	--	--	--	--

### 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022, diketahui bahwa kemudahan dalam mengakses informasi yang benar tentang Obat dan Makanan oleh masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan, sehingga pada tahun 2023 dilakukan peningkatan penyebaran informasi, baik melalui KIE secara langsung kepada masyarakat, serta melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui *platform* media sosial.

### SK.3.IKSK.3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik merupakan indeks untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kategori penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. 50 Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Kategori	Interval Indeks
1	Tidak Baik	25,00 - 64,99
2	Kurang Baik	65,00 - 76,60
4	Baik	76,61 - 88,30
5	Sangat Baik	88,31 - 100,00





### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 51 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	91	90,70	99,67	Cukup

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2023 adalah 90,70. Nilai ini termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2023, untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak menunjukkan realisasi 90,70 berada di bawah target 91 dan menghasilkan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 99,67%. Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Cukup**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	2020	89,5	89,32	99,8	Cukup
	2021	90	90,7	100,78	Sangat Baik
	2022	90,5	91,39	100,98	Sangat Baik
	2023	91	90,70	99,67	Cukup






Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik sebesar 91,39 dengan capaian 100,98%. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2023 sebesar 90,70 dengan capaian 99,67%. Terlihat penurunan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dibandingkan dengan Tahun 2022. Capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori **Cukup**.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 53 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	91,25	90,70	99,40	 <b>Akan Tercapai</b>

Realisasi indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik tahun 2023 mencapai 90,70 dari target 91. Capaian Tahun 2023 sebesar 99,40% di akhir tahun Renstra 2020-2024. Balai Besar POM di Pontianak akan meningkatkan kinerja dan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

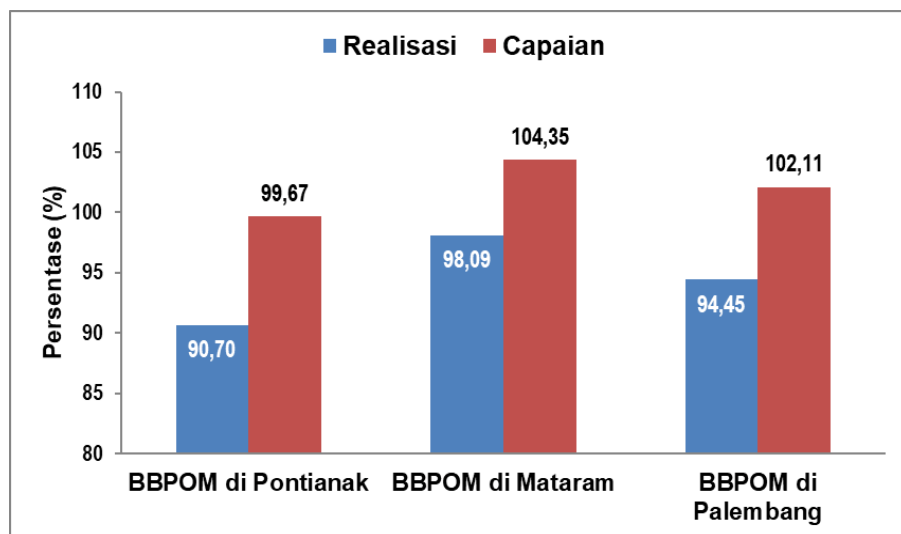




#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1.54 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan BBPOM dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Realisasi	90,7	98,09	94,45
	Capaian	99,67	104,35	102,11



Grafik 3.1. 8 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Berdasarkan Grafik diketahui bahwa capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak kriteria **Cukup** dan berada pada urutan ketiga setelah BBPOM di Mataram dan BBPOM di Palembang.





## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Penyebab penurunan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- 1) Pemahaman responden dalam mengisi survei belum memadai, terutama pengisian secara mandiri melalui WA atau *subsite*.
- 2) Jumlah responden yang mengisi jenis layanan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan sangat terbatas (hanya satu) sehingga tidak ada variasi pada angka survei layanan tersebut.
- 3) Sarana dan prasarana layanan publik membutuhkan pengembangan





## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang dilaksanakan berada di Tim Kerja Informasi dan Komunikasi, Tim Kerja Pengujian, Tim Kerja Sertifikasi, dan Bagian Tata Usaha. Layanan publik dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Publik sebanyak 22 orang. Pembagian tugas dalam tim tersebut antara lain: penerima sampel, penguji sampel, petugas pelayanan informasi dan pengaduan, serta petugas layanan sertifikasi. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Substansi Informasi dan Komunikasi sebesar 75% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 25%. Adanya gap pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di substansi nformasi dan Komunikasi. Untuk substansi Tata Usaha gap kompetensi sudah terpenuhi dan untuk substansi pemeriksaan rata-rata pemenuhan kompetensi sebesar 60% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 40% dikarenakan beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang yang harus dipenuhi di substansi pemeriksaan.

Anggaran pelayanan publik dikelola oleh masing-masing tim kerja terkait secara proporsional. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh petugas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.





## 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

- Melakukan pendampingan pengisian SKM kepada responden.
- Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan.
- Memenuhi sarana dan prasarana layanan publik terutama pelayanan pengujian sampel pihak ketiga.

## 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 55 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap  
Layanan Publik BPOM

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RTAL) per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah yaitu unsur persyaratan (U1); Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2); serta Sarana dan Prasarana (U9)	Tindak lanjut yang sudah dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi persyaratan dan alur pelayanan izin penerapan CPPOB, sertifikasi CDOB, sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap, pengaduan masyarakat dan SKE lebih intens melalui berbagai media sosial dan FAQ .	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM





## 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Dengan adanya rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, misalnya mengikutsertakan pelaku usaha dalam inovasi program AGI JAKK agar pemenuhan persyaratan pelayanan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan dipahami dan diikuti dengan baik
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di tahun 2023 termasuk kriteria "Cukup". Sehingga perlu dibuat strategi baru dan perencanaan kegiatannya dalam rangka mencapai target di tahun 2024, berupa peningkatan pengetahuan dan kompetensi petugas pelayanan terkait pemenuhan persyaratan pelayanan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan.

**SASARAN STRATEGIS 4**  
**Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik**

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **105,46%** dengan Predikat **Sangat Baik**

**SK.4.IKSK.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dengan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan (PSK)





atau rekomendasi PSK/pencabutan izin / pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, distribusi, pelayanan, peredaran), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 56 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023.

indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 100,00%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 93,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,53% yang termasuk dalam Kategori **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 57 Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2020	46,00	87,67	190,59	Tidak dapat disimpulkan
	2021	89,00	99,72	112,04	Sangat Baik
	2022	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
	2023	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik






Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 100%, dengan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,53%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 58 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan Target 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00	100,00	105,26	 Tercapai / Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 mencapai 100,00%. Realisasi ini telah mencapai target Renstra tahun 2024 sebesar 95,00 dengan capaian 105,26%.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 59 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

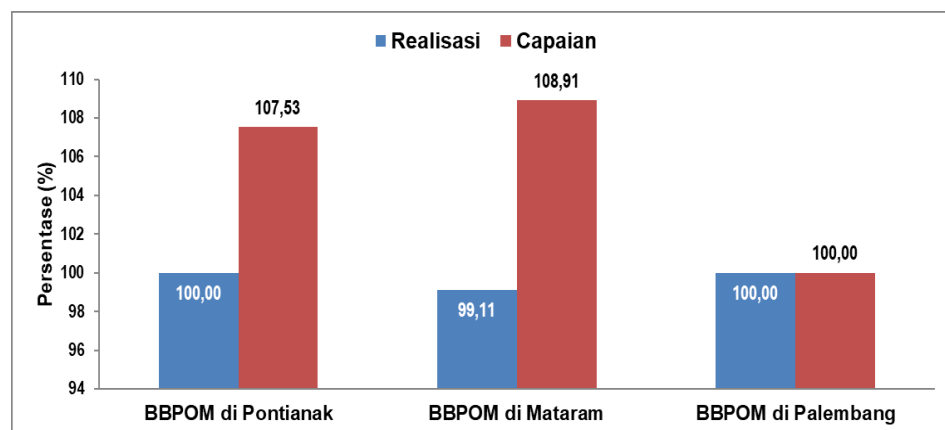
Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Realisasi	100,00	99,11	100,00
	Capaian	107,53	108,91	100,00





Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 107,53% berada di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang (100,00%) namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Balai Besar POM di Mataram (108,91%).

Grafik 3.1. 9 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding



## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Tercapainya target kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 dipengaruhi oleh :

- Komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan.
- Komunikasi yang efektif antara Balai Besar POM di Pontianak dengan Pusat maupun lintas sektor.
- Petugas yang kompeten dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi sesuai dengan pedoman tindak lanjut.





## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berada di tim kerja pemeriksaan. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi personel pada tim kerja pemeriksaan sebesar 60%. Hal ini dikarenakan beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 1,1 (**Efisien**). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

## 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain :

- a. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan kedeputian dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.
- b. Meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi.





## 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.

Tabel 3.1. 60 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan kedeputian dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.	Telah dilakukan koordinasi kepada kedeputian terkait terhadap tindak lanjut rekomendasi pada		

## 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022, diketahui bahwa koordinasi dengan kedeputian/lintas sektor sangat mendukung tercapainya indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan. Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak meningkatkan koordinasi dengan kedeputian/lintas sektor agar setiap rekomendasi hasil inspeksi dapat ditindaklanjuti.





**SK.4.IKSK.2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan**

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

**1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.1. 61 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	80,78	115,39	Sangat Baik

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023 sebesar 80,78%. Realisasi ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 115,39% sehingga termasuk dalam **Kategori Sangat Baik**.





## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya


Tabel 3.1. 62 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku kepentingan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	28,70	31,70	110,45	Sangat Baik
	2021	60	70,37	117,28	Sangat Baik
	2022	65,00	41,09	63,21	Kurang
	2023	70,00	80,78	115,39	Sangat Baik

Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu dari 63,21% pada tahun 2022 menjadi 115,39% pada tahun 2023.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 63 Pencapaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	80,78	115,39	 Tercapai / Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023 mencapai 80,78%. Realisasi ini telah mencapai target Renstra tahun 2024 sebesar 70,00% dengan capaian 115,39%.



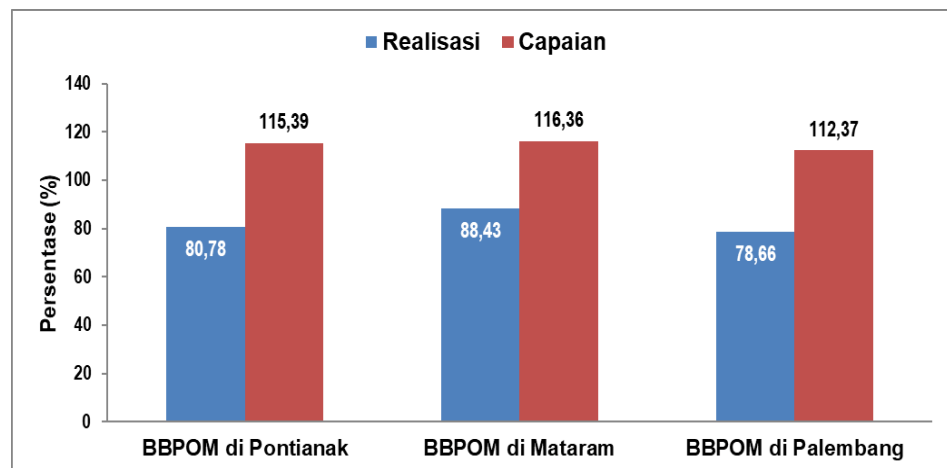


#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 64 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Realisasi	80,78	88,43	78,66
	Capaian	115,39	116,36	112,37

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 115,39% berada di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang (112,37%) namun masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Balai Besar POM di Mataram (116,36%).



Grafik 3.1. 10 Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pemanding





## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Tercapainya target persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- a. Meningkatnya komitmen pelaku usaha dalam melakukan perbaikan atas hasil inspeksi yang dilakukan.
- b. Meningkatnya respon pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.
- c. Pemanfaatan aplikasi SIPERKASA oleh pelaku usaha dalam menyampaikan laporan perbaikan/CAPA hasil inspeksi.
- d. Adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan *Desk* CAPA di Kabupaten/Kota.

## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan berada di tim kerja pemeriksaan. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada fungsi Pemeriksaan sebesar 60%. Hal ini dikarenakan beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 1,2 (**Efisien**). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

## 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan antara lain :





- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor serta pelaku usaha terkait keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang harus ditindaklanjuti.
- b. Melakukan monitoring laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi dari lintas sektor dan pelaku usaha.
- c. Melaksanakan *desk* CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi.
- d. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siperkasa dalam penyampaian laporan tindak lanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh pelaku usaha.

### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 65 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.	Telah dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi melalui optimalisasi penggunaan Siperkasa untuk pelaporan CAPA pada TW I s/d TW IV 2023.		
		Melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk mengimplementasikan Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.	Melaksanakan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada TW I s/d TW IV 2023.		





		Melakukan monitoring yang lebih intensif terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi yang harus dilakukan lintas sektor dan pelaku usaha.	Menyampaikan permintaan laporan tindak lanjut kepada lintas sektor dan pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan pada TW II s/d TW IV 2023.		
		Melaksanakan desk CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi	Melaksanakan desk CAPA kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi pada TW IV 2023.		

#### 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim tahun 2023, diketahui bahwa komitmen penyampaian laporan tindak lanjut yang dilakukan oleh lintas sektor dan pelaku usaha sangat mendukung tercapainya indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siperkasa dalam penyampaian laporan tindak lanjut hasil inspeksi. Dengan adanya kemudahan akses penggunaan aplikasi Siperkasa dalam pelaporan CAPA, terjadi peningkatan jumlah respon tindak lanjut dari tahun sebelumnya.





#### SK.4.IKSK.3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi dinilai tepat waktu apabila tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Adapun keputusan penilaian sertifikasi yang dimaksud dalam indikator kinerja ini meliputi:

- a. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT,
- b. Hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk,
- c. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik,
- d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi,
- e. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang,
- f. Hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan),
- g. Hasil pemeriksaan dalam rangka Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk penerbitan Sertifikat Pemenuhan Standar SMKPO di Sarana Peredaran Pangan Olahan Importir, Distributor, Sarana Ritel Pangan Modern selain minimarket dan Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO di Sarana Ritel Pangan Tradisional, Ritel Pangan Modern berupa minimarket, Pengelola Pasar





- (apabila ada permintaan pemeriksaan dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan),
- h. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB,
  - i. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, dan SK,
  - j. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
  - k. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel *early warning system*).

Indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikat yang diselesaikan tepat waktu diukur menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

### 1) Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 66 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik

Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 sebesar 100%. Realisasi ini sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% sehingga termasuk dalam kriteria **Baik**.





## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 67 Profil Pencapaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 Dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85,00	99,38	116,92	Sangat Baik
	2021	99,00	99,79	100,8	Sangat Baik
	2022	100	99,58	99,58	Cukup
	2023	100	100	100	Baik

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,42%. Capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori **Baik**.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 68 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00%	▲ Tercapai / Melampaui



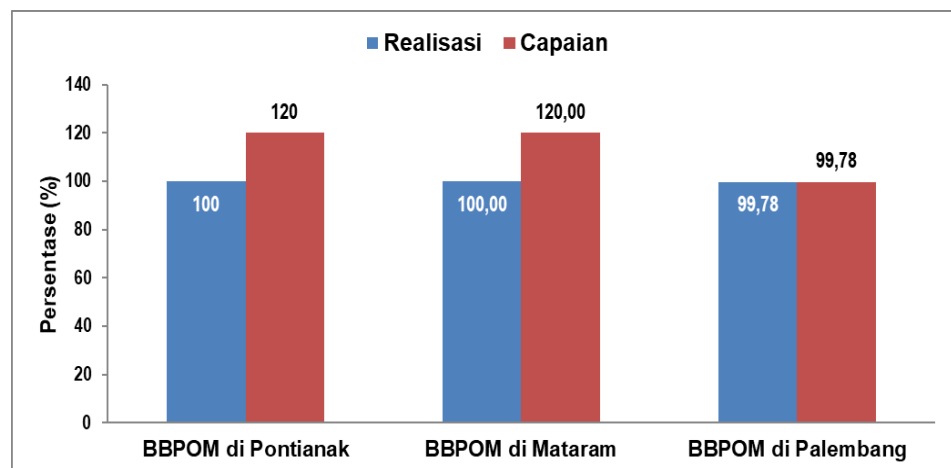
Realisasi indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 mencapai 100,00%. Realisasi ini telah mencapai target Renstra tahun 2024 sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%.

#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 69 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Realisasi	100,00	100,00	99,78
	Capaian	120,00	120,00	99,78

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai Besar POM di Pontianak sebesar 120,00%. Capaian ini berada di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang (99,78%) namun sama dengan capaian kinerja Balai Besar POM di Mataram (120,00%).



Grafik 3.1. 11 Perbandingan Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding





#### 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu :

1. Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
2. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
3. Tingginya komitmen dalam mengimplementasikan inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga sebagai upaya peningkatan waktu pelayanan termasuk di hari libur.
4. Telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 secara konsisten.
5. Laboratorium Balai Besar POM memiliki Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang memadai untuk melakukan pengujian yang diperlukan oleh *stakeholder*.
6. Petugas yang kompeten dan berintegritas dalam memberikan pendampingan dalam proses pemenuhan persyaratan dan pendaftaran produk.
7. Dukungan teknologi informasi komunikasi berupa aplikasi *e-sertifikasi e-bpom* dan *e-registration* yang mudah diakses.

#### 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu berada di Tim Kerja Sertifikasi dan Tim Kerja Pengujian. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang





dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 2 orang PFM Ahli di Tim Kerja Sertifikasi dan 43 orang PFM Ahli di Tim Kerja Pengujian. Sumber daya manusia yang ada sebanyak 5 orang PFM Ahli di Tim Kerja Sertifikasi dan sebanyak 25 orang PFM Ahli di Tim Kerja Pengujian. Namun pada proses pengujian sampel pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis sampel yang diuji, sehingga sumber daya manusia yang ada masih memadai untuk melaksanakan target pengujian tersebut.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 1 **yang termasuk kriteria Efisien**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

#### 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- b. Meningkatkan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.
- c. Secara konsisten mengimplementasikan Inovasi Kapuas 24 (Kawal Pengujian Tuntas 24 Jam) dalam pengujian sampel pihak ketiga sebagai upaya peningkatan waktu pelayanan pengujian sampel pihak ketiga.
- d. Mengimplementasikan sistem portal layanan pihak ketiga dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).





### 8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tabel 3.1. 70 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.	Memfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.	Pada bulan Januari - Maret 2023 telah dilakukan pemanfaatan aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat leaflet elektronik terkait proses registrasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha		

### 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2023, diketahui bahwa pelaku usaha dapat mengetahui terkait program pendampingan yang dilakukan, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta inovasi Kapuas 24 terkait pengujian sampel pihak ketiga. Pelaku usaha juga dapat dengan mudah mengakses dan mengunggah dokumen yang diperlukan pada aplikasi e-sertifikasi dan e-registration. Selain itu pelaku usaha dapat mengakses leaflet elektronik terkait registrasi yang sangat





memudahkan pelaku usaha dalam rangka proses registrasi Obat dan Makanan.

#### SK.4.IKSK.4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing, Balai Besar POM di Pontianak melakukan pengawasan terhadap sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Barat. Sarana produksi Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yaitu industri kosmetik, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), industri pangan olahan yang didominasi oleh sarana produksi AMDK, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Pengawasan terhadap sarana produksi dilakukan sesuai dengan pedoman pengawasan/pemeriksaan sarana. Sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ditentukan berdasarkan pedoman tindak lanjut pengawasan.

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 71 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	37,78	75,56	Cukup

Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 mencapai 37,78%. Realisasi ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 50,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 75,56% sehingga termasuk dalam **Kategori Cukup**.





## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya


Tabel 3.1. 72 Pencapaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	20,00	26,56	132,8	Tidak dapat disimpulkan
	2021	30,00	29,69	98,96	Cukup
	2022	40,00	24,21	60,53	Kurang
	2023	50,00	37,78	75,56	Cukup

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 24,21% pada tahun 2022 menjadi 37,78% pada tahun 2023. Capaian kinerja indikator ini juga meningkat dari 60,53% pada tahun 2022 menjadi 75,56% pada tahun 2023.

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 73 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	37,78	62,97	 Perlu Upaya Keras





Realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 mencapai 37,78%. Bila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yaitu sebesar 60%, persentase capaian tahun 2023 ini sebesar 62,97%. Capaian tersebut perlu ditingkatkan secara signifikan agar target akhir Renstra 2020-2024 dapat tercapai.

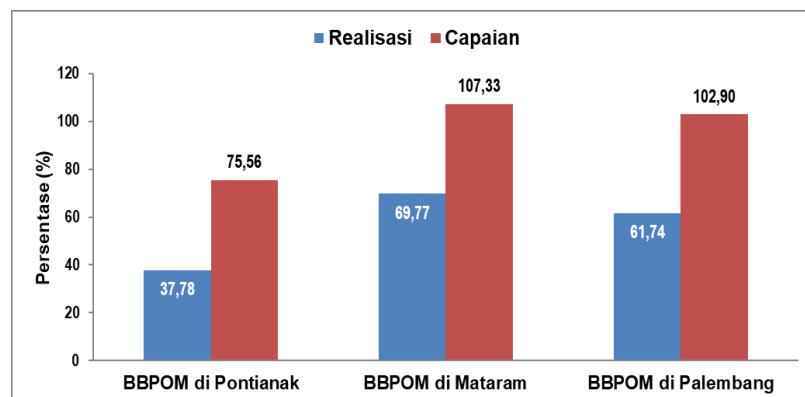
#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 74 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	37,78	69,77	61,74
	Capaian	75,56	107,33	102,90

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja UPT pembanding. Balai Besar POM di Mataram memiliki capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 107,33%, diikuti oleh Balai Besar POM di Palembang sebesar 102,90% dan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 75,56%.





Grafik 3.1. 12 Perbandingan Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyebab tidak tercapainya indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- Kurangnya kepatuhan sarana produksi IRTP dalam mencantumkan kode produksi dan tanggal kedaluwarsa pada label produk. Selain itu, sarana IRTP tidak konsisten dalam menerapkan higiene, sanitasi dan dokumentasi proses produksi.
- Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana IRTP.
- Tidak konsistennya sarana produksi dalam menerapkan prinsip-prinsip cara produksi yang baik.
- Kurangnya komitmen sarana produksi AMDK dalam melakukan pengujian produk secara periodik sesuai dengan persyaratan SNI.
- Kurangnya jumlah laboratorium eksternal di wilayah kabupaten/kota dalam rangka mendukung pengujian mutu produk.





## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di tim kerja pemeriksaan. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi personel pada tim kerja pemeriksaan sebesar 60%. Hal ini dikarenakan beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 1 (**Efisien**). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

## 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

1. Melakukan komunikasi yang efektif kepada pelaku usaha terkait kewajiban pencantuman informasi produk secara lengkap pada label, serta kewajiban sarana produksi untuk melakukan proses produksi sesuai standar produksi.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka pembinaan serta pengawasan sarana produksi IRTP.
3. Melakukan KIE, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.





8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tabel 3.1. 75Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi.	Melaksanakan koordinasi kepada pemerintah daerah terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada TW I s/d TW IV 2023.		
		Melakukan KIE/bimbingan teknis/pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Melakukan bimbingan teknis pendampingan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CPPOB pada TW II 2023.		
		Meningkatkan komitmen industri pangan dalam memenuhi kebutuhan personel pengujian dan peralatan laboratorium sehingga pengujian produk oleh sarana produksi dapat	Melakukan komunikasi dengan lembaga penerbit SNI produk AMDK di Kalimantan Barat terkait pelaksanaan uji mikrobiologi yang dilakukan sarana produksi AMDK pada TW III dan TW IV 2023.		





		dilakukan secara periodik.			
		Meningkatkan kepatuhan sarana produksi AMDK dalam memenuhi persyaratan pengujian mikrobiologi	Telah dilakukan permintaan laporan pengujian mikrobiologi pada saat pemeriksaan sarana produksi AMDK.		

### 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim tahun 2023, diketahui bahwa kerjasama dengan lintas sektor sangat mendukung keberhasilan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai instansi pembina sarana IRTP serta dengan lembaga penerbit SNI dalam rangka mengawal kepatuhan sarana produksi AMDK.

#### SK.4.IKSK.5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing, Balai Besar POM di Pontianak melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Barat. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Pengawasan terhadap sarana distribusi dilakukan sesuai dengan pedoman pengawasan/pemeriksaan sarana. Sarana distribusi yang Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ditentukan berdasarkan pedoman tindak lanjut pengawasan.





### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 76 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak.

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	75,18	90,58	Cukup

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 sebesar 75,18%. Realisasi ini belum mencapai target tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu 83,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 90,58% yang termasuk dalam **Kategori Cukup**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 77 Perbandingan pencapaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	2020	55,00	78,01	141,84	Tidak dapat disimpulkan
	2021	78,00	73,08	93,69	Cukup
	2022	80,00	64,38	80,48	Cukup
	2023	83,00	75,18	90,58	Cukup

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 mengalami peningkatan realisasi sebesar 10,8% bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu dari 64,38% pada tahun 2022 menjadi 75,18% pada tahun 2023. Capaian indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan






yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 juga meningkat dari 80,48% pada tahun 2022 menjadi 90,58% pada tahun 2023.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 78 Perbandingan Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,00	75,18	88,45	 Akan Tercapai

Realisasi indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 sebesar 75,18%, dengan capaian sebesar 88,45% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 85,00%. Realisasi tersebut perlu ditingkatkan agar target akhir Renstra 2020-2024 dapat tercapai.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 79 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

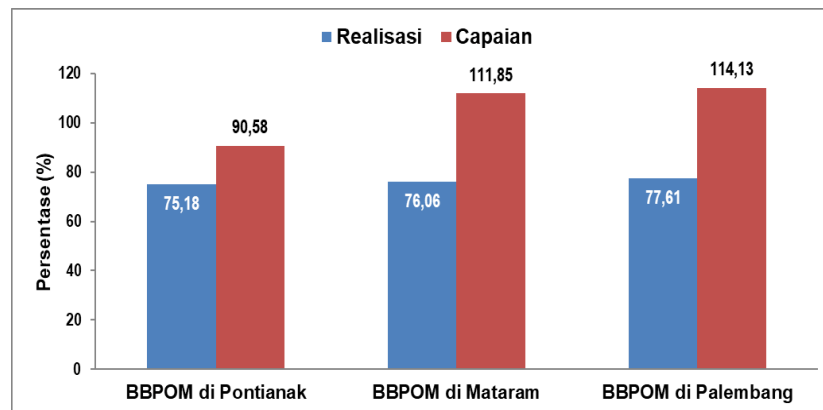
Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	75,18	76,06	77,61
	Capaian	90,58	111,85	114,13

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 90,58% berada di





bawah capaian kinerja Balai Besar POM di Palembang (114,13%) dan capaian kinerja Balai Besar POM di Mataram (111,85%).



Grafik 3.1. 13 Perbandingan Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Perbandingan

## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Belum optimalnya pencapaian target indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Adanya kemudahan perizinan berusaha meningkatkan jumlah sarana distribusi sehingga tidak semua sarana dapat dilakukan pemeriksaan.
- Luasnya cakupan wilayah pengawasan serta keterbatasan transportasi ke beberapa daerah menyebabkan pengawasan terhadap sarana distribusi belum optimal.
- Kurangnya kepatuhan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam memenuhi ketentuan/regulasi cara distribusi yang baik dan standar pelayanan kefarmasian.
- Kurangnya komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
- Mudahnya akses terhadap produk ilegal melalui media *online*.





## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan indikator kinerja persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan berada di tim kerja pemeriksaan. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi personel pada tim kerja pemeriksaan sebesar 60%. Hal ini dikarenakan beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 0,9 yang termasuk kategori **Tidak Efisien**.

## 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di Balai Besar POM di Pontianak, yaitu :

- a) Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan/standar/pedoman yang berlaku.
- b) Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- c) Meningkatkan pengetahuan dan *awareness* pelaku usaha melalui kegiatan *Desk CAPA* sebagai upaya pembinaan terkait cara distribusi yang baik.
- d) Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.
- e) Melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Badan POM yang diterima oleh pemerintah daerah.
- f) Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi.





## 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 80 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.	Melibatkan lintas sektor dalam melakukan pembinaan/ pengawasan sarana distribusi pada TW I s/d TW IV 2023.		
		Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.	Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk		





		Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi.	Melakukan bimtek pemanfaatan aplikasi E-Was dalam rangka pengawasan sarana		
--	--	---	--	--	--

### 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022 dan Laporan Kinerja Interim tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak melakukan penyesuaian kegiatan yaitu dengan mengadakan kegiatan *Desk CAPA* sebagai upaya pembinaan terkait cara distribusi yang baik dan kegiatan pengawalan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Badan POM yang diterima oleh pemerintah daerah. Selain itu, laporan kinerja dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan secara mandiri.

#### SK.4.IKSK.6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)





b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1) **Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.1. 81 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,25	4,64	109,18	<b>Sangat Baik</b>

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak adalah 4,64 terhadap target 4,25 dengan persentase capaian sebesar 109,18 %. Capaian tersebut termasuk dalam kriteria “**Sangat Baik**”.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Tabel 3.1. 82 Perbandingan Pencapaian Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	<b>2020</b>	3,51	3,83	109,12	<b>Sangat Baik</b>
	<b>2021</b>	4,01	4,25	105,99	<b>Sangat Baik</b>
	<b>2022</b>	4,2	4,27	101,67	<b>Sangat Baik</b>






	2023	4,25	4,64	109,18	Sangat Baik
--	------	------	------	--------	-------------

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra 2020-2024. Pada tahun 2022, Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak sebesar 4,27 dengan capaian 101,67 %. Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar 4,64 dengan capaian 109,18%. Capaian dalam indikator kinerja ini masih berada dalam kategori **Sangat Baik**.

### 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra.

Tabel 3.1. 83 Perbandingan Persentase Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,64	98,72	 Akan Tercapai

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 mencapai 4,64 melebihi target 4,25. Capaian tahun 2023 sebesar 98,72% dari target 4,70 pada tahun 2024 dengan kriteria “**Akan Tercapai**”.

### 4) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1. 84 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

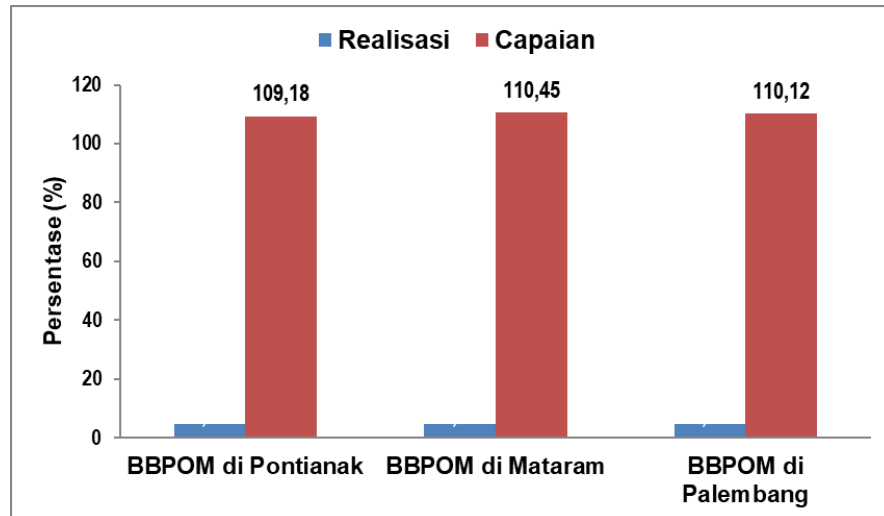
Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
	Realisasi	4,64	4,86	4,68





Indeks Pelayanan Publik	Capaian	109,18	110,45	110,12
-------------------------	---------	--------	--------	--------





Grafik 3.1. 14 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik dengan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Sangat Baik** sama seperti BBPOM di Mataram dan BBPOM di Palembang.

#### 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penunjang keberhasilan dalam indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Kompetensi petugas pada saat melayani permintaan informasi dan pengaduan masyarakat yang sangat baik dalam memberikan pelayanan publik. Pelatihan diberikan secara berkelanjutan kepada petugas pelayanan publik.
- Sikap empati dan peduli petugas pelayanan publik semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menerima layanan informasi dan pengaduan, sertifikasi, dan pengujian Obat dan Makanan.
- Fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti ruang pelayanan, fasilitas untuk difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, Unit





- Kesehatan Sekantor (UKS), Wi-Fi, kantin kejujuran, *charging station*, Comic TV, area parkir dan fasilitas penunjang, dan lain-lain.
- d) Pemutakhiran informasi Obat dan Makanan melalui media sosial secara rutin dan intensif.
  - e) Berbagai inovasi Balai Besar POM di Pontianak dalam memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat.
  - f) Alur pelayanan yang jelas dengan *timeline* yang pasti.
  - g) Tarif pelayanan publik yang transparan dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 Tentang Jenis dan Tarif Negara Bukan Pajak .

## 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik yang dilaksanakan berada di Tim Kerja Informasi dan Komunikasi, Tim Kerja Pengujian, Tim Kerja Sertifikasi, dan Bagian Tata Usaha. Layanan publik dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Publik sebanyak 22 orang. Pembagian tugas dalam tim tersebut antara lain: penerima sampel, penguji sampel, petugas pelayanan informasi dan pengaduan, serta petugas layanan sertifikasi. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Substansi Informasi dan Komunikasi sebesar 75% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 25%. Adanya gap pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di substansi Informasi dan Komunikasi. Untuk substansi Tata Usaha gap kompetensi sudah terpenuhi dan untuk substansi pemeriksaan rata-rata pemenuhan kompetensi sebesar 60% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 40% dikarenakan beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang yang harus dipenuhi di





substansi pemeriksaan. Untuk substansi pengujian rata-rata pemenuhan kompetensi sebesar 80,57 % sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 19,43%

Anggaran pelayanan publik dikelola oleh masing-masing tim kerja terkait secara proporsional. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,1 termasuk dalam kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh petugas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.

#### 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Pontianak antara lain :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melibatkan empat unsur yaitu: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur media massa melalui Forum Konsultasi Publik.
2. Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk memenuhi ekspektasi masyarakat.
3. Meningkatkan kompetensi komunikasi dan *problem solving* petugas pelayanan publik.
4. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan kelompok rentan.
5. Melaksanakan pelayanan di luar jam kerja termasuk hari libur pengujian sampel pihak ketiga pada inovasi KAPUAS 24 dan pelayanan informasi / pengaduan melalui *whatsapp business* SIMPATIK dan media sosial.





## 8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Tabel 3.1. 85Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase Indeks Pelayanan Publik

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks Pelayanan Publik	Perlu terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Sudah dilakukan pemutakhiran informasi subsite Balai Besar POM di Pontianak secara berkala	Melengkapi sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan berupa Guiding Block serta alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille)	TW 4 Tahun 2024

## 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Dengan adanya rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Pelayanan Publik, misalnya menambah fasilitas kelompok rentan, terutama tuna netra untuk mempermudah akses pelayanan publik.
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan Indeks Pelayanan Publik di tahun 2023 termasuk kriteria "Sangat Baik". Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang





menunjang keberhasilan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.

**SK.4.IKSK.7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik**

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT.

Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu :

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil.
- UMKM pada obat tradisional mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap.





- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  1. Persetujuan denah.
  2. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB).
  3. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik.

Pendampingan terhadap UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan pendampingan UMKM sebagai berikut :

Jenis Komoditi UMKM	Tahapan Pendampingan
Pangan Olahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seleksi UMKM</li><li>2. Bimtek CPPOB</li><li>3. Fasilitasi Pendampingan</li><li>4. PSB/Sertifikasi CPPOB</li><li>5. Pelaporan ke Badan POM</li></ol>
Obat Tradisional	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan target UMKM obat tradisional</li><li>2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional</li><li>3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)</li><li>4. Sertifikasi</li><li>5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li></ol>
Kosmetik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi</li><li>2. Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)</li><li>3. Pelaksanaan Pendampingan</li><li>4. Pelaporan kepada Direktur, Deputi 2, Ka Rorenkeu</li></ol>

Pada akhir tahun berjalan, indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$





Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar =  $(A + B + C) / 3$

### 1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 86 Perbandingan target dan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55,00	81,48	148,15	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik pada tahun 2023 sebesar 81,48%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 55,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 148,15% sehingga termasuk dalam kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 87 Perbandingan target dan realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya


Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2020				
	2021				
	2022	50,00	80,95	161,90	Tidak Dapat Disimpulkan
	2023	55,00	81,48	148,15	Tidak Dapat Disimpulkan



Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik pada tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 13,75%. Capaian dalam indikator kinerja ini berada dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 88 Perbandingan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan target tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	60,00	81,48	135,80%	 Tercapai / Melampaui

Realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 mencapai 81,48%. Realisasi ini melampaui target tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 55,00%. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024, persentase realisasi tahun 2023 telah mencapai 135,80%.



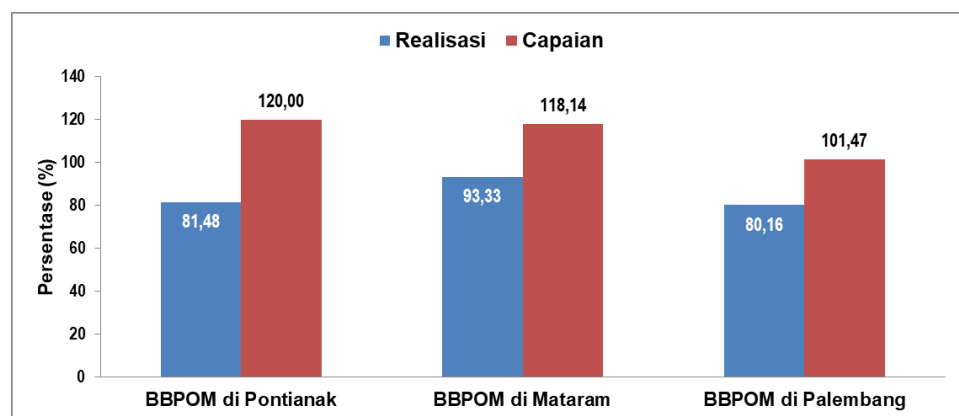


#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 89 Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Realisasi	81,48	93,33	80,16
	Capaian	120,00	118,14	101,47

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian tertinggi di antara UPT lain pada Kluster 5 Klasifikasi UPT Pembanding yaitu sebesar 120,00%. Urutan capaian berikutnya yaitu Balai Besar POM di Mataram dan Balai Besar POM di Palembang.



Grafik 3.1. 15 Perbandingan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding





## 5. nalisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Terlampauinya capaian kinerja tahun 2023 dari target Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik disebabkan karena :

- a. Pendampingan dan bimbingan dari Balai Besar POM di Pontianak kepada pelaku usaha UMKM dalam rangka sertifikasi sarana produksi yang dilakukan secara intensif melalui inovasi Agi Jakk (Aksi Dampingi dan Jangkau UMKM Kalbar) tanpa dipungut biaya.
- b. Tingginya komitmen pelaku usaha UMKM obat tradisional dan kosmetik dalam memenuhi persyaratan cara produksi yang baik.
- c. Petugas yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM.
- d. Adanya kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan pemenuhan persyaratan cara produksi yang baik.
- e. Indikator ini merupakan indikator kinerja yang relatif baru sehingga pada saat penetapan target kinerja, belum terdapat *baseline* data dan metode perhitungan capaian kinerja.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik berada di Tim Kerja Sertifikasi. Berdasarkan Analisis Beban Kerja, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk merealisasikan target kinerja ini adalah 2 orang PFM Ahli sedangkan sumber daya manusia yang ada sebanyak 5 orang PFM yang terdiri dari 1 orang PFM Ahli Madya, 2 orang PFM Ahli Muda dan 2 orang PFM Ahli Pertama.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,5 yang termasuk kategori **Efisien**. Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten,





pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

## 7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program/kegiatan yang terkait dengan capaian kinerja persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik di Balai Besar POM di Pontianak yaitu :

- a. Melaksanakan bimbingan teknis yang intensif kepada pelaku usaha dan *stakeholder* baik secara langsung maupun melalui *platform* media sosial sehingga meningkatkan pemahaman terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.
- b. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pendampingan langsung yang intensif antara petugas Balai Besar POM di Pontianak dengan para pelaku usaha dan petugas Pusat (evaluator) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi selama proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.





## 8. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.1. 90 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya  
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan	Meningkatkan pemahaman UMKM terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara	Pada tahun 2023 telah dilakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuha		

## 9. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2022, diketahui bahwa persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik memiliki peran penting, sehingga pada tahun 2023 dengan dilakukannya bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan *coaching clinic* yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha disertai inovasi yang ada, membuat pelaku usaha memiliki tingkat pemahaman yang baik sehingga dapat menerapkannya dalam kegiatan produksi secara berkelanjutan.





**SASARAN STRATEGIS 5**  
**Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan**

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **100,17%** dengan Predikat **Sangat Baik**

**SK.5.IKSK.1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tabel 3.1. 91 Kategori Penilaian Indeks Efektivitas KIE

No	Kategori	Interval Indeks
1	Kurang Efektif	$\leq 65,00$
2	Cukup Efektif	65,01 - 75,00
3	Efektif	75,01 - 85,00
4	Sangat Efektif	85,01 - 95,00
5	Sangat Efektif Sekali	95,01 - 100,00





## 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 92 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80	94,42	100,66	Sangat Baik

Nilai Indeks Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Tahun 2023 sebesar 94,42 dengan kategori Sangat Efektif. Realisasi Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak sebesar 94,42 diatas target 93,80 dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,66 %. Capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 93 Perbandingan Pencapaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	86,66	88,85	102,53	Sangat Baik
	2021	90,1	88,58	98,31	Cukup
	2022	91,90	92,27	100,40	Sangat Baik
	2023	93,80	94,42	100,66	Sangat Baik

Nilai Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 sebesar 94,42 terhadap target 93,80 dengan capaian 100,66%. Jika






dibandingkan dengan Nilai Indeks Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 sebesar 92,27 terhadap target 91,80 dengan capaian 100,40%. Capaian indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 94 Perbandingan Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,60	94,42	98,76	 <b>Akan Tercapai</b>

Realisasi indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 mencapai 94,42. Target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 sebesar 95,60. Perbandingan persentase realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 98,76 % dari target akhir tahun Renstra 2020-2024 dengan kriteria **Akan Tercapai**.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Balai lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 95 Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

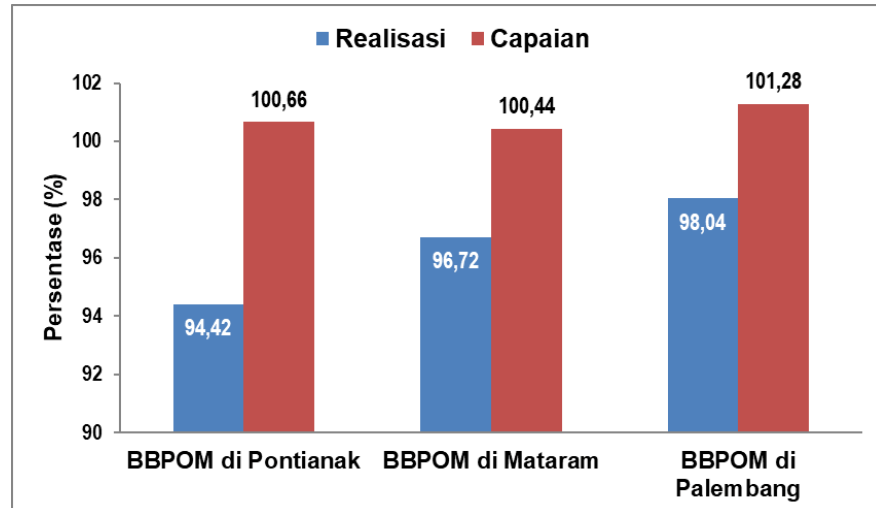
Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Realisasi	94,42	96,72	98,04
	Capaian	100,66	100,44	101,28

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan ketiga balai diatas adalah





**sangat baik** dimana Balai Besar POM di Pontianak menduduki urutan pertama disusul oleh BBPOM di Mataram dan BBPOM di Palembang.



Grafik 3.1. 16Perbandingan Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pemanding

#### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja

Penunjang keberhasilan pencapaian target indikator kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

1. Komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan KIE Obat dan Makanan.
2. Ragam alternatif media informasi memudahkan masyarakat memperoleh informasi yang cepat dan memadai.
3. Jenis kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang beragam menjangkau berbagai komunitas (masyarakat, pelajar/mahasiswa, pelaku usaha, asosiasi dan lintas sektor lainnya)
4. Konten informasi terkini, menarik, dan mudah dipahami masyarakat.
5. Tingkat pemahaman, manfaat dan minat masyarakat yang baik terhadap informasi Obat dan Makanan.





## 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak adalah

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang melibatkan tokoh masyarakat seperti Anggota Komisi IX DPR RI dilaksanakan merata sampai ke wilayah pelosok. Gambaran umum Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam beberapa kegiatan KIE tokoh masyarakat, partisipasi laki laki dan perempuan cukup seimbang dengan proporsi 51:49. Kesenjangan partisipasi dalam kegiatan di beberapa kabupaten/kota diidentifikasi dalam beberapa faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain belum ada kebijakan khusus untuk mencapai proporsi yang lebihimbang antara perempuan dan laki-laki. Panitia pelaksana perlu menambah pemahaman bagaimana menerapkan PUG dalam kegiatan dan materi yang disampaikan belum memasukkan mengenai PUG. Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari tiga aspek yaitu akses, kontrol dan manfaat. Dari aspek akses terdapat kesenjangan peserta pria dan wanita yang hadir pada kegiatan KIE antara lain jarak tempuh menuju lokasi jauh, sarana dan alat transportasi yang terbatas, kurangnya informasi terkait Obat dan Makanan dan media elektronik penunjang KIE seperti sinyal dan proyektor yang masih belum memadai di daerah. Dari aspek kontrol, masih banyaknya wanita yang merasa lebih baik dirumah mengurus anak daripada keluar untuk mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan. Adapun aspek manfaat yang diperoleh dengan mengikuti KIE, masyarakat akan mengerti terkait Obat dan Makanan sehingga terlindungi dari bahaya yang ditimbulkan karena konsumsi dan penggunaan yang salah. Jika kesempatan ini tidak digunakan maka manfaat bagi masyarakat (terkhusus wanita) untuk memperoleh pengetahuan menjadi rendah.
- Program Pemberdayaan Masyarakat mengenai Keamanan Pangan di sekolah, desa, dan pasar.





- Melaksanakan sosialisasi secara *daring dan luring* bersama berbagai kelompok masyarakat.
- Melaksanakan sosialisasi dalam inovasi AKsi SEhari peLayanan publik dan Edukasi masyaRAkat Secara efektif (AKSELERASI) di wilayah pelosok dan lokasi aktivitas keramaian masyarakat.
- Melaksanakan pemberitaan melalui beberapa media cetak (koran dan leaflet), *videotron*, radio dan televisi.
- Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial antara lain *Twitter, Facebook, Instagram, Youtube dan WhatsApp*, melalui *subsiste* Balai Besar POM di Pontianak ([www.pontianak.pom.go.id](http://www.pontianak.pom.go.id)) secara rutin dan intensif
- Meningkatkan kolaborasi pentaheliks dengan stakeholder termasuk media massa untuk bersinergi mendukung penyampaian KIE Obat dan Makanan.

## 7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan berada di Tim Kerja Informasi dan Komunikasi. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Substansi Informasi dan Komunikasi sebesar 75% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 25%. Adanya gap pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di substansi Informasi dan Komunikasi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) dalam indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak sebesar 1,00 termasuk dalam kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, realisasi anggaran sesuai perencanaan dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta didukung oleh petugas yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.





### 8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1. 96 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Meningkatkan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.	Telah melakukan pengelolaan media sosial BBPOM di Pontianak dengan baik serta memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk media KIE termasuk mengenali karakter dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.		





## 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di tahun 2023 termasuk kriteria “Sangat Baik”. Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.

### SK.5.IKSK.2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

#### 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 97 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	84,00	84,00	100,00	<b>Baik</b>

Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun 2023 sebanyak 84 sekolah. Jumlah ini sesuai dengan target 84 sekolah. Persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.





## 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya


Tabel 3.1.98 Perbandingan Pencapaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2023 dan Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS)	2020	16	16	100	Baik
	2021	40	40	100	Baik
	2022	62	62	100	Baik
	2023	84	84	100	Baik

Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 mencapai 84 dengan capaian 100%. Realisasi indikator Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 mencapai 62 dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak masih termasuk dalam kriteria **Baik**.

## 3) Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra.

Tabel 3.1. 99 Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	106	84	79.24	 Akan Tercapai





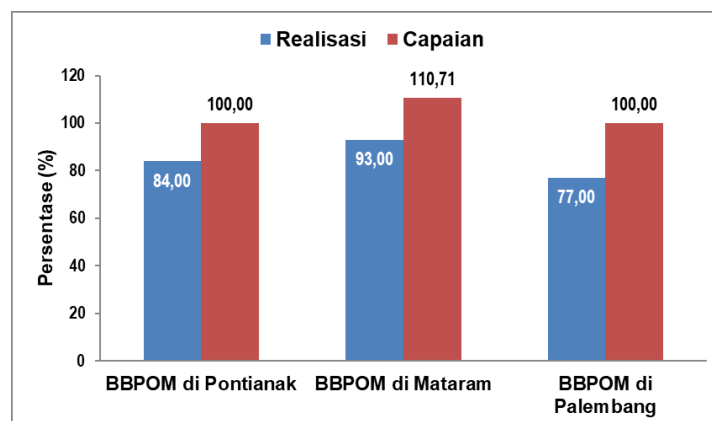
Realisasi indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 mencapai 84, sama dengan target Tahun 2023. Capaian yang dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 79,24 % dengan kriteria **Akan Tercapai**.

#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 100 Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	Realisasi	84	93	77
	Capaian	100	110,71	100

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** ini sama dengan BBPOM di Mataram dan BBPOM di Palembang.



Grafik 3.1. 17 Perbandingan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding





## 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Kementerian Agama, dan Pihak Sekolah).
- Komitmen yang tinggi dari pihak sekolah terutama kader sekolah dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Antusias komunitas sekolah (siswa, guru, dan orang tua) dalam mengikuti kegiatan program Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS).

## 6) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan terhadap guru dan pengelola kantin dari 84 (delapan puluh empat) sekolah SD/MI dan SMP/MTS yang sudah ditetapkan dalam program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).
- Melaksanakan sosialisasi Keamanan Pangan yang diikuti oleh siswa, guru, dan pengelola kantin dari 84 sekolah
- Melaksanakan pembagian paket edukasi kepada 84 sekolah, terdiri dari 23 sekolah intervensi tahun 2023, 21 sekolah intervensi tahun 2022, 24 sekolah intervensi tahun 2021 dan 16 sekolah intervensi tahun 2020.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program rencana aksi sekolah sebagai komitmen dari pihak sekolah terutama kader dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak





Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## 7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung pencapaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang dilaksanakan berada di Tim Kerja Informasi dan Komunikasi. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Substansi Informasi dan Komunikasi sebesar 75% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 25%. Adanya gap pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di substansi Informasi dan Komunikasi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebesar 1,00 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.





## 8) Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Periode Sebelumnya

Tabel 3.1. 101Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Melaksanakan semua tahap kegiatan program Sekolah dengan PJAS Aman dan memilih 1 (satu) sekolah untuk dimajukan dalam lomba Sekolah dengan PJAS Aman tingkat Nasional Tahun 2023	Telah melaksanakan semua tahap kegiatan program Sekolah dengan PJAS Aman dan memilih SDN 01 Sukadana untuk diajukan dalam lomba Sekolah dengan PJAS Aman tingkat Nasional Tahun 2023		

## 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Dengan adanya rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, misalnya terlaksananya semua tahap kegiatan program Sekolah dengan PJAS Aman dan memilih SDN 01 Sukadana untuk diajukan dalam lomba Sekolah dengan PJAS Aman tingkat Nasional Tahun 2023 .
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan pencapaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di tahun 2023 termasuk kriteria "Baik". Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan pencapaian pada tahun berikutnya.





SK.5.IKSK.3. Jumlah Desa Pangan Aman

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 102 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	25	25	100,00	Baik

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 sebanyak 25 desa. Jumlah ini sesuai dengan target 25 desa dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 103 Perbandingan Pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	2020	4	4	100	Baik
	2021	12	12	100	Baik
	2022	19	19	100	Baik
	2023	25	25	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 mencapai 25 dengan capaian 100%. Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak



tahun 2022 mencapai 19 dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Tercapai / Melampaui**.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.1. 104 Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	32	25	78,12	 <b>Akan Tercapai</b>

Realisasi indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 mencapai 25 desa. Capaian Tahun 2023 sebesar 78,12 % dari target 32 desa di akhir tahun Renstra 2020-2024 dengan kriteria **Akan Tercapai**.

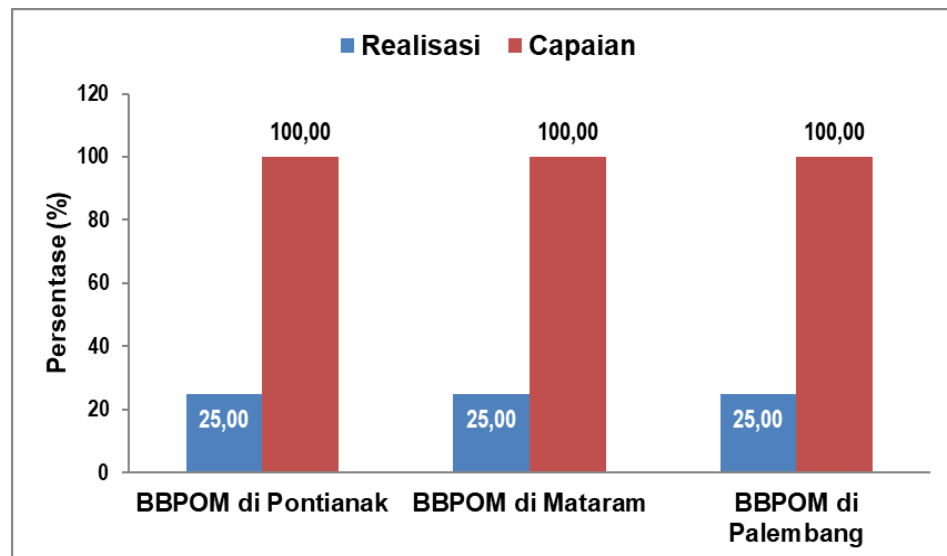
### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 105 Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Jumlah Desa pangan aman	Realisasi	25	25	25
	Capaian	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan balai pembanding lainnya.





Grafik 3.1. 18 Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

### 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan) terhadap program Desa Pangan Aman.
- Komitmen dan partisipasi aktif dari pihak desa terutama Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa dalam melaksanakan kegiatan kemandirian keamanan pangan di wilayah desa masing masing.
- Adanya inovasi yang dilakukan oleh desa terkait keamanan pangan yang dilakukan secara mandiri.

### 6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan Jumlah Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:





- Pelaksanaan program keamanan pangan di desa yang melibatkan semua aspek baik dari keaktifan tim Keamanan Pangan Desa, Kader Keamanan Pangan Desa, peran serta masyarakat dan pelaku usaha pangan yang ada di desa.
- Bimbingan Teknis Kader Keamanan Desa dan Bimbingan Teknis Komunitas Desa terhadap 25 (dua puluh lima) desa yang masuk dalam target intervensi program Desa Pangan Aman. Dengan adanya Bimtek Kader Keamanan Pangan dan Bimtek Komunitas Desa membuat desa yang diintervensi menjadi desa pangan aman yang mandiri.
- Program Pemberdayaan yang diinisiasi oleh masyarakat desa seperti Kerjasama dengan Yayasan ASRI, SDIT Permata Kayong, dan BUMDes.
- Pembuatan Dokumen Rencana Aksi Keamanan Pangan Desa sebagai bentuk keberlanjutan/ kemandirian Program Keamanan Pangan di Desa.
- Pemanfaatan APBDes dalam melaksanakan program Keamanan Pangan mandiri di desa.
- Sinkronisasi program Keamanan Pangan dengan program di desa, antara lain program Percepatan Penurunan *Stunting*, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), program Bangga Kencana, Posyandu Balita, remaja dan lansia serta PKK.
- Pemberian paket edukasi keamanan pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada Tim Keamanan Pangan Desa untuk melakukan sosialisasi dan pengujian pangan secara mandiri.

## 7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman yang dilaksanakan berada di Tim Kerja Informasi dan Komunikasi. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Substansi Informasi dan Komunikasi sebesar 75% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 25%. Adanya gap





pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di substansi Informasi dan Komunikasi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 1,00 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.

### 8. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel 3.1.106 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Jumlah Desa Pangan Aman	Melaksanakan semua tahap kegiatan Desa Pangan Aman dan memilih 1 (satu) desa untuk dimajukan dalam lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2023	Telah melaksanakan semua tahap kegiatan program Desa Pangan Aman dan memilih Desa Pangkalan Buton Kab Kayong Utara untuk dimajukan dalam lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2023.		





## 9. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Dengan adanya rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman, misalnya terlaksananya semua tahap kegiatan program Desa Pangan Aman dan memilih Desa Pangkalan Buton Kab Kayong Utara untuk dimajukan dalam lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2023.
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan pencapaian Jumlah Desa Pangan Aman di tahun 2023 termasuk kriteria “Baik”. Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan pencapaian pada tahun berikutnya.

### SK.5.IKSK.4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

#### 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 107 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	10	100,00	Baik

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak mencapai target, dengan nilai persentase capaian terhadap target sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.





## 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 108 Perbandingan Pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 dan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	2020	2	2	100	Baik
	2021	4	4	100	Baik
	2022	7	7	100	Baik
	2023	10	10	100	Baik

Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 sebanyak 10 pasar dengan capaian 100%. Realisasi indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 sebanyak 7 pasar dengan capaian 100%. Capaian indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.

## 3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Tabel 3.1. 109 Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13	10	76,92	 Akan Tercapai





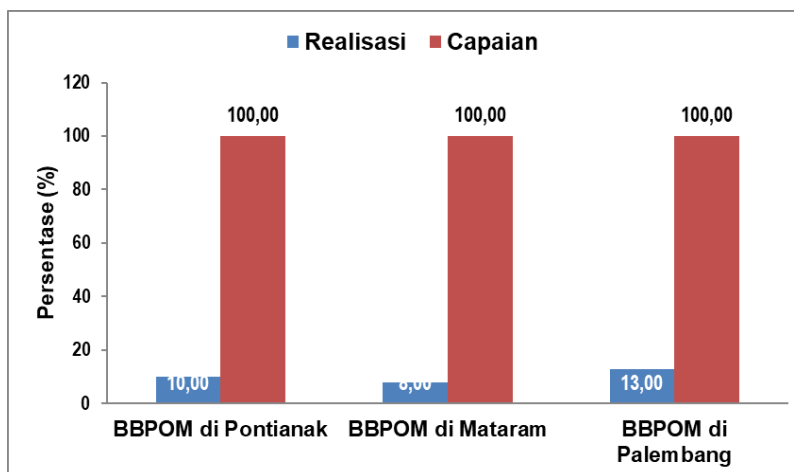
Pada tahun 2023, realisasi indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan target sebanyak 10 pasar. Capaian tahun 2023 sebesar 76,92 % dari target 13 pasar di akhir tahun Renstra 2020-2024 dengan kriteria **Akan Tercapai**.

#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Balai lain sebagai Pembanding

Tabel 3.1. 110 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	Realisasi	10	8	13
	Capaian	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak bernilai kriteria **Baik** sama dengan balai pembanding lainnya.



Grafik 3.1. 19 Perbandingan Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding





### 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Penunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan seluruh lintas sektor di Kabupaten (Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Komunitas Pasar) dalam melaksanakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayahnya.
- Komitmen yang tinggi dari komunitas pasar terutama petugas pengawas pasar melaksanakan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Kesadaran komunitas pasar dalam menerapkan Keamanan Pangan di pasar.

### 6) Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Balai Besar POM di Pontianak adalah sebagai berikut:

- Bimbingan Teknis Petugas pengawas pasar dan fasilitator pasar terhadap 10 (sepuluh) pasar yang masuk dalam target intervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
- Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 10 (sepuluh) pasar berupa edukasi dan pembagian produk informasi kepada komunitas pasar.
- Koordinasi aktif dengan Dinas Perdagangan setempat untuk menindaklanjuti temuan pengawasan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- Penyuluhan kepada komunitas pasar terhadap 10 (sepuluh) pasar yang masuk dalam target intervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas





- Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berupa sampling dan pengujian pangan dan bahan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya, baik uji kimia maupun uji mikrobiologi.
- Pemberian produk informasi Keamanan Pangan dan paket *rapid test* kit bahan berbahaya kepada petugas pengelola pasar untuk melakukan pengujian pangan secara mandiri.

## 7) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang dilaksanakan berada di Tim Kerja Informasi dan Komunikasi. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Substansi Informasi dan Komunikasi sebesar 75% sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 25%. Adanya gap pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di substansi Informasi dan Komunikasi.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebesar 1,00, yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh petugas yang kompeten, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, komitmen petugas yang tinggi, realisasi anggaran yang transparan dan akuntabel.





## 8) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tabel 3.1.111 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Persentase Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

No	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	Melaksanakan semua tahap kegiatan Pasar Pangan Aman dan memilih 1 (satu) pasar untuk dimajukan dalam lomba Pasar Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2023	Telah melaksanakan semua tahap kegiatan Pasar Pangan Aman dan memilih Pasar Kemuning Kota Pontianak untuk dimajukan dalam lomba Pasar Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2023.		

## 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

1. Dengan adanya rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, misalnya terlaksananya semua tahap kegiatan Pasar Pangan Aman dan memilih Pasar Kemuning Kota Pontianak untuk dimajukan dalam lomba Pasar Pangan Aman tingkat nasional Tahun 2023.
2. Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Indikator keberhasilan pencapaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di tahun 2023 termasuk kriteria "Baik". Capaian ini dapat memotivasi unit kerja untuk mempertahankan strategi yang menunjang keberhasilan pencapaian pada tahun berikutnya.





**SASARAN STRATEGIS 6**  
**Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan**  
**Pengujian Obat dan Makanan**



Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS **120%** dengan Predikat **Sangat Baik**

Indikator Kinerja ini ditunjukkan oleh 2 indikator yaitu : Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, serta Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Persentase Sampel Obat dan Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah persentase sampel obat dan makanan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian dalam waktu yang sesuai dengan timeline terhadap jumlah sampel keseluruhan. Obat yang dimaksud adalah mencakup Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampel Obat dan Makanan merupakan sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan pengecekan nomor Ijin Edar, tanggal kadaluwarsa kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis yang telah disusun per komoditi sesuai yang diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

**SK.6.IKSK.1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase jumlah obat yang diuji sesuai standar yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:





$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = (A+B) / 2$$

keterangan:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

Hal ini menggambarkan bahwa capaian indikator ini merupakan gabungan dari *output* bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian yang sesuai standar maksudnya adalah pengujian yang dilakukan sesuai standar pedoman sampling dan juga timeline yang telah ditetapkan di pedoman/SOP. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

### 1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Tabel 3.1. 112Perbandingan Target dan Realisasi Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	100	100	Baik

Target capaian untuk Indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 yaitu 100%. Adapun realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 adalah 100%. Capaian untuk Indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yaitu 100% dengan kriteria **Baik**.





## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun sebelumnya


Tabel 3.1. 113 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	2020	90,00	93,55	103,94	Sangat Baik
	2021	100,00	100	100	Baik
	2022	100	99.97	99.97	Cukup
	2023	100	100	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2023 sebesar 100%, naik 0,03% dari capaian tahun 2022, dan termasuk dalam kriteria **Baik**.

## 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Tabel 3.1. 114 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 adalah 100%. Capaian tahun 2023 telah mencapai target tahun 2024 yang akan terus dilakukan monitoring secara rutin.

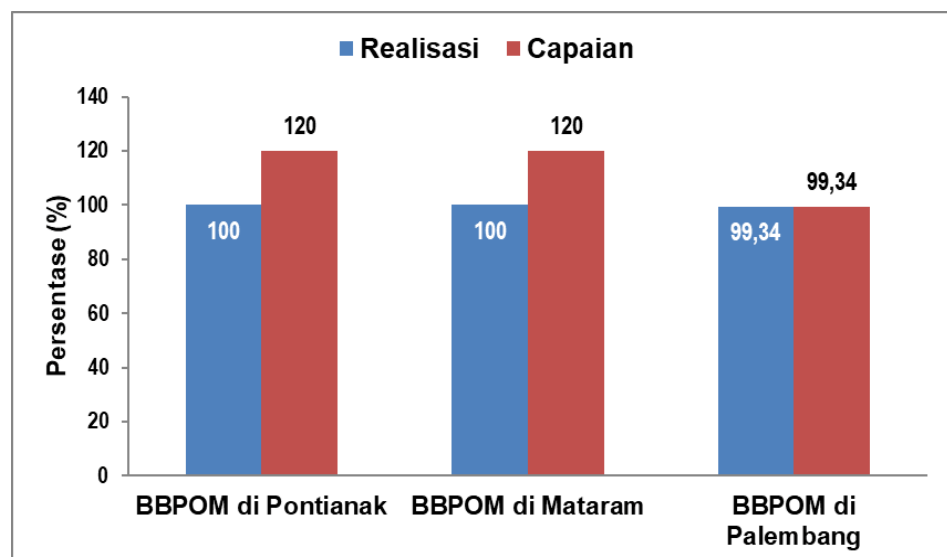




#### 4) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembanding

Tabel 3.1. 115 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standart	Realisasi	100	100	99,34
	Capaian	120	120	99,34



Grafik 3.1. 20 Perbandingan Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh dari capaian Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Mataram dengan kriteria **Sangat Baik**, sedangkan nilai terendah diperoleh dari Balai Besar POM di Palembang dengan kriteria **Cukup**.





### 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan gabungan output dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan. Realisasi pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didukung antara lain :

- Pemanfaatan aplikasi *sharing* folder dalam rangka pemeriksaan penandaan sampel.
- Pelaksanaan pengujian sampel Obat dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- Koordinasi internal laboratorium untuk penggunaan alat AAS, GC, dan GCMS secara bergantian sehingga sampel dapat diselesaikan tepat waktu.
- Pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman sampling dan pengujian Obat.

### 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar terdiri dari tim kerja inspeksi dan pengujian dengan pemetaan kompetensi sebagai berikut:

Tabel 3.1. 116 SDM yang mendukung Kinerja Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Tim Kerja	Pemenuhan Kompetensi	Gap
Pemeriksaan	60,00%	40,00%
Pengujian	80,57%	19,43%
Rata-rata	70,29%	29,71%





Berdasarkan tabel di atas, gap pemenuhan kompetensi SDM untuk melaksanakan proses indikator kinerja ini sebesar 29,71% namun dapat memenuhi target dengan capaian sebesar 120% yang termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Dalam hal efisiensi indikator kinerja ini dapat dikatakan efisien dalam penggunaan SDM namun tetap perlu diupayakan peningkatan kompetensi SDM untuk menurunkan gap sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan dengan waktu yang efisien.

Tabel 3.1. 117 Analisis Tingkat Efisiensi Indikator Kinerja Persenta se Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Capaian Anggaran	IE	TE
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	Persenta se Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	120%	99,97%	1	0

Dalam hal penggunaan anggaran, indeks efisiensi untuk indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar yaitu sebesar 1 termasuk ke dalam kategori **Efisien**. Tingkat efisiensi indikator kinerja adalah sebesar 0 artinya tingkat pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan proses indikator kinerja ini sedikit namun dapat meraih capaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** sehingga dapat dikatakan efisien dalam penggunaan anggaran.





## 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- Melaksanakan monitoring sampling secara intensif sesuai dengan Rencana Pelaksanaan sampling dan pengujian, sehingga proses pengujian dapat dilakukan secara optimal.
- Memastikan ketersediaan reagen, media mikrobiologi, dan suku cadang alat laboratorium sesuai kebutuhan
- Melakukan perawatan alat laboratorium secara rutin serta melakukan peremajaan alat laboratorium
- Meningkatkan kompetensi personil pemeriksaan dan pengujian secara terprogram melalui pelatihan, magang, dan tugas belajar
- Melakukan koordinasi internal terkait perencanaan sampling dan pengujian.

## 8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya tidak terdapat rekomendasi yang akan di tindaklanjuti sepanjang tahun 2023.

## 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

- Sebagai dasar bagi petugas dalam penyusunan jadwal dan jumlah sampel yang akan diperiksa dan diuji.
- Sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.





**SK.6.IKSK.2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar**

**1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja tahun 2023**

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung dari jumlah persentase jumlah Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah sampel makanan yang disampling dikali 100. Capaian indikator ini merupakan gabungan dari output bidang pengujian dan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap sampel dilakukan oleh bagian pemeriksaan dengan mengecek nomor Izin Edar, tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan dan penandaan/label. Pengujian sampel dilakukan terhadap parameter-parameter kritis wajib sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian. Pemeriksaan dan pengujian sesuai standar maksudnya adalah sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta memenuhi *timeline* berdasarkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Tabel 3.1. 118 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	<b>Baik</b>

Perbandingan realisasi terhadap target tahun 2023, untuk indikator kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak, realisasi (100%) sama dengan target (100,00%) dengan capaian sebesar 100 %. Sehingga capaian indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kriteria **Baik**.





## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel 3.1. 119 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	90,00	86,35	95,94	Cukup
	2021	100,00	100	100	Baik
	2022	100,00	95,30	95,30	Cukup
	2023	100,00	100	100	Baik

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase capaian untuk indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan Diuji Sesuai Standar tahun 2023 sebesar 100%, naik 4,7% dari capaian tahun 2022, dan termasuk dalam kriteria **Baik**.

## 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3.1. 120 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	▲ Tercapai / Melampaui

Realisasi indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 adalah 100%, sama dengan target Renstra tahun 2024 yaitu 100%.

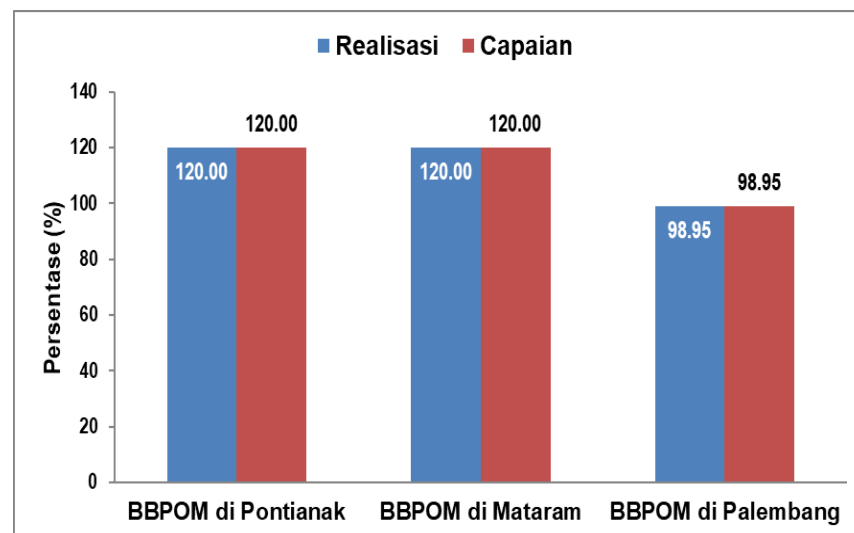




#### 4) Perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja balai lain sebagai pembandingan

Tabel 3.1.121 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembandingan

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BPOM di Mataran	BBPOM di Palembang
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Realisasi	100	100	98,95
	Capaian	120	120	98,95



Grafik 3.1. 21 Perbandingan Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain Sebagai Pembandingan

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Pontianak sama dengan BBPOM di Mataram, dengan realisasi 120%, sementara BBPOM di Palembang berada dibawahnya dengan realisasi dan capaian 98,95%.





#### 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun merupakan sumbangan output dari indikator kinerja pengujian dan pemeriksaan.

Pencapaian target kinerja ini antara lain didukung oleh :

1. Koordinasi internal laboratorium untuk penggunaan alat AAS secara bergantian sehingga sampel dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Tersedianya suku cadang alat laboratorium sesuai kebutuhan sehingga pengujian tetap dapat dilaksanakan tepat waktu.
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawasan dan pengujian.
4. Pengaturan beban kerja yang sesuai dengan kapasitas petugas.

#### 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat berada di Tim Kerja Pemeriksaan dan Tim Kerja Pengujian. Efisiensi penggunaan sumber daya manusia saat ini dinilai berdasarkan pemenuhan kompetensi. Berdasarkan rekapitulasi pemetaan kompetensi, rata-rata pemenuhan kompetensi pada Tim Kerja pemeriksaan sebesar 60%, dan tim kerja pengujian sebesar 80,57%, sehingga masih ada gap pemenuhan kompetensi sebesar 40% pada tim kerja pemeriksaan dan 19,43% pada tim kerja pengujian. Adanya gap pemenuhan kompetensi ini dikarenakan faktor beberapa personel belum mengikuti pelatihan wajib pada jenjang jabatan yang harus dipenuhi di tim kerja baik Pemeriksaan maupun pengujian

Meskipun terdapat gap kompetensi Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja. Dalam hal penggunaan anggaran, nilai efisiensi untuk indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yaitu sebesar 1 dengan kategori **efisien** (Tabel 3.2.2). Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan peningkatan kompetensi, pengelolaan pekerjaan di masing-masing level PFM, penguatan komitmen petugas, realisasi





anggaran sesuai perencanaan, dan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja persentase makanan yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai Besar POM di Pontianak yaitu:

- Melakukan pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen dan media mikro sehingga tersedia tepat waktu untuk pengujian
- Melakukan koordinasi yang intensif terkait pengujian sampel regionalisasi.
- Meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan penguji secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
- Melakukan pemeliharaan alat laboratorium secara berkelanjutan.

### 8) Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pengembangan kompetensi pegawai melalui Pelatihan internal maupun eksternal di bidang Makanan	Pelatihan PK Pb, Cd, Hg, Sn,As dalam tepung Terigu secara ICPMS ( TW II 2023)		





No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
		Melakukan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat	Telah melakukan kalibrasi alat baik secara internal maupun eksternal (TW II 2023)		

### 8) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

- Sebagai dasar bagi petugas dalam penyusunan jadwal dan jumlah sampel yang akan diperiksa dan diuji.
- Sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan peningkatan kompetensi, kalibrasi dan pemeliharaan alat laboratorium.
- Sebagai bahan evaluasi kinerja UPT dan salah satu bahan dalam penetapan arah kebijakan BPOM selanjutnya.

**SASARAN STRATEGIS 7**  
**Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak**

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak **Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan** Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPS 96,22 % dengan Predikat **Cukup**

**SK.7.IKSK.1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.





## 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 3.1. 122 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	93,00	89,48	96,22	Cukup

Realisasi indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 bila dibandingkan dengan target tahun 2023, maka capaiannya sebesar 96,22%. Hal ini menunjukkan capaian indikator ini di tahun 2023 termasuk pada kategori **Cukup**.

## 2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 123 Perbandingan Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	2020	88,00	90,50	102,84	Sangat Baik
	2021	91,00	100	109,89	Sangat Baik
	2022	92,00	95,71	104,03	Sangat Baik
	2023	93,00	89,48	96,22	Cukup


Capaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 termasuk kategori Sangat Baik, namun terjadi penurunan persentase capaian indikator kinerja ini tahun 2023 yaitu berada pada kategori Cukup.





### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Bersangkutan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.

Tabel 3.1. 124 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Tahun 2024 (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	94,00	89,48	95,19	 Akan Tercapai

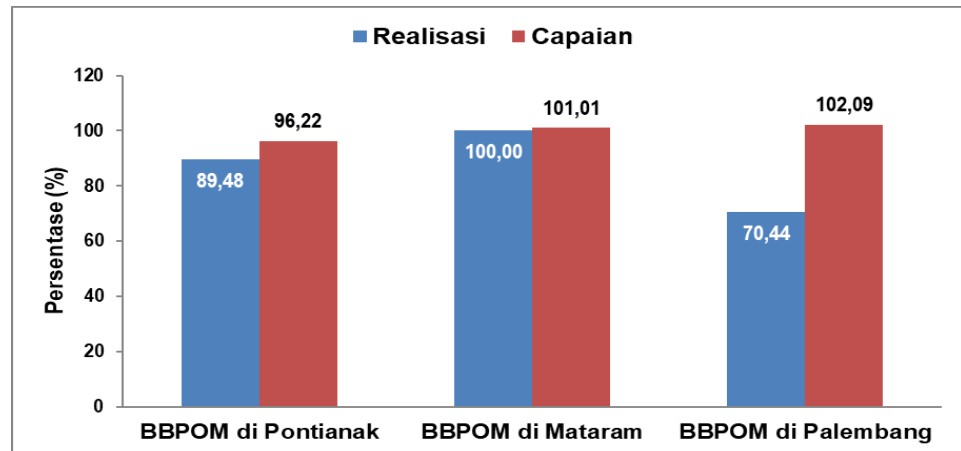
Realisasi indikator kinerja Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2023 mencapai 89,48%. Bila realisasi indikator ini tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2024, maka capaiannya 95,19%, dan termasuk kategori **Akan Tercapai**. Program dan kegiatan tahun 2023 yang mendukung untuk pencapaian target akhir renstra tersebut harus diupayakan, dan untuk selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Balai lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 125 Perbandingan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Di Bidang Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Balai lain Sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Realisasi	89,48	100,00	70,44
	Capaian	96,22	101,01	102,09





Grafik 3.1. 22 Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan BBPOM dengan Balai lain sebagai pembandingan

Capaian indikator kinerja Keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kategori Cukup, sedangkan 2 (dua) Balai Besar POM lain yaitu BBPOM di Mataram dan BBPOM di Palembang termasuk kategori Sangat Baik.

### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 belum mencapai target disebabkan antara lain:

- Pemberlakuan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi, antara lain SPDP *online* di awal tahun 2023 sebelum adanya kebijakan dari Kejaksaan Agung yang mengecualikan untuk perkara yang ditangani PPNS, sehingga terdapat penundaan dimulainya penyidikan perkara di tahun 2023.
- Terdapat perubahan penerapan Undang-Undang dalam penanganan perkara tindak pidana terhadap sediaan farmasi, yaitu dari Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga terdapat perubahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan





HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengubah kewenangan terhadap Undang-Undang yang dapat dikawal oleh PPNS Badan POM pada bulan Oktober 2023. Hal ini menyebabkan terjadinya penyidikan 2 (dua) perkara yang *carry over* di tahun 2023.

- c. Belum adanya kesepahaman penerapan pasal yang dapat disangkakan dalam penyidikan perkara tindak pidana sediaan farmasi tidak memiliki izin edar antara *Criminal Justice System* (penyidik, kepolisian dan kejaksaan) dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang meniadakan pasal dalam ketentuan pidana terhadap pelaku produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat *gap* kompetensi SDM di Tim Penindakan Balai Besar POM di Pontianak antara lain jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Tim Penindakan Balai Besar POM di Pontianak memiliki 3 (tiga) PPNS aktif yang melakukan penyidikan. Dengan target perkara di tahun 2023 sebanyak 7 perkara maka diperlukan 4 (empat) PPNS untuk menanganinya. Selain itu SDM yang tersedia di Tim Penindakan sebanyak 6 (enam) orang PFM, termasuk 3 (tiga) orang PPNS di antaranya, sehingga PPNS selain melakukan penyidikan juga melakukan kegiatan intelijen.

Indeks Efisiensi terhadap penggunaan anggaran untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 yaitu 1. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak termasuk kriteria **Efisien**, karena dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.





## 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

- a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan unsur-unsur *Criminal Justice System* di Kalimantan Barat dalam penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana.
- b) Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* (FGD), inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), koordinasi lintas sektor, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), dan lain-lain.
- c) Meningkatkan kompetensi petugas dalam fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan sesuai kebutuhan.
- d) Memperluas akses informasi untuk mendukung kegiatan intelijen, dengan mengembangkan jejaring informasi dan alat khusus intelijen.

## 8) Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi	FGD Pengawasan Obat dan Makanan Dengan Dukungan Stakeholder Bidang Jasa Pengiriman, Pos dan Logistik 25 September		





		Meningkatkan kompetensi petugas dalam fungsi intelijen dan penyidikan sesuai kebutuhan, misalnya peningkatan kompetensi petugas dalam penguasaan bahasa Hakka/Tio Tjiu)	Pelatihan Bahasa Hakka TW III 2023		
--	--	---	------------------------------------	--	--

#### 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dengan adanya rekomendasi program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, misalnya terlaksananya FGD Pengawasan Obat dan Makanan dengan Dukungan Stakeholder Bidang Jasa Pengiriman, Pos dan Logistik dapat membangun kesamaan pemahaman terkait distribusi Obat dan Makanan yang menggunakan jasa pengiriman Pos dan logistik.

- Laporan kinerja dapat menjadi sarana monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target. Capaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di tahun 2023 termasuk kriteria “Cukup”, sehingga dapat dibuat strategi baru dan perencanaan kegiatannya dalam rangka mencapai target di tahun 2024.
- Laporan kinerja Capaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Terdapat 2 (dua) perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang ditangani BBPOM di Pontianak di tahun 2023 yang *carry over*, sehingga menjadi bahan evaluasi *stakeholder* untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelesaian perkara dengan penyidik BBPOM di Pontianak.





**SASARAN STRATEGIS 8**  
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal



Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan UPT yang optimal di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPSS **94,70%** dengan Predikat **Cukup**

**SK.8.IKSK.1. Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak**

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:



### A. Komponen Pengungkit (60%)

1. Manajemen Perubahan : bobot 8%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 7%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

### B. Komponen Hasil (40%)

1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel (22,50%)
  - Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK): bobot 17,50%
  - Capaian Kinerja lebih baik: bobot 5%
2. Pelayanan Publik yang Prima (17,50%)

## 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 126 Perbandingan Target dengan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	86,90	82,88	95,37	Cukup

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak sebesar 82,88 dari target 86,9 dengan persentase capaian kinerja 95,37% kriteria **Cukup**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 127 Perbandingan Pencapaian Indeks RB BBPOM Pontianak Tahun 2023 dan sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	2020	90	76,74	85,27	Cukup
	2021	84,9	84,87	99,96	Cukup
	2022	85,9	92,27	107,42	Sangat Baik
	2023	86,9	82,88	95,37	Cukup





Dari tabel di atas dapat dilihat Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 12,05% dari 107,42% (tahun 2022) menjadi 95,37. Hal ini dikarenakan realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak mengalami penurunan sebesar 9,39 dari 92,27 pada tahun 2022 menjadi 82,88 pada tahun 2023.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra.

Tabel 3.1. 128 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2022 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	87,90	82,88	94,28

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi untuk indikator Indeks RB tahun 2023 adalah 82,88 atau 94,28% dari target 87,90 pada akhir tahun Renstra 2020-2024.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 129 Perbandingan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pemanding

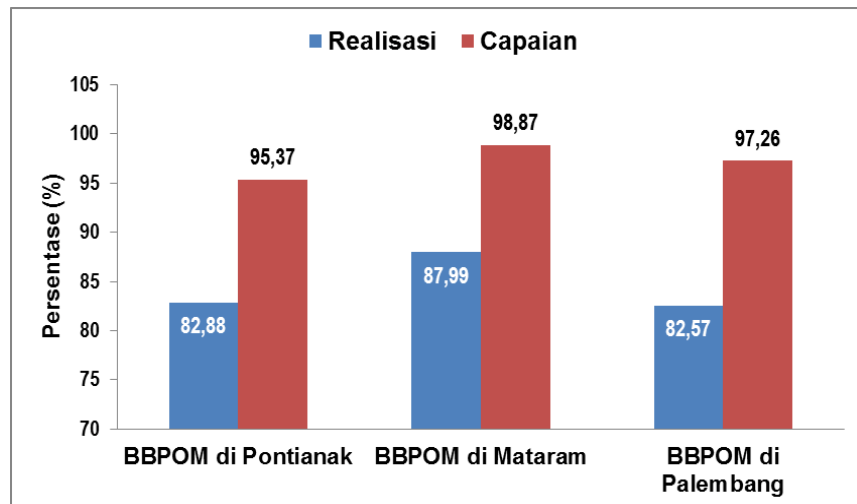
Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Indeks RB	Realisasi	82,88	87,99	82,57
	Capaian	95,37	98,87	97,26

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa seluruh balai belum mencapai target dengan kriteria **Cukup**. Adapun dengan capaian tertinggi





diperoleh Balai Besar POM di Mataram dengan realisasi 87,99 dan capaian 98,87%.



Grafik 3.1. 23 Perbandingan Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai lain sebagai Pembanding

### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan nilai Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI belum dilakukan secara periodik setiap triwulan sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya dapat dipantau kesesuaiannya dengan rencana kerja pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Belum terdapat peta jalan pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi yang ada belum dapat dipantau secara optimal.
3. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, belum sepenuhnya mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.





4. Kegiatan pada area Penguatan Pengawasan seperti Penerapan SPIP, pengaduan masyarakat dan WBS telah diimplementasikan dan dimonitoring sesuai kebijakan organisasi namun belum terdapat analisa dampak atau pengukuran keberhasilan atas inovasi yang dimiliki.
5. Secara umum belum dilakukan analisis dampak manfaat dan kondisi before-after adanya inovasi, serta inovasi yang dibangun belum berdasarkan atas hasil manajemen risiko unit kerja.

#### 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Semua sumber daya telah dioptimalkan untuk mencapai indikator tersebut dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Balai Besar POM di Pontianak.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks RB sebesar 1, yang termasuk kriteria Efisien (Tabel 3.2.2).

#### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator tersebut antara lain:

1. Penggunaan inovasi pelayanan publik AGI JAKK (Aksi dampinGI dan JAngkau UMKM Kalbar) yang telah menjadi bagian dalam alur prosedur pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Mikro,
2. Internalisasi Reformasi Birokrasi secara intensif pada masing-masing kelompok Substansi, antara lain Pojok RB, SETARA,
3. Seluruh program yang dibuat Agent of Change (AoC) telah terintegrasi dalam sistem manajemen sebagai bentuk komitmen dalam perubahan,
4. Telah melakukan reviu atau perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan berbagai stakeholders antara lain akademisi, pelaku usaha, dan lembaga swadaya masyarakat melalui kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) serta telah memanfaatkan masukan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),
5. Terdapat petugas khusus penanganan pengaduan yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Unit Kerja, memiliki media





konsultasi dan pengaduan secara offline dan online serta terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!,

6. Telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian pelayanan antara lain pada layanan Pengujian serta Informasi dan Pengaduan.

### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks RB	Membuat mekanisme pemberian reward dan punishment secara berkala	Mekanisme Reward dan Punishment pegawai dan substansi telah disusun		
		Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai proses bisnis balai dan keterkaitan dengan tupoksi masing-masing pegawai	Sosialisasi SOP yang ada pada balai dan matriks peran hasil		

Telah dilakukan tindak lanjut atas capaian Indeks RB yang belum memenuhi target antara lain pencaangan Balai Besar POM di Pontianak goes to WBBM, sosialisasi dan internalisasi RB ke semua pegawai, membangun aplikasi sesuai kebutuhan pelanggan, penguatan tim RB dan tim AOC, dan pengembangan kompetensi petugas pelayanan publik.

### 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan capaian kinerja indikator Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023, maka akan dilakukan beberapa perbaikan yang akan meningkatkan kinerja Indeks RB di tahun selanjutnya. Adapun beberapa perbaikan tersebut diantaranya menumbuhkan motivasi dan semangat seluruh pegawai dalam meraih predikat WBBM dengan





mengadakan bimtek dan pendampingan dengan narasumber dari Inspektorat Badan POM dan BPKP Kalimantan Barat.

**SK.8.IKSK.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak**

Berdasarkan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

**1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Tabel 3.1. 130 Perbandingan Target dengan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	85,10	80,02	94,03	<b>Cukup</b>

Berdasarkan tabel diatas realisasi untuk indikator Indeks AKIP Balai Besar POM di Pontianak sebesar 80,02 (A) dari target 85,10 dengan persentase capaian kinerja 94,03% kriteria Cukup.





## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya


Tabel 3.1. 131 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP UPT	2020	80	77,57	96,96	Cukup
	2021	80,1	77,72	97,03	Cukup
	2022	82,60	80,09	96,96	Cukup
	2023	85,10	80,02	94,03	Cukup

Dari tabel di atas dapat dilihat Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 mengalami penurunan realisasi sebesar 0,7 dari 80,09 (A) menjadi 80,02 (A).

## 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 132 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2024	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	80,09	83,33	96,11	 Akan Tercapai

Capaian Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 mencapai 96,11% dari target pada akhir tahun Renstra 2020-2024 sebesar 83,33.



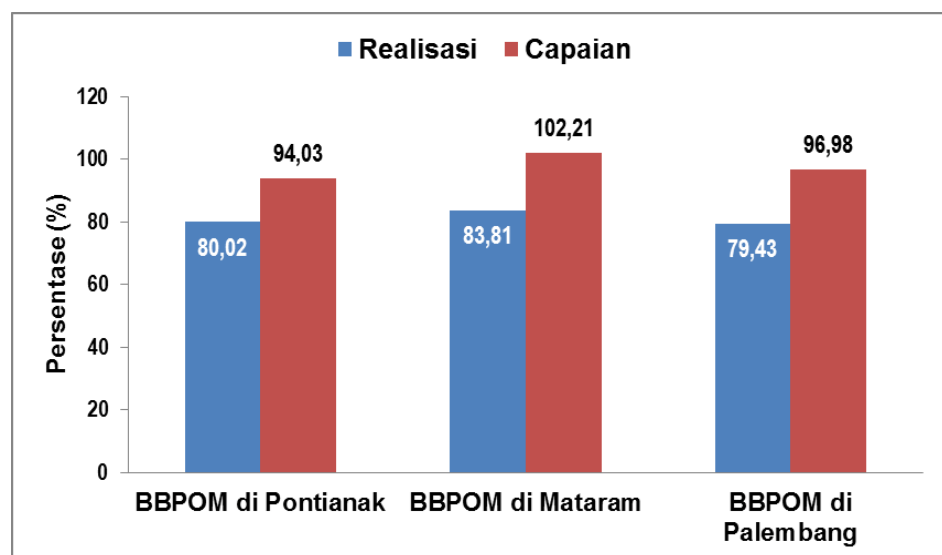


#### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 133 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Nilai AKIP	Realisasi	80,02	83,81	79,43
	Capaian	94,03	102,21	96,98

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi indikator Nilai AKIP BBPOM di Mataram masuk kategori Sangat Baik, sedangkan BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Palembang termasuk ke dalam kategori capaian Cukup. Balai Besar POM di Mataram memiliki capaian tertinggi sebesar 102,21% dan BBPOM di Pontianak memiliki capaian terendah sebesar 94,03%.



Grafik 3.1. 24 Perbandingan Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding





### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari segi nilai, Balai Besar POM di Pontianak sudah mendapat predikat penilaian A namun belum mencapai target tahun 2023. Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target indikator Nilai AKIP antara lain:

- Penilaian capaian kinerja tahun 2022 masih rendah dibanding 2021.
- Penetapan target kinerja belum disertai *baseline* data yang valid.

### 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Semua sumber daya manusia telah diberdayakan untuk mencapai indikator tersebut dalam mendukung pencapaian Nilai AKIP pada Balai Besar POM di Pontianak.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Nilai AKIP sebesar 0,94 yang termasuk kriteria Kurang Efisien (Tabel 3.2.2). Hal ini disebabkan oleh penilaian capaian kinerja berdasarkan capaian tahun sebelumnya masih kurang maksimal.

### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja Nilai AKIP tahun 2024 antara lain:

- 1) Tetap melakukan peningkatan pemahaman setiap pegawai mengenai keterlibatan kinerjanya terhadap capaian kinerja unit.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intens untuk memperkecil kemungkinan adanya indikator-indikator yang mengalami kendala dan tidak dapat mencapai target di akhir tahun.
- 3) Melakukan penyusunan kertas kerja terhadap target yang mengalami perubahan dan melampirkan pada dokumen perencanaan kinerja.





## 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Nilai AKIP	Meningkatkan pemahaman setiap pegawai mengenai keterlibatan kinerjanya terhadap capaian kinerja unit	Telah melakukan sosialisasi terkait peran dari masing-masing pegawai terhadap capaian kinerja unit		

## 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 ini, Balai Besar POM di Pontianak mampu mempertahankan predikat 'A' dalam penilaian implementasi SAKIP ditingkat unit pelaksana teknis BPOM. Namun masih ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya berupa rekomendasi penurunan target yang kemungkinan tidak dapat dicapai pada tahun 2024.

Dari laporan kinerja ini, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat melihat bahwa Balai Besar POM di Pontianak selalu berupaya memberikan data-data dan informasi kinerja secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.





**SASARAN STRATEGIS 9**  
Terwujudnya SDM UPT yang Berkinerja Optimal



Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mewujudkan sumber daya manusia yang berkinerja optimal di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPSS **108,31%** dengan Predikat **Sangat Baik**

**SK.9.IKSK.1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

- a. Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
- b. Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
- c. Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki



kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan

- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.134 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	83,5	90,44	108,31	Sangat Baik

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak adalah sebesar 90,44 dari target 83,5 dengan capaian sebesar 108,31% dan termasuk kriteria **Sangat Baik**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 135 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN tahun Balai Besar POM di Pontianak	2020	75	82,96	110,61	Sangat Baik
	2021	83	84,81	102,18	Sangat Baik
	2022	83,25	84,96	102,05	Sangat Baik
	2023	83,5	90,44	108,31	Sangat Baik






Dari tabel di atas dapat dilihat Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 mengalami kenaikan realisasi sebesar 5,48 dari 84,96 (tahun 2022) menjadi 90,44.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 136 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	83,75	90,44	107,98	 Tercapai /Melampaui

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 adalah 90,44. Capaian tersebut sebesar 107,98% dari target 83,75 pada akhir tahun Renstra 2020-2024.

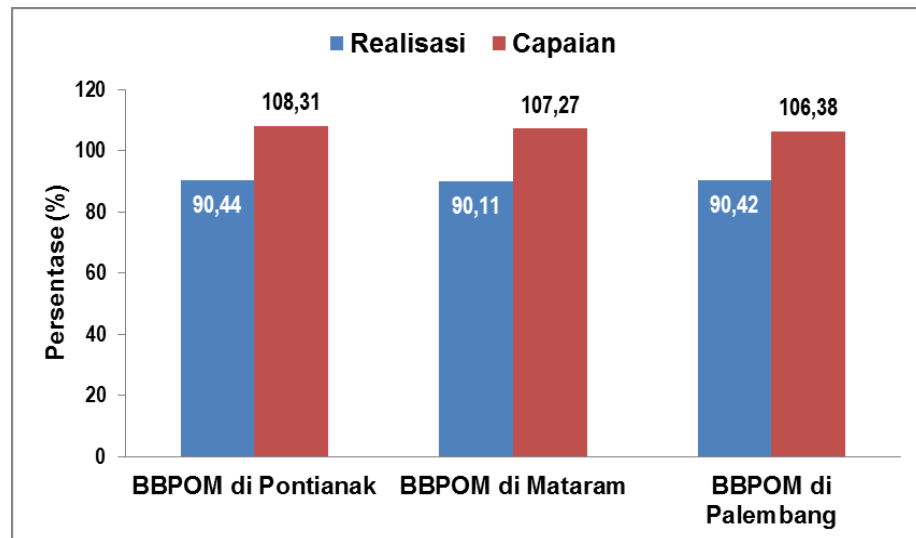
### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 137 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai 104. Perbandingan Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Indeks Profesionalitas ASN	Realisasi	90,44	90,11	90,42
	Capaian	108,31	107,27	106,38

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN di seluruh balai dalam klaster 5 masuk dalam kriteria **Sangat Baik**. Dengan capaian tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Pontianak.





Grafik 3.1. 25 Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemandangan

### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Pontianak didukung antara lain oleh :

- Nilai SKP seluruh pegawai sepanjang tahun 2023 mendapatkan nilai dengan kategori baik sehingga untuk komponen kinerja Balai Besar POM di Pontianak mendapat capaian yang maksimal.
- Konsistensi pengembangan kompetensi semua pegawai yang dipersyaratkan kepada setiap pegawai harus mengikuti minimal 20 JP setahun.
- Rata-rata kualifikasi pendidikan formal pegawai pada Balai Besar POM di Pontianak didominasi lulusan Strata 1 (S-1).
- Tingkat kepatuhan pegawai yang tinggi terhadap peraturan Disiplin Pegawai.

### 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Seluruh SDM Balai Besar POM di Pontianak telah diberdayakan, didorong untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi melalui diklat/workshop/seminar dan sejenisnya. Balai Besar POM di





Pontianak juga berupaya mengendalikan disiplin pegawai dengan pemberian *reward* dan *punishment*.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks Profesionalitas ASN sebesar 1 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh pegawai yang disiplin, kompeten, berintegritas serta realisasi anggaran terkait indeks tersebut selalu dilakukan secara transparan dan akuntabel.

### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN antara lain :

- Melakukan monitoring terhadap pencapaian komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
- Mendorong setiap pegawai agar melaksanakan program Tugas Belajar atau Izin Belajar sebagai bentuk peningkatan kualitas dan sebagai kualifikasi untuk dapat naik ke jabatan yang lebih tinggi.
- Memberikan kesempatan ke semua pegawai untuk memperkaya pengetahuan dan menambah skill dalam bekerja melalui program pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM.
- Menerapkan disiplin kepada seluruh pegawai termasuk penerapan sanksi kepada pegawai yang melanggar.





### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan skill dan kemampuan setiap pegawai dengan mengikuti program pengembangan kompetensi diatas 20 JP dalam setahun	Memberikan kesempatan ke semua pegawai untuk memperkaya pengetahuan dan menambah skill dalam bekerja melalui program pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM		

### 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja ini, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yang disebabkan antusias setiap pegawai untuk mengembangkan kompetensinya sangat tinggi dan juga dukungan dari pimpinan untuk senantiasa mendorong setiap pegawai meningkatkan kompetensinya. Diharapkan dari capaian indikator yang sangat baik dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam segi pelayanan kepada masyarakat.





**SASARAN STRATEGIS 10**  
**Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPSS **120%** dengan Predikat **Sangat Baik**

**SK.10.IKSK.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 302 tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium. Sesuai peraturan ini, terdapat penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional sedangkan Balai Besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. BBPOM di Pontianak merupakan anggota Regional Samarinda.

**1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Berikut adalah perbandingan nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap standar Kemampuan Laboratorium dengan target Balai Besar POM di Pontianak.





Tabel 3.1. 138 Perbandingan Target Internal dan Realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak terhadap Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	86	86,1	100,12	Sangat Baik

Realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 sebesar 86,1%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023, maka capaiannya 100,12% dengan kriteria **Sangat Baik**.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 139 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	2020	84	72,8	86,67	Cukup
	2021	76,00	77,10	101,45	Sangat Baik
	2022	81	85,4	105,43	Sangat Baik
	2023	86	86,1	100,12	Sangat Baik

Capaian tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022. Capaian tahun 2022 sebesar 105,43% dan tahun 2023 sebesar 100,12%. Namun realisasinya **naik** dari 85,4% menjadi 86,1 %. Dari 3 komponen nilai SKL, yang






meliputi persentase pemenuhan SRL **naik** dari 83,7% menjadi 89,6%, persentase pemenuhan standar kompetensi **naik** dari 91,3% menjadi 92,4%, namun persentase pemenuhan standar peralatan **turun** dari 81,2% menjadi 76,2%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Berikut adalah perbandingan capaian persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target renstra tahun 2024.

Tabel 3.1. 140 Perbandingan Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP	87,23	86,1	98,70	 Akan

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP tahun 2023 adalah sebesar 98,70% dari target 87,23% pada akhir tahun Renstra 2024. Diharapkan target tahun 2024 dengan gap sebesar 1,13 % **akan tercapai**.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 141 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain sebagai Pemanding

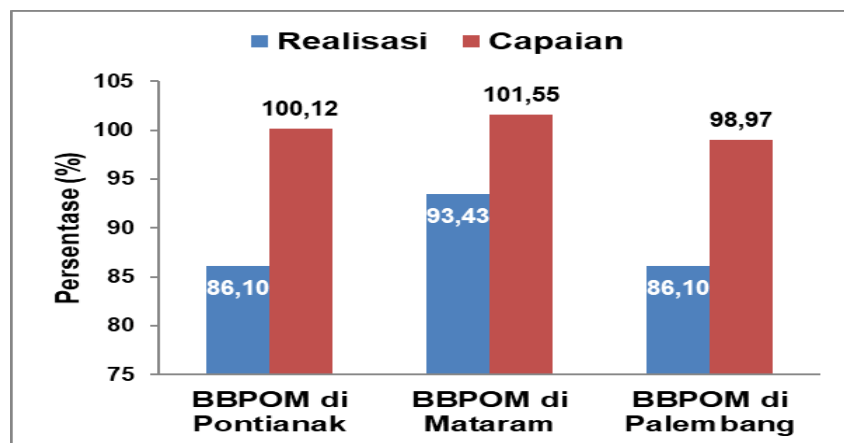
Indikator Kinerja	Persentase (%)	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Persentase Pemenuhan	Realisasi	86,10	93,43	86,10





Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai GLP	Capaian	100,12	101,55	98,97
--	---------	--------	--------	-------

Berdasarkan tabel tersebut diketahui capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium untuk Balai Besar POM di Pontianak adalah 100,12% lebih kecil dari capaian BBPOM di Mataram sebesar 101,55, dan lebih besar dari BBPOM di Palembang sebesar 98,97 %.



Grafik 3.1. 26 Perbandingan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP dengan Balai Lain yang Sejenis

### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pemenuhan target indikator kinerja ini didukung oleh capaian pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Pemenuhan Standar Kompetensi, dan Pemenuhan Standar Peralatan. Pemenuhan standar ketiga komponen tersebut disesuaikan dengan kebijakan regionalisasi laboratorium BPOM yang membagi UPT BPOM di seluruh Indonesia berdasarkan kemampuan pengujian parameter spesifik yang ditentukan oleh ketersediaan instrumen laboratorium tertentu.

- a. Capaian pemenuhan standar ruang lingkup tertinggi terdapat di laboratorium mikrobiologi (94,0 %) dan terendah di laboratorium obat (75,3 %). Aspek penting yang dapat mendukung peningkatan





capaian pemenuhan Standar Ruang Lingkup di BBPOM di Pontianak antara lain

- 1) ketersediaan bahan baku pembanding untuk laboratorium kimia kosmetika dan obat tradisional,
  - 2) ketersediaan sampel dengan zat aktif yang sesuai untuk laboratorium kimia obat, dan mikrobiologi.
- b.** Pemenuhan Standar Kompetensi dipengaruhi oleh hal berikut:
- 1) program pelatihan teknis personil pengujian yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan,
  - 2) proses distribusi pegawai yang sesuai dengan kompetensi.
- c.** Pemenuhan Standar Peralatan dipengaruhi oleh:
- 1) perubahan standar peralatan karena adanya penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM di tahun 2023
  - 2) ketersediaan anggaran yang memadai untuk pembelian alat laboratorium, suku cadang, dan pemeliharaan alat laboratorium,
  - 3) rekomendasi pengadaan alat laboratorium yang disetujui oleh PPOMN berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang,
  - 4) pemeliharaan alat yang meliputi program perawatan alat secara berkala oleh masing-masing operator dan penanggung jawab alat laboratorium sesuai dengan kebutuhan spesifikasi peralatan,
  - 5) pelaksanaan uji antara alat laboratorium secara berkala, sehingga kondisi peralatan dapat dipastikan sesuai spesifikasi,
  - 6) pelaksanaan program kalibrasi internal dan eksternal alat laboratorium yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal.

## 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Jumlah SDM yang terlibat dalam pemenuhan indikator ini adalah 29 orang yang bekerja di laboratorium yang terdiri dari 7 orang di laboratorium mikrobiologi, 5 orang di laboratorium obat, 4 orang di laboratorium OTSK, 4 orang di laboratorium kosmetika, 6 orang di laboratorium pangan, dan 3





orang ketua tim kerja. Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan upaya untuk mencapai target kinerja diantaranya peningkatan kompetensi dan ruang lingkup pengujian. Dalam hal penggunaan anggaran, efisiensi untuk indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP masuk dalam kriteria **Efektif** dengan nilai IE sebesar 1 (Tabel 3.2.2).

#### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang dan kegiatan yang menunjang tercapainya target pemenuhan target Indikator Kinerja ini antara lain:

1. Merencanakan pemenuhan Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Personil, dan Standar Peralatan secara menyeluruh sesuai standar dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan secara berkala setiap triwulan,
2. Melakukan monitoring dan evaluasi program perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan, suku cadang, reagen, dan baku yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu,
3. Menyesuaikan Standar Kemampuan Laboratorium dengan Regionalisasi Laboratorium.
4. Melakukan koordinasi dengan UPT lain dalam region yang sama dalam pengadaan sampel untuk peningkatan ruang lingkup.
5. Melakukan pelatihan internal dengan metode kepenyeliaan untuk meningkatkan kompetensi personil laboratorium.

#### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilakukan juga tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pemenuhan Standar Pemenuhan GLP yang baru pada Triwulan ke IV tahun 2022, yaitu perencanaan pelatihan dan magang, penambahan ruang lingkup pengujian dan pengadaan alat yang mengacu pada standar Pemenuhan GLP yang baru, serta perencanaan pengadaan suku cadang, reagen, dan baku pembanding yang sesuai dengan target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium.





No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Pengajuan rekomendasi alat laboratorium yang sesuai dengan standar peralatan laboratorium	tersedia rekomendasi alat laboratorium dari PPOMN (TW I 2023)	-	-
	Penyediaan bahan baku pembanding untuk untuk laboratorium kimia kosmetika, dan obat tradisional	Tersedia baku pembanding laboratorium kosmetika dan obat tradisional (TW I 2023)		
	Penyediaan sampel dengan zat aktif yang sesuai untuk laboratorium kimia obat, dan mikrobiologi.	Tersedia sampel dengan zat aktif yang sesuai untuk laboratorium kimia obat dan mikrobiologi (TW I 2023)		

## 9) Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- 1) Secara internal, data perbandingan hasil capaian pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2023 terhadap target jangka menengah pada tahun 2024 yang menunjukkan gap sebesar 1,4 %. Gap ini harus dapat dicapai dalam waktu 1 tahun anggaran pada tahun 2024. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan capaian pemenuhan ruang lingkup dan kompetensi. Oleh karena itu diperlukan strategi dengan lebih mengutamakan peningkatan capaian pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Standar Kompetensi. Strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi dengan UPT lain dalam satu region untuk pengadaan sampel dengan zat aktif tertentu untuk





peningkatan standar ruang lingkup laboratorium. Selain itu perlu digencarkan program kepenyeliaan untuk peningkatan kompetensi personil sesuai standar kompetensi.

- 2) Secara eksternal, data capaian pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium ini dapat menunjukkan kapabilitas laboratorium pengujian Obat dan Makanan Balai Besar POM di Pontianak kepada *stakeholder* dan masyarakat, sehingga hasil pengujian yang dihasilkan dapat dipercaya secara nasional dan internasional dalam pengawasan produk Obat dan Makanan *pre market* maupun *post market*.

**SK.10.IKSK.2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang Optimal**

Capaian indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak merupakan rerata dari Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi dan Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi diperoleh dengan menghitung rata rata 4 komponen Indeks yang meliputi
  - 1) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM-Email Corporate
  - 2) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC
  - 3) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - *Sharing folder*
  - 4) Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual
- b. Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC, yang merupakan jumlah dari:
  - 1) Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT (80 %)
  - 2) Nilai Indeks Data Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER (20 %)

Nilai Indeks tersebut diukur dari skala 0 - 3.

- a. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-email  
BPOM email adalah pemanfaat akun *email corporate* bagi seluruh pegawai Badan POM





- b. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM-BOC  
Dinilai dari frekuensi akses dan login seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak ke aplikasi Badan POM *Operational Center (BOC)*
- c. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-*sharing folder*  
Dinilai dari frekuensi akses seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak ke dokumen *sharing folder*.
- d. Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM-Berita Aktual Dinilai dari jumlah *upload* berita yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak
- e. Nilai indeks data dan informasi yang dimutakhirkan di BOC-SIPT Dinilai dari realisasi data dalam Sistem Informasi Pelaporan Terpadu.
- f. Nilai indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC-SPIMKER  
Dinilai dari jumlah *entry* data keracunan sepanjang tahun 2022

### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Nilai realisasi indeks pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal pada tahun 2023 adalah sebesar 3 dari target 2,5 dengan capaian 120%, termasuk dalam kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

Tabel 3.1. 142 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2,5	3	120	Sangat Baik

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 143 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
	2020	1,51	1,95	129,14	Tidak Dapat Disimpulkan





Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak	2021	2	1,48	74	Cukup
	2022	2,25	2,88	128	Tidak Dapat Disimpulkan
	2023	2,5	3	120	Sangat Baik

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,12 dari nilai 2,88 pada tahun 2022 menjadi 3 pada tahun 2023.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 144 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	100	 Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2023 sebesar 3. Capaian tahun 2023 sebesar 100% dari target 3 di akhir tahun Renstra 2020-2024.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

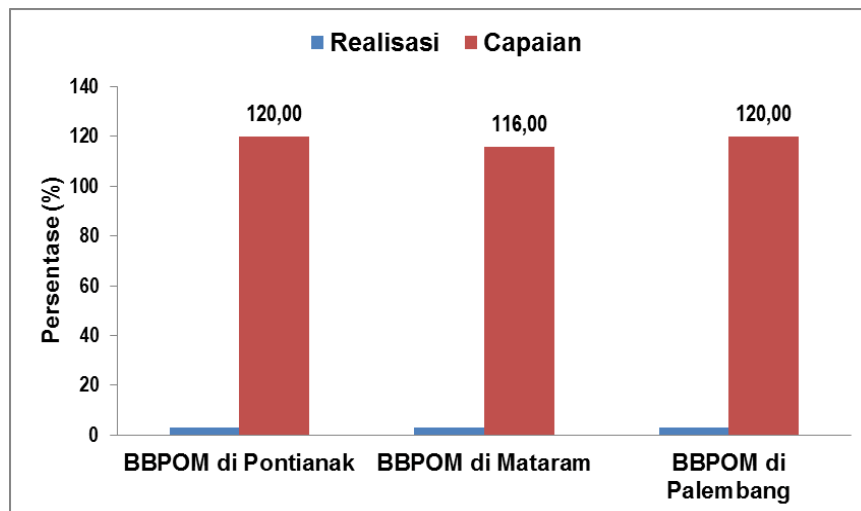
Tabel 3.1. 145 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	Realisasi	3	2,9	3
	Capaian	120	116	120





Berdasarkan tabel tersebut diketahui realisasi capaian indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dan dua balai perbandingan lainnya termasuk dalam kriteria **Sangat Baik**. BBPOM di Mataram, BBPOM di Palembang, dan Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Palembang mendapatkan capai tertinggi dibandingkan dengan balai lainnya.



Grafik 3.1. 27 Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Perbandingan

### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan perhitungan, capaian Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Pontianak telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Optimalisasi penggunaan email corporate, BOC, Sharing Folder, dan berita aktual dalam proses bisnis pengawasan dan kepegawaian .
- Data SPIMKER dan SIPT secara konsisten dilakukan pemutakhiran setiap bulannya.

### 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak dilakukan oleh tim TI sebanyak 12 orang. Jumlah SDM ini telah sesuai dengan





kebutuhannya namun diperlukan keaktifan setiap pegawai untuk memanfaatkan media data dan informasi yang telah disediakan.

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi sebesar 1,2 yang termasuk kriteria **Efisien** (Tabel 3.2.2). Hal ini didukung oleh keaktifan pegawai yang aktif menggunakan email corporate, BOC, Sharing Folder, dan berita aktual dalam proses bisnis pengawasan dan kepegawaian.

#### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perolehan Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi antara lain:

- a. Melakukan pemenuhan alat pengolah data dan perangkat IT yang memadai serta sesuai kebutuhan.
- b. Mendorong keaktifan setiap pegawai dalam mengakses email corporate setiap bulan.
- c. Melakukan pemeliharaan jaringan internet dan daya listrik.
- d. Meningkatkan akses ke dashboard BOC dalam memonitoring hasil pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Melakukan pendekatan dan Bimtek pada petugas rumah sakit untuk menginput data keracunan ke dalam aplikasi SPIMKer.
- f. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin terkait permasalahan pengolahan data dan perangkat IT





### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	Mendorong keaktifan setiap pegawai dalam mengakses email corporate setiap bulan	Telah dilakukan reminder keseluruhan pegawai terkait keaktifan email corporate pegawai, dan juga menshare dokumen terkait kepegawaian melalui email corporate		

### 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja Balai Besar POM di Pontianak, indikator ini telah berhasil mencapai target dikarenakan kesadaran dan keaktifan setiap pegawai dalam mengakses informasi mengenai kepegawaian melalui *email corporate*. Diharapkan capaian kinerja ini dapat konsisten hingga akhir periode renstra 2020-2024 dengan kontribusi yang tinggi dari masing-masing pegawai.



**SASARAN STRATEGIS 11**  
**Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel**



Pada tahun 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah berhasil mengelola keuangan secara akuntabel di lingkup Balai Besar POM di Pontianak dengan capaian NPSS **95,38%** dengan Predikat **Cukup**

**SK.11.IKSK.1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak**

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Terdapat 13 komponen pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output



### 1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1. 146 Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	94,60	90,23	95,38	Cukup

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023, sebesar 90,23% dari target 94,60%, dengan capaian sebesar 95,38%. Nilai capaian indikator kinerja ini termasuk dalam kriteria **Cukup**.

### 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1. 147 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	2020	93	87,41	93,99	Cukup
	2021	92,8	90,25	97,26	Cukup
	2022	93,4	88,91	95,19	Cukup
	2023	94,60	90,23	95,38	Cukup






Indikator Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2022 mencapai 95,19% sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 95,38%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.1. 148 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)	Target Tahun 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	90,23	90,11	100,13	 Tercapai/Melampaui

Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 mencapai 100,13% dari target pada akhir tahun Renstra 2020-2024 yang telah direvisi sebesar 90,11%.

### 4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Balai Lain sebagai Pemanding

Tabel 3.1. 149 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pemanding

Indikator Kinerja	Persentase	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram	BBPOM di Palembang
Nilai Kinerja Anggaran	Realisasi	90,23	91,65	89,52
	Capaian	95,38	94,48	90,70

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran seluruh balai belum ada yang mencapai target dan masuk kategori **Cukup**. Balai Besar POM di Pontianak memiliki capaian tertinggi sebesar 95,38% dan BBPOM di Palembang memiliki capaian terendah sebesar 90,70%.





Grafik 3.1. 28 Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak dengan Balai Lain sebagai Pembanding

### 5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak yang belum mencapai target disebabkan oleh:

- Kurangnya komitmen pelaksana program dalam rencana penarikan dana yang telah disusun pada awal tahun, sehingga terdapat gap yang cukup tinggi antara realisasi anggaran dengan perencanaan realisasi anggaran pada halaman III DIPA
- Terdapat jenis belanja barang dan belanja pegawai yang tidak terserap secara optimal.

### 6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang utama dalam mendukung keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak adalah seluruh pemegang program dan pengelola keuangan. Efisiensi terhadap penggunaan anggaran (indeks efisiensi) untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran sebesar 1 yang termasuk kriteria **Efisien**





(Tabel 3.2.2), yang bermakna Balai Besar POM di Pontianak mampu menggunakan input anggaran untuk mencapai output kinerja dengan efisien.

#### 7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang menunjang capaian indikator nilai kinerja anggaran kedepannya antara lain :

- Melakukan monitoring terhadap ketersediaan anggaran pada program yang akan dilaksanakan agar kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.
- Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA.
- Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun.
- Melakukan pemantauan terhadap kontrak yang sudah didaftarkan untuk menghindari keterlambatan pembayaran kontrak.
- Meminimalisir revisi anggaran dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik.
- Mengoptimalkan penerapan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)
- Menyusun POA dan monitoring realisasi secara berkala
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD
- Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu
- Menyusun Laporan Kinerja *interim* per triwulan dengan analisis dan rekomendasi serta tindak lanjut yang tepat untuk mencapai kinerja yang memenuhi ekspektasi.
- Melakukan rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban yang tepat waktu.





### 8) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Meminimalisir jumlah kesalahan SPM	Nilai dispensasi SPM sudah mencapai 100%		
		Penyelesaian tagihan tepat waktu	Nilai penyelesaian tagihan mencapai 100%		
		Melaksanakan monev penganggarannya yang intens	1. Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu, 2. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun, 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD		

### 9) Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak belum mencapai target. Hal ini dikarenakan anggaran tahun 2023 tidak terserap secara optimal, kemudian penarikan dana yang masih belum sesuai dengan rencana





penarikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada capaian-capaian tahun sebelumnya target indikator Nilai Kinerja Anggaran termasuk tinggi sehingga pada tahun 2023 Balai Besar POM di Pontianak mengajukan penyesuaian target untuk mendukung pencapaian kinerja diakhir periode renstra.

### 3.2 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022

Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan sebagai berikut:

No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	<p><b>Perencanaan</b></p> <p><b>A.</b> Selain mempublikasikan perencanaan kinerja pada subsite, Balai Besar POM di Pontianak secara berkala dapat menyampaikan keberadaan dokumen perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud kepada publik melalui berbagai kanal yang dimiliki.</p> <p><b>B.</b> Mengoptimalkan analisa SWOT dengan menelaraskan seluruh isu strategis, uraian S,</p>	<p><b>A.</b> Telah dipublikasikan melalui media sosial dan juga wa group</p> <p><b>B.</b> Analisa SWOT telah diperbarui dengan isu strategis terkini dan dilampirkan pada lapkin 2023</p>			<p><b>A.</b> Dokumen perencanaan belum dipublikasikan secara berkala</p> <p><b>B.</b> Analisis SWOT yang dimiliki belum update</p>	<p><b>A.</b> Dokumen perencanaan telah dipublikasikan secara berkala</p> <p><b>B.</b> Analisis SWOT yang dimiliki telah update sesuai dengan isu terbaru</p>





No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)			
			Rencana Aksi			Timeline
	W, O, dan T, sehingga bermuara pada strategi yang komprehensif.					
2	<p><b>Pengukuran</b></p> <p><b>A.</b> Melakukan reviu terhadap SOP pengumpulan data kinerja dan menyelarkannya dengan model yang secara riil berlaku di Balai Besar POM di Pontianak.</p> <p><b>B.</b> Senantiasa memastikan keselarasan data antara RHPK, laporan kinerja interim, dan laporan kinerja tahunan, dengan mencantumkan data realisasi dan capaian kinerja per triwulan pada laporan kinerja tahunan.</p>	<p><b>A.</b> SOP pengumpulan data kinerja disesuaikan dengan kegiatan terkini yang dilaksanakan di balai</p> <p><b>B.</b> Data capaian kinerja per triwulan telah dilampirkan pada laporan kinerja tahunan.</p>			<p><b>A.</b> Terdapat kegiatan pada SOP yang sudah tidak dilaksanakan</p> <p><b>B.</b> Pada lapkin tahunan, data capaian kinerja triwulan tidak terlampir</p>	<p><b>A.</b> Kegiatan pada SOP telah diperbarui sehingga sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan</p> <p><b>B.</b> Pada lapkin tahunan, data capaian kinerja triwulan telah dilampirkan sehingga progress kinerja dapat terlihat</p>





No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)			
			Rencana Aksi	Timeline		
3	<b>Pelaporan</b> Senantiasa menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menyertakan analisis berbasis data.	Penyajian informasi pada lapkin disertai dengan analisis dari data kinerja terkini.			Informasi yang disajikan pada laporan kinerja telah berdasarkan data terkini.	Informasi yang disajikan pada laporan kinerja telah berdasarkan data terkini.
4	<b>Evaluasi Internal</b> Senantiasa meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik yang selama ini telah dilakukan, dengan menggunakan serta menuangkan data-data berupa permasalahan, kendala, hambatan, keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, dan rekomendasi perbaikan/ rencana aksi ke dalam laporan Evaluasi Internal maupun laporan kinerja. Selain itu, Balai Besar POM di Pontianak diharapkan memanfaatkan evaluasi internal	Pada Laporan Evaluasi dan Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM di Pontianak telah mencakup capaian kinerja per triwulan beserta dengan matriks kendala dan tindaklanjut yang akan dilaksanakan khusus capaian yang belum dan tidak memenuhi ekspektasi. Dalam kegiatan evaluasi internal KaTim beserta Pejabat Fungsional telah terlibat langsung menganalisis capaian kinerja yang terkait.			Belum semua personil terlibat dalam pemantauan dan evaluasi capaian kinerja	Semua personil dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi capaian kinerja unit sebagai salah satu bentuk pengimplementasian SAKIP





No.	Rekomendasi Inspektorat Utama (Isi dengan masing-masing rekomendasi pada LHE SAKIP)	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai (Jika sudah, isi bentuk rincian TL dan jelaskan data dukung di kolom data dukung)	Belum (Jika belum, isi belum dan lanjut ke RATL)		
			Rencana Aksi	Timeline	
	sebagai medium untuk meningkatkan keterlibatan seluruh personil pada unit kerja dalam implementasi SAKIP.				
5	<p><b>Capaian Kinerja</b></p> <p><b>A.</b> Memaksimalkan pemanfaatan proses evaluasi internal untuk meningkatkan capaian kinerja output dan outcome.</p> <p><b>B.</b> Meningkatkan pencapaian target kinerja unit dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi internal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja.</p>	<p><b>A.</b> Capaian Kinerja yang belum mencapai target telah dilakukan pemantauan khusus melalui matriks kendala dan tindak lanjut</p> <p><b>B.</b> Capaian yang belum mencapai target dipantau melalui matriks kendala dan tindak lanjut</p>			<p>Belum terdapat tools pemantauan capaian kinerja yang tidak mencapai target</p> <p>Menggunakan matriks kendala dan tindak lanjut sebagai sarana pemantauan capaian kinerja yang belum tercapai</p>

### 3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023, terdapat beberapa indikator yang akan mengalami revisi target pada tahun 2024. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan tren capaian di tahun sebelumnya dan juga rekomendasi dari unit pengampu





masing-masing indikator. Adapun target indikator-indikator tahun 2024 yang akan direvisi diantaranya:

Tabel 3.3. 1Tabel Perubahan Target Balai Besar POM di Pontianak

Indikator	Realisasi 2023	Target 2024 (Awal)	Target 2024 (Revisi)
Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,47%	91%	94,5%
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,1%	86%	86,2%
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,59%	89%	94,6%
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,78%	80%	83,5%
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94,12%	99%	94%
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,1	94,6	97,2
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,79	75,01	78
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90,7	92	91,25
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100%	95%	100%





Indikator	Realisasi 2023	Target 2024 (Awal)	Target 2024 (Revisi)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	80,78%	70%	80,80%
Indeks Pelayanan Publik	4,64	4,51	4,7
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81,48%	60%	83%
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,83	95,6	95,3
Nilai AKIP UPT	80,02	87,6	83,33
Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,44	83,75	90,59
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,10%	91%	87,23%
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,23	95,8	90,11
Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,44	83,75	90,59
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,10%	91%	87,23%
Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,23	95,8	90,11

Selain perubahan pada target 2024, Balai Besar POM di Pontianak juga menyusun beberapa rekomendasi terutama pada indikator yang masih belum mencapai target atau masuk ke dalam kategori Cukup. Tabel rekomendasi dan rencana tindak lanjut dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023.



Secara keseluruhan capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak sudah baik, hal ini ditunjukkan dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang telah mencapai **104,16%** atau masuk dalam predikat **Istimewa**. Dengan capaian tersebut maka beberapa pegawai Balai Besar POM di Pontianak berhak mendapatkan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dengan kategori Sangat Baik.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya mempunyai tugas salah satunya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinya. Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2022 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. 1 Profil Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rp308.328.000	Rp308.146.500	99,94%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rp116.202.000	Rp113.966.673	98,08%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp223.660.000	Rp223.592.481	99,97%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rp175.830.000	Rp175.802.875	99,98%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rp30.420.000	Rp30.077.200	98,87%
2	Meningkatnya kesadaran	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap	Rp40.087.000	Rp40.086.500	99,99%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Obat dan Makanan aman dan bermutu			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rp319.760.000	Rp317.904.233	99,42%
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rp123.361.000	Rp120.824.337	97,94%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp24.931.000	Rp24.920.161	99,957%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rp6.831.000	Rp6.794.460	99,47%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rp96.698.000	Rp93.810.596	97,01%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rp61.336.000	Rp61.289.414	99,92%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp51.926.000	Rp49.865.200	96,03%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rp507.856.000	Rp505.404.988	99,52%
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Pontianak	Rp44.373.000	Rp44.361.650	99,97%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rp78.000.000	Rp77.913.163	99,89%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rp4.779.410.000	Rp4.774.598.088	99,90%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Rp483.404.000	Rp481.835.591	99,68%
		Jumlah desa pangan aman	Rp763.678.000	Rp762.875.405	99,89%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Rp138.208.000	Rp137.023.740	99,14%
6			Rp223.660.000	Rp223.592.481	99,97%





No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rp175.830.000	Rp175.802.875	99,98%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Pontianak	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rp879.532.000	Rp879.262.789	99,97%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Pontianak	Rp189.433.000	Rp189.409.836	99,99%
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Pontianak	Rp6.115.000	Rp6.114.128	99,99%
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Pontianak yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Pontianak	Rp51.614.000	Rp51.612.598	99,99%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rp2.842.507.000	Rp2.838.391.654	99,86%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Pontianak yang optimal	Rp126.050.000	Rp126.050.000	100%
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Pontianak secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Pontianak	Rp14.953.403.000	Rp14.638.349.605	97,89%
			<b>Rp27.822.443.000</b>	<b>Rp27.479.679.221</b>	<b>98,77%</b>

Balai Besar POM di Pontianak memperoleh pagu pada DIPA awal sebesar Rp 27.729.090.000, namun pada triwulan III terdapat pemotongan anggaran sebesar 4,39% sehingga menyisakan Rp 26.511.613.000 dan pada triwulan IV Balai Besar POM di Pontianak mendapatkan tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1.310.830.000 dengan total anggaran menjadi Rp 27.822.443.000. Realisasi akhir tahun 2023 berhasil menyerap anggaran sebesar Rp 27,479,679,221 (98,77%). Selama tahun anggaran 2023, Balai Besar POM di Pontianak telah melakukan revisi POK sebanyak 16 kali dan juga revisi DJA sebanyak 4 kali.

Tabel 3.4. 2Rincian Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja (sumber: Web OMS PAN 2023)



Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
51 (Belanja Pegawai)	Rp 11,027,753,000	Rp 10,902,485,391
52 (Belanja Barang)	Rp 15,911,080,000	Rp 15,702,141,123
53 (Belanja Modal)	Rp 883,610,000	Rp 875,052,707
<b>Total</b>	<b>Rp27,822,443,000</b>	<b>Rp27,479,679,221</b>



Berbagai upaya yang dilakukan Balai Besar POM di Pontianak dalam pengelolaan dan percepatan penyerapan anggaran antara lain :

1. Melakukan inventarisasi kegiatan yang bersumber dana RM sejak awal tahun anggaran, supaya kegiatan yang bersumber dari dana RM segera dapat dilaksanakan. Hal tersebut perlu dilakukan karena kegiatan dengan anggaran bersumber dari PNBPN biasanya baru dapat direalisasikan sekitar bulan April.
2. Mempercepat perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, baik yang menggunakan sistem tender, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun melalui *e-purchasing*.
3. Konsultasi dan koordinasi tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP, LKPP, dan instansi lain yang berkaitan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara intensif.

#### A. Efisiensi Dan Efektifitas

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :





$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$
$$= \frac{100}{100} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau Kurang Efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

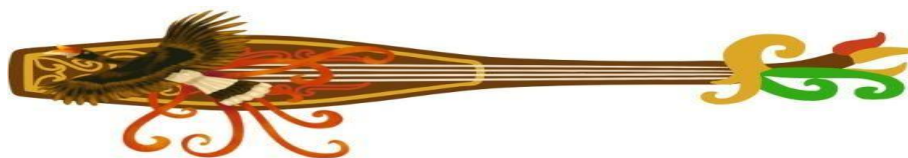
berikut Pada tahun 2023, 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Pontianak berdasarkan capaian output kegiatan dan capaian realisasi anggaran serta berdasarkan hasil perhitungan Indeks Efisiensi (IE) dan Tingkat Efisiensi (TE) diperoleh data sebagaimana tercantum pada tabel berikut:











Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Capaian Penyesuaian	Capaian per Sasaran Strategis	NPS Perspektif	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	IE = CO/CI	TE = (IE-1)/1	Capaian per Sasaran Strategis	IE Sasaran Strategis	TE Sasaran Strategis	
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00%	75,18%	<b>90,58%</b>	<b>90,58%</b>		Rp507.856.000	Rp505.404.988	<b>99,52%</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,09</b>				
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,25	4,64	<b>109,18%</b>	<b>109,18%</b>		Rp44.373.000	Rp44.361.650	<b>99,97%</b>	<b>1,1</b>	<b>0,09</b>				
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55%	81,48%	<b>148,15%</b>	<b>120,00%</b>		Rp78.000.000	Rp77.913.163	<b>99,89%</b>	<b>1,5</b>	<b>0,48</b>				
5	Meningkatnya efektivitas	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,8	94,42	<b>100,66%</b>	<b>100,66%</b>	<b>100,17%</b>	Rp4.779.410.000	Rp4.774.598.088	<b>99,90%</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>	<b>99,65%</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>









Dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang ditargetkan telah dilaksanakan dengan Indeks Efisiensi (IE) antara 0,94 s.d. 1,5, sehingga tingkat efisiensi berada antara -0,21 s.d. 0,48. Dengan rata-rata IE 1,1 maka penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak termasuk dalam kategori Efisien. Tingkat efisiensi tertinggi 0,48 dicapai pada pelaksanaan indikator kegiatan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Sebaliknya tingkat efisiensi terendah -0,21 pada pelaksanaan indikator kegiatan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

Secara keseluruhannya sasaran kegiatan dapat dilaksanakan dengan efisien dan target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak untuk meningkatkan efisiensi anggaran adalah :

- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Balai Besar POM di Pontianak.
- Perencanaan program dan kegiatan yang jelas, terukur, dan berdasarkan skala prioritas.
- Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban selalu akuntabel.
- Memperkuat pengendalian internal melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin, sehingga tersedia informasi yang memadai untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala yang dihadapi pada saat itu.
- Menyesuaikan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, misalnya pengalihan anggaran KIE secara tatap muka menjadi secara daring.

Dalam hal ini tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya indikator kegiatan yang dinyatakan efisien dalam buku ini dapat berubah menjadi Kurang Efisien setelah dievaluasi / diaudit oleh pihak lain begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input yang hanya berupa dana. Kedepan pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input lainnya dengan dukungan data yang lebih memadai.





## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Pontianak selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, selain itu laporan kinerja ini juga dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana perbaikan dan juga pengoptimalan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020-2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023, serta rekomendasi dalam peningkatan pencapaian kinerja.

Rerata capaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kegiatan tercapai dengan kriteria **Istimewa** dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **104,16%**. Capaian 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja Balai Besar POM di Pontianak tersebut dengan kategori sebagai berikut:

1. terdapat 14 (empat belas) indikator kinerja dengan capaian kategori **Sangat Baik**, yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Indeks kesadaran





masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Indeks Pelayanan Publik, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

2. terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan capaian kategori **Baik**, yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
3. terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kategori **Cukup**, yaitu Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Indeks RB UPT, Nilai AKIP UPT, dan Nilai Kinerja Anggaran UPT, dan
4. terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, yaitu indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

Realisasi anggaran Balai Besar POM di Pontianak pada tahun 2023 berdasarkan sasaran kegiatan yang dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan yang dilaksanakan telah masuk kategori efisien. Secara umum penggunaan anggaran tahun 2023 sebesar



Rp27.479.679.221,- (**98,77%**) terhadap nilai pencapaian sasaran sebesar **104,16%**, sehingga disimpulkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Pontianak adalah **Efisien**.

Demikian Laporan Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 dengan harapan dapat bermanfaat bagi publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

#### 4.2. Saran

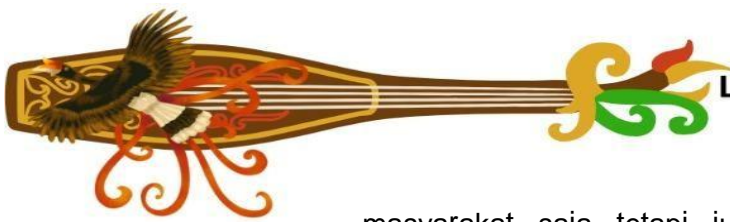
Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2023 perlu dirumuskan beberapa langkah sebagai strategi untuk meningkatkan capaian sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, antara lain :

1. Meningkatkan kompetensi personil secara berjenjang, berkesinambungan, dengan memperhatikan kondisi terkini.
2. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan ISO 17025:2017 secara konsisten.
3. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah tersertifikasi tahun 2023 dengan konsisten
4. Meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dan pengelolaan data dan informasi, dalam rangka penguatan laboratorium, serta melaksanakan kalibrasi dan pemeliharaan peralatan laboratorium secara rutin untuk menjamin performa alat.
5. Mengintensifkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dengan mengedepankan aspek persuasif sehingga pelaku usaha dengan penuh kesadaran melaksanakan GMP (*Good Manufacturing Practices*) maupun GDP (*Good Distribution Practices*).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dan



solusi apabila terdapat kendala. Serta melakukan kaji ulang terhadap target dan indikator kinerja dengan capaian tidak dapat disimpulkan.

7. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada semua bisnis proses untuk mengintegrasikan data, terutama dalam pengumpulan data kinerja (bulanan, triwulan) secara berjenjang sampai ke level individu sehingga diperoleh data base kinerja yang realtime, akuntabel dan mempermudah evaluasi oleh pimpinan.
8. Meningkatkan peran *Agent of Change (AoC)* dan tim kelompok kerja area Reformasi Birokrasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi di Balai Besar POM di Pontianak untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
9. Meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Pontianak secara konsisten dan berkelanjutan.
10. Mengembangkan inovasi dan secara konsisten menerapkannya untuk peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik, serta mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja
11. Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi dan distribusi serta pelayanan kefarmasian di masing-masing kabupaten/kota penerima DAK Non Fisik.
12. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan membangun jejaring dengan lintas sektor dan *stakeholder*, termasuk koordinasi dengan *Criminal Justice System (CJS)* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
13. Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, antara lain melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, inisiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU), peningkatan kompetensi, koordinasi, KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi), propaganda cegah tangkal, panel ahli, seminar, dan lain-lain.
14. Pelaksanaan survei KIE dalam rangka mengetahui tingkat efektivitas obat dan makanan tidak hanya dilakukan dalam KIE pemberdayaan



masyarakat saja tetapi juga dilakukan dalam kegiatan program prioritas nasional.

15. Melakukan penyebaran informasi yang *up to date* secara intensif melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial.
16. Membuat rencana aksi sebagai komitmen misalnya pihak desa terutama kader melaksanakan program intervensi Desa Pangan Aman, dan pihak sekolah terutama kader dalam melaksanakan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
17. Memberikan pelayanan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM untuk mendukung pertumbuhan UMKM.



# **LAMPIRAN**

## NILAI INDIKATOR INDEKS

**Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**

### Indeks Kesadaran Masyarakat per Provinsi

**TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS TERTINGGI**  
DKI Jakarta (91.89), Sulawesi Utara (91.79) dan Banten (91.07).

**TIGA PROVINSI DENGAN CAPAIAN TERENDAH**  
Papua (66.56), Maluku (71.02) dan Maluku Utara (74.91).

No	Provinsi	Indeks Tahun 2022	Realisasi Indeks Kesadaran Tahun 2023		Target Indeks Tahun 2023	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Aceh	79.36	82.61	Baik	81.00	101.99%
2	Sumatera Utara	85.95	87.87	Baik	84.00	104.61%
3	Sumatera Barat	83.22	84.74	Baik	89.00	95.21%
4	Riau	77.15	84.02	Baik	83.00	101.23%
5	Jambi	77.56	83.67	Baik	81.00	103.30%
6	Sumatera Selatan	82.53	84.55	Baik	86.00	98.31%
7	Bengkulu	79.27	83.86	Baik	91.00	92.15%
8	Lampung	75.29	88.16	Baik	89.00	99.06%
9	Bangka Belitung	85.72	82.05	Baik	80.00	102.56%
10	Kepulauan Riau	86.53	89.96	Baik	83.00	108.38%
11	DKI Jakarta	91.04	91.89	Sangat Baik	89.00	103.25%
12	Jawa Barat	82.63	86.68	Baik	77.00	112.58%
13	Jawa Tengah	78.85	80.56	Baik	81.00	99.45%
14	DI Yogyakarta	84.71	87.86	Baik	84.00	104.59%
15	Jawa Timur	81.26	84.50	Baik	81.00	104.32%
16	Banten	89.77	91.07	Sangat Baik	93.00	97.93%
17	Bali	78.78	84.31	Baik	77.00	109.50%
18	Nusa Tenggara Barat	72.23	79.81	Baik	82.00	97.33%
19	Nusa Tenggara Timur	79.46	76.89	Baik	77.00	99.86%
20	Kalimantan Barat	82.55	86.07	Baik	85.00	101.26%
21	Kalimantan Tengah	83.04	87.17	Baik	77.00	113.21%
22	Kalimantan Selatan	83.04	84.48	Baik	86.00	98.23%
23	Kalimantan Timur	85.72	88.76	Baik	89.00	99.73%
24	Kalimantan Utara	71.59	89.46	Baik	87.00	102.82%
25	Sulawesi Utara	85.32	91.79	Sangat Baik	86.00	106.73%
26	Sulawesi Tengah	81.19	80.87	Baik	83.00	97.44%
27	Sulawesi Selatan	79.41	83.85	Baik	83.00	101.03%
28	Sulawesi Tenggara	79.90	81.73	Baik	81.00	100.90%
29	Gorontalo	83.13	85.89	Baik	87.00	98.72%
30	Sulawesi Barat	75.00	76.91	Baik	75.00	102.55%
31	Maluku	76.12	71.02	Cukup Baik	82.00	86.61%
32	Maluku Utara	71.42	74.91	Cukup Baik	81.00	92.48%

## Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

### Indeks Balai Besar/Balai POM

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	93.4	96.1	102.9%	6	79
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93.4	96.0	102.8%	3	75
3	Balai Besar POM di Bandung	93.4	97.3	104.1%	16	222
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	93.4	98.6	105.6%	9	121
5	Balai Besar POM di Denpasar	93.0	95.6	102.8%	47	1061
6	Balai Besar POM di Jakarta	88.8	97.4	109.7%	79	1215
7	Balai Besar POM di Jayapura	93.4	94.4	101.1%	8	90
8	Balai Besar POM di Makassar	85.6	97.6	114.0%	6	78
9	Balai Besar POM di Manado	92.2	99.2	107.6%	14	146
10	Balai Besar POM di Mataram	89.8	97.8	108.9%	17	186
11	Balai Besar POM di Medan	93.4	98.5	105.4%	19	140
12	Balai Besar POM di Padang	84.8	98.6	116.3%	9	83
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	90.9	95.3	104.8%	6	117
14	Balai Besar POM di Palembang	91.0	98.3	108.1%	8	78
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	90.4	99.1	109.6%	13	297
16	Balai Besar POM di Pontianak	93.4	97.1	104.0%	17	145
17	Balai Besar POM di Samarinda	86.8	92.3	106.4%	22	249
18	Balai Besar POM di Semarang	89.3	94.7	106.0%	34	639
19	Balai Besar POM di Serang	86.9	96.2	110.7%	24	194
20	Balai Besar POM di Surabaya	85.7	96.4	112.5%	17	596
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	88.8	98.7	111.2%	11	191
22	Balai POM di Ambon	90.7	95.1	104.8%	21	184
23	Balai POM di Batam	90.2	96.1	106.6%	7	112
24	Balai POM di Bengkulu	93.4	96.8	103.6%	27	122
25	Balai POM di Gorontalo	87.7	96.3	109.8%	15	301
26	Balai POM di Jambi	90.0	96.3	107.0%	19	86
27	Balai POM di Kendari	82.4	96.3	116.8%	18	294
28	Balai POM di Kupang	92.5	94.6	102.3%	9	107
29	Balai POM di Mamuju	93.4	98.2	105.1%	7	42
30	Balai POM di Manokwari	89.4	92.2	103.1%	9	134
31	Balai POM di Palu	92.3	97.4	105.6%	7	44
32	Balai POM di Pangkalpinang	93.4	96.4	103.2%	22	160
33	Balai POM di Sofifi	93.4	99.0	106.0%	6	42
34	Balai POM di Tarakan	90.5	96.7	106.9%	10	120

**BerAKHLAK** berakhlak



- ✦ Secara keseluruhan (Pusat dan Balai) rentang jumlah kegiatan antara 3 – 162, jumlah responden antara 42 – 2287, dan Indeks antara 90.6 – 99.2.
- ✦ Seluruh unit kerja telah mencapai target. Rentang capaian target antara 100,0% – 116,8%.
- ✦ Terdapat 39 unit kerja mengalami kenaikan realisasi di dibanding tahun 2022 (0.2 sd 7.5). Sebanyak 10 unit kerja mengalami penurunan realisasi (-0.1 sd -3.5).
- ✦ Rata-rata kenaikan indeks unit kerja sebesar 1.75 dan kenaikan realisasi 0.7%

## Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

### Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi

**TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERTINGGI**

Provinsi Banten (90.76), Lampung (87.51), dan Kalimantan Tengah (86.02)

**TIGA PROVINSI CAPAIAN INDEKS KEPUASAN TERENDAH**

Provinsi Sulawesi Barat (67.06), Sulawesi Tengah (71.21) dan Papua (72.06)

No	Provinsi	Indeks Tahun 2022	Realisasi Indeks Kepuasan Tahun 2023		Target Indeks Tahun 2023	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Aceh	75.94	76.56	Puas	73.62	104.00%
2	Sumatera Utara	79.95	82.72	Puas	73.00	113.32%
3	Sumatera Barat	76.84	79.44	Puas	77.96	101.90%
4	Riau	70.82	77.77	Puas	68.10	114.20%
5	Jambi	76.54	79.75	Puas	73.47	108.55%
6	Sumatera Selatan	77.20	79.74	Puas	78.57	101.49%
7	Bengkulu	74.32	83.27	Puas	82.80	100.56%
8	Lampung	77.51	87.51	Puas	83.19	105.20%
9	Bangka Belitung	80.84	81.25	Puas	73.68	110.27%
10	Kepulauan Riau	74.97	76.25	Puas	73.43	103.84%
11	DKI Jakarta	80.22	80.10	Puas	78.33	102.26%
12	Jawa Barat	77.61	83.72	Puas	82.62	101.33%
13	Jawa Tengah	75.08	75.99	Puas	73.58	103.28%
14	DI Yogyakarta	76.81	82.36	Puas	82.73	99.55%
15	Jawa Timur	78.14	80.14	Puas	78.55	102.03%
16	Banten	80.13	90.76	Sangat Puas	83.70	108.43%
17	Bali	71.33	79.97	Puas	73.53	108.76%
18	Nusa Tenggara Barat	70.46	79.61	Puas	78.75	101.09%
19	Nusa Tenggara Timur	76.42	78.53	Puas	72.71	105.25%
20	Kalimantan Barat	73.51	77.79	Puas	72.70	107.00%
21	Kalimantan Tengah	79.14	86.02	Puas	67.76	126.95%
22	Kalimantan Selatan	73.72	75.91	Puas	82.78	91.70%
23	Kalimantan Timur	76.55	80.73	Puas	77.56	104.08%
24	Kalimantan Utara	66.11	83.08	Puas	82.82	100.31%
25	Sulawesi Utara	76.82	85.51	Puas	81.16	105.35%
26	Sulawesi Tengah	67.80	71.21	Cukup Puas	72.53	98.18%
27	Sulawesi Selatan	73.84	77.96	Puas	78.50	99.31%
28	Sulawesi Tenggara	75.25	80.62	Puas	72.79	110.76%
29	Gorontalo	81.72	79.35	Puas	68.18	116.38%
30	Sulawesi Barat	66.03	67.06	Cukup Puas	78.01	85.96%
31	Maluku	71.15	74.78	Cukup Puas	73.29	102.03%
32	Maluku Utara	66.09	74.58	Cukup Puas	67.52	110.45%
33	Papua Barat	71.72	78.41	Puas	72.85	107.63%
34	Papua	63.40	72.06	Cukup Puas	68.26	105.56%
<b>Indeks Nasional</b>		<b>76.39</b>	<b>80.45</b>	<b>Puas</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00%</b>

## Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

### Target IKM UPP Tahun 2024 – Balai Besar POM



No.	UPP	Indeks 2022	Target 2023	Indeks 2023	Target 2024
<b>BALAI BESAR POM</b>					
23	Balai Besar POM di Mataram	99,49	94,00	98,09	98,50
24	Balai Besar POM di Manado	95,44	92,00	99,05	99,50
25	Balai Besar POM di Pekanbaru	96,84	93,50	97,44	98,00
26	Balai Besar POM di Jakarta	96,03	92,00	94,71	95,25
27	Balai Besar POM di Banda Aceh	91,93	97,00	97,80	98,25
28	Balai Besar POM di Palangka Raya	93,50	93,00	96,72	97,25
29	Balai Besar POM di Yogyakarta	91,85	90,50	96,94	97,50
30	Balai Besar POM di Bandar Lampung	95,62	93,50	95,74	96,25
31	Balai Besar POM di Denpasar	89,77	90,20	96,12	96,50
32	Balai Besar POM di Padang	91,65	91,00	95,74	96,25
33	Balai Besar POM di Banjarmasin	94,28	91,50	94,99	95,50

No.	UPP	Indeks 2022	Target 2023	Indeks 2023	Target 2024
<b>BALAI BESAR POM</b>					
34	Balai Besar POM di Semarang	94,18	92,00	94,97	95,50
35	Balai Besar POM di Medan	94,64	93,00	92,42	93,00
36	Balai Besar POM di Makassar	91,90	93,50	94,90	95,50
37	Balai Besar POM di Palembang	90,93	92,50	94,45	95,00
38	Balai Besar POM di Serang	93,41	89,00	93,20	93,75
39	Balai Besar POM di Samarinda	87,65	89,00	93,30	93,75
40	Balai Besar POM di Bandung	92,37	89,00	92,26	92,75
41	Balai Besar POM di Surabaya	91,80	91,00	91,98	92,50
42	Balai Besar POM di Pontianak	91,39	91,00	90,70	91,25
43	Balai Besar POM di Jayapura	89,40	91,00	90,04	90,50

## Indeks Pelayanan Publik

### INDEKS PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR/BALAI POM TAHUN 2023



No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2022	Target IPP 2023	IPP 2023	Keterangan
18	Balai POM di Jambi	4.17	4.25	4.67	Pelayanan Prima
19	Balai POM di Mamuju	4.54	4.40	4.64	Pelayanan Prima
20	Balai POM di Sofifi	4.12	4.25	4.64	Pelayanan Prima
21	Balai Besar POM di Pontianak	4.27	4.25	4.64	Pelayanan Prima
22	Balai Besar POM di Manado	4.10	4.25	4.62	Pelayanan Prima
23	Balai Besar POM di Semarang	4.65	4.40	4.62	Pelayanan Prima
24	Balai Besar POM di Makassar	4.56	4.40	4.61	Pelayanan Prima
25	Balai Besar POM di Palangka Raya	4.58	4.40	4.59	Pelayanan Prima
26	Balai Besar POM di Banjarmasin	4.49	4.25	4.54	Pelayanan Prima
27	Balai Besar POM di Samarinda	4.33	4.25	4.54	Pelayanan Prima
28	Balai POM di Kendari	4.69	4.40	4.52	Pelayanan Prima
29	Balai POM di Palu	4.39	4.25	4.50	Sangat Baik
30	Balai POM di Ambon	4.38	4.25	4.42	Sangat Baik
31	Balai Besar POM di Pekanbaru	4.11	4.25	4.41	Sangat Baik
32	Balai Besar POM di Banda Aceh*	4.56	4.40	4.37	Sangat Baik
33	Balai POM di Tarakan	3.94	3.75	4.24	Sangat Baik
34	Balai Besar POM di Bandung*	4.67	4.40	4.14	Sangat Baik

\*Nilai IPP belum mencapai target

### Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

	Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE	Capaian Target	Jumlah Responden
<b>REGIONAL KALIMANTAN</b>		94,34	96,52	95,79	91,12	95,05		2138
Balai Besar POM Banjarmasin	93,6	94,3	99,81	96,48	87,59	95,68	102.22 %	135
Balai Besar POM Palangkaraya	95,7	95,36	96,53	96,21	93,32	95,72	100.02 %	277
Balai Besar POM Pontianak	93,8	93,93	94,58	95,39	91,92	94,42	100.66 %	1107
Balai Besar POM Samarinda	96,5	96,34	98,56	96,97	96,82	97,33	100.86 %	165
Balai POM Tarakan	92,3	91,77	93,14	93,89	85,96	92,11	99.79 %	454
<b>REGIONAL SULAM PAPUA</b>		95,70	97,59	96,41	92,73	96,04		3174
Balai Besar POM Jayapura	94,1	96,18	98,43	94,41	90,21	94,99	100.95 %	143
Balai Besar POM Makassar	94	93,9	97,35	94,78	91,41	94,84	100.89 %	230
Balai Besar POM Manado	95,7	97,12	98,19	97,78	96,05	97,53	101.91 %	462
Balai POM Ambon	96,8	96,53	96,97	97,56	94,79	96,82	100.02 %	614
Balai POM Gorontalo	98,5	97,79	99,35	99,41	97,46	98,9	100.41 %	128
Balai POM Kendari	96,3	97,46	98,44	99,51	97,44	98,65	102.44 %	205
Balai Besar POM Mamuju	93,1	94,59	92,9	94,1	91,03	93,29	100.20 %	390
Balai POM Manokwari	92,1	91,76	100	94,06	88,91	94,62	102.74 %	345
Balai POM Palu	94,5	94,31	95,66	96,07	92,14	95,11	100.65 %	496
Balai POM Sofifi	96,2	97,38	98,65	96,43	87,89	95,69	99.47 %	161

### Indeks RB

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	8,00	2,89	3,67	6,56	MS
II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,79	2,42	5,21	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,01	2,75	6,76	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,41	3,59	8,00	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,28	6,88	12,16	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,75	4,59	9,34	MS
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>					<b>48,03</b>	
<b>B.</b>	<b>Komponen Hasil</b>	40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,01	
I.	1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,51	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	MS
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			15,84	
	Nilai Survei Persepsi Kualitas	17,50			15,84	MS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

-2-

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
	Pelayanan (SPKP)				34,85	
<b>TOTAL HASIL</b>					<b>34,85</b>	
<b>NILAI PMPZI</b>					<b>82,88</b>	

## Nilai AKIP

### Balai Besar POM

No	Satuan Kerja	Tahun 2023	
		Nilai	Kategori
1.	Balai Besar POM di Surabaya	85.200	A
2.	Balai Besar POM di Mataram	83.810	A
3.	Balai Besar POM di Pekanbaru	83.440	A
4.	Balai Besar POM di Palangkaraya	82.910	A
5.	Balai Besar POM di Manado	82.700	A

-<

No	Satuan Kerja	Tahun 2023	
		Nilai	Kategori
6.	Balai Besar POM di Bandung	82.340	A
7.	Balai Besar POM di Jakarta	82.340	A
8.	Balai Besar POM di Samarinda	81.980	A
9.	Balai Besar POM di Makassar	81.050	A
10.	Balai Besar POM di Semarang	80.558	A
11.	Balai Besar POM di Yogyakarta	80.470	A
12.	Balai Besar POM di Padang	80.380	A
13.	Balai Besar POM di Serang	80.170	A
14.	Balai Besar POM di Pontianak	80.020	A
15.	Balai Besar POM di Banda Aceh	79.480	BB
16.	Balai Besar POM di Palembang	79.430	BB
17.	Balai Besar POM di Banjarmasin	79.160	BB
18.	Balai Besar POM di Bandar Lampung	79.120	BB
19.	Balai Besar POM di Medan	78.870	BB
20.	Balai Besar POM di Jayapura	78.500	BB
21.	Balai Besar POM di Denpasar	76.420	BB
<b>Rata-rata Nilai</b>		80.874	

## Indeks Profesionalitas ASN

### CAPAIAN DAN TARGET IP ASN 2022-2023

No	Unit Kerja	Capaian 2023	Target 2023	Keterangan	Capaian 2022	Target 2022	Keterangan
26	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	88,83	79,00	memenuhi	82,60	78,00	memenuhi
27	Direktorat Cegah Tangkai	91,48	85,00	memenuhi	86,17	84,50	memenuhi
28	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	86,98	85,00	memenuhi	84,81	84,00	memenuhi
29	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	89,48	85,00	memenuhi	85,20	84,00	memenuhi
30	Direktorat Siber Obat dan Makanan	90,03	86,90	memenuhi	85,85	86,70	tidak memenuhi
31	Balai Besar POM di Banda Aceh	90,13	83,00	memenuhi	84,68	82,00	memenuhi
32	Balai Besar POM di Medan	89,09	84,00	memenuhi	84,41	83,75	memenuhi
33	Balai Besar POM di Padang	89,90	84,30	memenuhi	84,64	84,00	memenuhi
34	Balai Besar POM di Pekanbaru	89,71	80,00	memenuhi	83,90	79,00	memenuhi
35	Balai POM di Jambi	90,56	83,30	memenuhi	84,93	85,25	tidak memenuhi
36	Balai Besar POM di Palembang	90,42	83,00	memenuhi	85,47	84,75	memenuhi
37	Balai POM di Bengkulu	89,50	84,50	memenuhi	84,15	84,00	memenuhi
38	Balai Besar POM di Bandar Lampung	88,03	79,00	memenuhi	84,14	78,00	memenuhi
39	Balai POM di Batam	89,58	85,75	memenuhi	85,48	85,50	tidak memenuhi
40	Balai POM di Pangkalpinang	90,84	84,75	memenuhi	84,89	84,50	memenuhi
41	Balai Besar POM di Jakarta	90,92	84,75	memenuhi	85,24	84,50	memenuhi
42	Balai Besar POM di Bandung	89,91	81,00	memenuhi	85,90	80,00	memenuhi
43	Balai Besar POM di Semarang	91,17	86,00	memenuhi	85,70	85,00	tidak memenuhi
44	Balai Besar POM di Yogyakarta	90,46	83,90	memenuhi	86,63	85,00	memenuhi
45	Balai Besar POM di Surabaya	90,35	83,50	memenuhi	85,79	85,25	memenuhi
46	Balai Besar POM di Serang	90,81	84,00	memenuhi	84,31	83,50	memenuhi
47	Balai Besar POM di Denpasar	90,13	85,40	memenuhi	84,40	85,30	tidak memenuhi
48	Balai Besar POM di Mataram	90,11	84,00	memenuhi	85,08	83,75	memenuhi
49	Balai POM di Kupang	90,71	86,00	memenuhi	81,56	85,75	tidak memenuhi
50	Balai Besar POM di Pontianak	90,44	83,50	memenuhi	84,96	83,25	memenuhi

## Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Perhitungan Indeks UPT

Periode : Desember

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir		Jumlah c = a + b	Pemanfaatan Sistem Informasi				Jumlah h = d+e+f+g	Total Nilai i = c + h / 2
		SPT (a) 80%	SPMKR (b) 20%		Email (d)	Sharing Folder (e)	Dashboard BOC (f)	Berita Aktual (g)		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
2	Balai Besar POM di Banjarmasin	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
3	Balai Besar POM di Denpasar	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
4	Balai Besar POM di Jakarta	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
5	Balai Besar POM di Manado	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
6	Balai Besar POM di Medan	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
7	Balai Besar POM di Padang	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
8	Balai Besar POM di Palembang	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
9	Balai Besar POM di Pekanbaru	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
10	Balai Besar POM di Pontianak	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
11	Balai Besar POM di Samarinda	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
12	Balai Besar POM di Semarang	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
13	Balai Besar POM di Serang	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
14	Balai Besar POM di Surabaya	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
15	Balai Besar POM di Yogyakarta	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
16	Balai POM di Jambi	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
17	Balai POM di Kupang	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
18	Balai POM di Manuju	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
19	Balai POM di Manokwari	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
20	Balai POM di Palu	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
21	Balai POM di Pangkal Pinang	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
22	Balai POM di Sofifi	2,4	0,6	3	3	3	3	3	3	3
23	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2,4	0,4	2,8	3	3	3	3	3	2,9
24	Balai Besar POM di Jayapura	2,4	0,4	2,8	3	3	3	3	3	2,9
25	Balai Besar POM di Makassar	2,4	0,4	2,8	3	3	3	3	3	2,9
26	Balai Besar POM di Mataram	2,4	0,4	2,8	3	3	3	3	3	2,9
27	Balai POM di Batam	2,4	0,4	2,8	3	3	3	3	3	2,9
28	Balai POM di Kendari	2,4	0,4	2,8	3	3	3	3	3	2,9
29	Balai Besar POM di Tarakan	2,4	0,4	2,8	3	3	3	3	3	2,9
30	Balai Besar POM di Bandung	2,4	0,6	3	3	3	2	3	2,75	2,88
31	Balai POM di Ambon	2,4	0,6	3	3	3	2	3	2,75	2,88
32	Balai POM di Gorontalo	2,4	0,6	3	3	3	1	3	2,5	2,5

## Nilai GLP

**LAPORAN RINGKAS PENILAIAN KEMAMPUAN LABORATORIUM TAHUN 2023**



Unit Kerja : BBPOM di Pontianak  
 Tanggal Penilaian : 27 Desember 2023  
 Nama Tim Penilai : 1. Dra. Wiwik Ambarwati, Apt, M.Epid  
 2. Nenden Solihatul Zannah, S.Si., Apt., M.

Hasil Penilaian:

No	Komponen Nilai SKL	Persentase (%)
1	Persentase Pemenuhan SKL (%)	89,7
2	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	92,4
3	Persentase Pemenuhan Standar Penilaian (%)	76,2
<b>Persentase Pemenuhan SKL (%)</b>		<b>86,1</b>

**Kendala Pemenuhan:**  
 Pemenuhan Standar Peralatan Laboratorium Mikrobiologi menjadi menurun karena terjadi kerusakan alat 1 unit refrigerated centrifuge dan 2 unit inkubator.

**Rencana Tindak Lanjut:**  
 Penggantian rencana pengadaan alat laboratorium yang mengalami kerusakan di tahun 2023.

Tim Penilai:  Tim Penilai:  Kepala Unit Kerja:   
 Dra. Wiwik Ambarwati, Apt, M.Epid    Nenden Solihatul Zannah, S.Si., Apt., M.Si.    Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt.

## Nilai Kinerja Anggaran

### PERINGKAT NILAI KINERJA ANGGARAN SATUAN KERJA BALAI BESAR/BALAI POM



No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
1	MANOKWARI	88,86	99,70	93,20
2	MAMLUJU	88,83	99,68	93,17
3	JAKARTA	89,11	97,58	92,50
4	PEKAN BARU	86,61	99,69	91,84
5	KUPANG	88,08	97,09	91,68
6	MATARAM	87,44	97,97	91,65
7	BATAM	87,01	98,29	91,52
8	PANGKAL PINANG	87,02	98,04	91,43
9	SEMARANG	88,23	96,11	91,38
10	PALANGKARAYA	86,83	97,79	91,21
11	SERANG	87,58	96,66	91,21
12	BENGKULU	87,50	96,51	91,10
13	KENDARI	86,97	96,25	90,68
14	JAMBI	87,19	95,81	90,64
15	DENPASAR	86,34	96,59	90,44
16	AMBON	86,06	96,90	90,40
17	SURABAYA	86,48	95,91	90,24

No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
18	PONTIANAK	86,54	95,76	90,23
19	PALU	85,34	97,39	90,14
20	MANADO	86,34	95,84	90,14
21	SAMARINDA	85,92	96,47	90,14
22	GORONTALO	86,27	95,89	90,10
23	MAKASSAR	86,54	95,00	89,92
24	TARAKAN	86,32	95,26	89,90
25	MEDAN	86,23	95,38	89,89
26	BANDA ACEH	85,25	96,71	89,83
27	PALEMBANG	85,81	95,08	89,52
28	BANJARMASIN	85,90	94,26	89,24
29	YOGYAKARTA	84,49	96,22	89,18
30	PADANG	86,53	93,09	89,15
31	BANDAR LAMPUNG	84,37	96,04	89,04
32	JAYAPURA	86,24	92,43	88,72
33	BANDUNG	86,84	90,48	88,30
34	SOFIFI	85,99	91,48	88,19
RATA RATA		86,68	96,16	90,47





## Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja 2020-2024

Program/ Kegiatan	Indikator	2020			2021			2022			2023		
		Realisasi			Realisasi			Realisasi			Realisasi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80%	88,17%	109,12	88,00%	86,02%	97,75	89	77,69	87,3	90,00%	94,47%	104,97%
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	78,02%	100,03	80,00%	82,68%	103,35	82	80,09	97,67	84,00%	86,10%	102,50%
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00%	82,81%	88,1	86,00%	68,49%	79,64	87	79,77	91,69	88,00%	94,59%	107,49%
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	63,18%	88,99	73,00%	82,80%	113,42	75	83,21	110,94	77,00%	77,78%	101,01%
	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat				95,00%	85,26%	89,75	96,3	87	90,34	97,60%	94,12%	96,43%
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang bermutu	70	80,54	115,06	81	77,95	96,23	83	82,55	99,46	85	86,07	101,26%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	92,19	107,2	91,1	91	99,89	92,3	90,8	98,37	93,4	97,1	103,96%
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69	65,76	95,3	68,07	69,52	102,13	70,38	73,51	104,45	72,7	77,79	107,00%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	89,5	89,32	99,8	90	90,7	100,78	90,5	91,39	100,98	91	90,7	99,67%

### Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja 2020-2024

Program/ Kegiatan	Indikator	2020			2021			2022			2023		
		Realisasi			Realisasi			Realisasi			Realisasi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46,00%	87,67%	190,59	89,00%	99,72%	112,04	91	100	109,89	93,00%	100,00%	107,53%
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,70%	31,70%	110,45	60%	70,37%	117,28	65	41,09	63,21	70%	80,78%	115,40%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	99,38%	116,92	99,00%	99,79%	100,8	100	99,58	99,58	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20,00%	26,56%	132,8	30,00%	29,69%	98,96	40	24,21	60,53	50,00%	37,78%	75,56%
	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	78,01%	141,84	78,00%	73,08%	93,69	80	64,38	80,48	83,00%	75,18%	90,58%
	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51	3,83	109,12	4,01	4,25	105,99	4,2	4,27	101,67	4,25	4,64	109,18%
	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik							50	80,95	161,9	55%	81,48%	148,15%
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,66	88,85	102,53	90,1	88,58	98,31	91,9	92,27	100,4	93,8	94,42	100,66%
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	40	40	100	62	62	100	84	84	100,00%
	Jumlah desa pangan aman	4	4	100	12	12	100	19	19	100	25	25	100,00%
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100	4	4	100	7	7	100	10	10	100,00%

### Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja 2020-2024

Program/ Kegiatan	Indikator	2020			2021			2022			2023		
		Realisasi			Realisasi			Realisasi			Realisasi		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00%	93,55%	103,94	100,00%	100%	100	100	99,97	99,97	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00%	86,35%	95,94	100,00%	100%	100	100	95,3	95,3	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,00%	90,50%	102,84	91,00%	100%	109,89	92	96	104,03	93,00%	89,48%	96,215%
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	90	76,74	85,27	84,9	84,87	99,96	85,9	92,27	107,42	86,9	82,88	95,37%
	Nilai AKIP UPT	80	77,57	96,96	80,1	77,72	97,03	82,6	80,09	96,96	85,1	80,02	94,03%
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	82,96	110,61	83	84,81	102,18	83,25	84,96	102,05	83,5	90,44	108,31%
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84	72,8	86,67	76,00%	77,10%	101,45	81	85,4	105,43	86,00%	86,10%	100,12%
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,51	1,95	129,14	2	1,48	74	2,25	2,88	128	2,5	3	120,00%
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	87,41	93,99	92,8	90,25	97,26	93,4	88,91	95,19	94,6	91,23	96,44%
	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	80,00%	100,00%	125	95%	100%	105,26						

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target TW I	Realisasi	Target TW II	Realisasi	Target TW III	Realisasi	Target TW IV	Realisasi	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,00	90,00	94,12	90,00	95,09	90,00	91,76	90,00	94,47
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	84,00	87,50	84,00	89,47	84,00	86,33	84,00	86,10
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	88,00	91,89	88,00	96,75	88,00	94,78	88,00	94,59
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	77,00	78,57	77,00	73,81	77,00	78,41	77,00	77,78
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,60	97,60	0	97,60	98,57	97,60	98,57	97,60	94,12

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	85,00		-		-		-	85,00	86,07
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,40		-		-		-	93,40	97,10
	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,70		-		-		-	72,70	77,79
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00		-		-		-	91,00	90,70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	100	93,00	100	93,00	100	93,00	100,00

masing wilayah kerja UPT	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	70,00	14,83	70,00	58,06	70,00	70,05	70,00	80,78
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,09	100,00	100,00
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	50,00	15,79	50,00	27,50	50,00	28,13	50,00	37,78
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	83,00	83,00	74,63	83,00	73,70	83,00	74,50	83,00	75,18
	15	Indeks Pelayanan Publik	4,25		-		-	4,25	4,64	4,25	4,64
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	55,00	30,00	32,50	60,00	58,33	80,00	85,83	55,00	81,48

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,80	93,80	93,83	93,80	93,91	93,80	93,83	93,80	94,42
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	84,00	10,00	10,00	22,00	45,00	67,00	67,50	84,00	84
	19	Jumlah desa pangan aman	25,00	10,00	12,00	16,60	32,50	50,00	57,00	25,00	25
	20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	10,00	12,50	15,00	37,50	45,00	71,00	75,00	10,00	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	45,00	49,06	61,00	67,95	82,00	86,60	100,00	100,00
	22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	37,00	50,37	60,00	67,10	77,00	88,78	100,00	100,00

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	93,00	10,00	19,26	45,00	53,58	79,00	70,52	93,00	89,48
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	86,90		-		-		-	86,90	82,88
	25	Nilai AKIP UPT	85,10		-		-		-	85,10	80,02
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,50		-		-		-	83,50	90,44
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,00		-		-		-	86,00	86,10
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	2,88	2,50	3,0000	2,50	3,0000	2,50	3,00
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,60	45,00	54,24	60,00	74,18	75,00	80,94	94,60	90,23





REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA								
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi	
			Selesai*	Belum**				
				Rencana Aksi				Target waktu penyelesaian
<b>Triwulan IV 2022</b>								
1	Nilai Kinerja Anggaran	Memaksimalkan nilai pada setiap komponen yang terdapat pada penilaian IKPA	1. Mengelola UP secara rasional dan proses pembayaran secara tepat waktu, 2. Melakukan belanja kontraktual secara cermat untuk menghindari realisasi yang menumpuk di akhir tahun, 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD			Pengelolaan anggaran yang belum optimal sehingga pada tahun 2022 Realisasi indikator NKA 88,91	Pengelolaan anggaran sudah mulai ditingkatkan sehingga pada tahun 2023 realisasi NKA meningkat menjadi 90,23	-
2	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan <i>skill</i> dan kemampuan setiap pegawai dengan mengikuti program pengembangan kompetensi diatas 20 JP dalam setahun	Memberikan kesempatan ke semua pegawai untuk memperkaya pengetahuan dan menambah skill dalam bekerja melalui program pengembangan kompetensi baik dari internal maupun eksternal BPOM			Pada tahun 2022 tingkat kesadaran pegawai untuk mengembangkan kompetensi masih rendah sehingga Realisasi indikator IP ASN 84,96	Di tahun 2023 tingkat kesadaran pegawai untuk mengembangkan kompetensi mulai meningkat dilihat dari realisasi IP ASN meningkat menjadi 90,57	-
3	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	Melaksanakan KIE, Bimtek, dan pendampingan kepada sarana produksi terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik serta kepada sarana peredaran pangan olahan terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).	Telah dilakukan Bimtek dan pendampingan kepada pelaku usaha terkait CPPOB dan registrasi pangan olahan.			Pada tahun 2022, realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 80,09% dengan kategori capaian kinerja "Belum Memenuhi Ekspektasi"	Pada tahun 2023, realisasi persentase Makanan yang Memenuhi Syarat meningkat menjadi 86,10% dengan kategori capaian kinerja "Sangat Baik"	
<b>Triwulan I 2023</b>								
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Melaksanakan desk CAPA untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi	Telah dilakukan desk CAPA kepada pelaku usaha untuk membantu pelaku usaha dalam melakukan dan melaporkan tindak lanjut hasil inspeksi pada TW IV 2023.			Masih rendahnya jumlah sarana yang melaporkan CAPA	Jumlah pelaporan CAPA pada TW IV meningkat	
<b>Triwulan III 2023</b>								
1	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Meningkatkan kepatuhan sarana produksi AMDK dalam memenuhi persyaratan pengujian mikrobiologi		Melakukan permintaan laporan pelaksanaan pengujian mikrobiologi kepada sarana produksi AMDK.	TW I 2024	Pengujian mikrobiologi di sarana produksi AMDK belum dilakukan secara rutin.		Telah dilakukan permintaan laporan pengujian mikrobiologi pada saat pemeriksaan sarana produksi AMDK. Pada tahun 2024, permintaan laporan akan dilakukan pada triwulan I sebelum dilakukannya kegiatan pemeriksaan sarana.
<b>Triwulan IV 2023</b>								

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA								
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi	
			Selesai*	Belum**				
				Rencana Aksi				Target waktu penyelesaian
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Melakukan penggalangan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk menggalang pemangku kepentingan dalam rangka intervensi pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.	FGD Pengawasan Obat dan Makanan Dengan Dukungan Stakeholder Bidang Jasa Pengiriman, Pos dan Logistik 25 September 2023			Stakeholder terkait belum mengetahui ketentuan terkait distribusi Obat dan Makanan yang menggunakan jasa Pos dan logistik	Terbangunnya kesamaan pemahaman terkait distribusi Obat dan Makanan yang menggunakan jasa pengiriman Pos dan logistik.	
2		Meningkatkan kompetensi petugas dalam fungsi intelijen dan penyidikan sesuai kebutuhan, misalnya peningkatan kompetensi petugas dalam penguasaan bahasa Hakka/Tio Tjiu)	Sudah terlaksana pelatihan bahasa Hakka/Tio Tjiu yang selesai di TW III 2023			Petugas mengalami kesulitan dalam memahami komunikasi bahasa Hakka/ Tio Tjiu yang sering dipergunakan oleh pelaku usaha di Kalimantan Barat	Meningkatnya pengetahuan petugas dalam memahami Bahasa Hakka/ Tio Tjiu	
3		Memperluas akses informasi dan alat khusus intelijen		Pengadaan aplikasi yang menunjang kegiatan intelijen yang menggunakan OSINT	TW II 2024	Sulitnya akses informasi terkait intelijen dalam profiling.		
4				Pengadaan alat khusus intelijen berupa alat komunikasi <i>handy talky</i> dan registrasi akun penggunaan frekuensi dari Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak	TW III 2024	Hambatan komunikasi pada kegiatan intelijen antarpersonil		
5	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Memanfaatkan secara optimal teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat proses pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka memperoleh keputusan/sertifikasi.	Pada bulan Januari - Maret 2023 telah dilakukan pemanfaatan aplikasi e-sertifikasi dan e-registration dan membuat leaflet elektronik terkait proses registrasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha.			Proses registrasi memerlukan SLA yang lebih lama.	Proses registrasi sesuai SLA yang ditetapkan.	
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Melibatkan partisipasi aktif anggota SAKA POM dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan KIE.		Berkolaborasi dengan Pramuka dengan melaksanakan kegiatan SAKA POM melalui kegiatan Krida Informasi dan Komunikasi.	TW IV 2024	Informasi Obat dan Makanan belum menjangkau seluruh segmen generasi muda.		

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA								
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi	
			Selesai*	Belum**				
				Rencana Aksi				Target waktu penyelesaian
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, dan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan.		Mengikutsertakan pelaku usaha dalam program AGI JAKK	TW IV 2024	Terdapat pelaku usaha yang belum memahami pemenuhan persyaratan secara komprehensif		
8	Indeks Pelayanan Publik	Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang sesuai standar pelayanan publik dan kebutuhan pelanggan kelompok rentan.		Mengadakan fasilitas tambahan untuk kelompok rentan	TW IV 2024	Sarana dan prasarana untuk kelompok rentan, terutama tuna netra belum memadai		
9	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	Melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan, seminar, sosialisasi, konsultasi, dan coaching clinic yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.	Pada tahun 2023, telah dilakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.			Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan terkait cara produksi Obat dan Makanan yang baik masih rendah	Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan terkait cara produksi Obat dan Makanan yang baik telah meningkat	
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.	Meningkatkan pemahaman UMKM terkait alur, proses, dan tata cara pendaftaran dan/atau pengajuan dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik.	Pada tahun 2023 telah dilakukan Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan cara produksi yang baik serta proses registrasi.			Adanya pelaku usaha UMKM baru di bidang Obat dan Makanan dengan tingkat pemahaman terkait cara produksi yang baik serta proses registrasi masih rendah	Pelaku usaha UMKM baru di bidang Obat dan Makanan dengan tingkat pemahaman terkait cara produksi yang baik serta proses registrasi semakin baik	
11	Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium	Pengajuan rekomendasi alat laboratorium yang sesuai dengan standar peralatan laboratorium	tersedia rekomendasi alat laboratorium dari PPPOMN (TW I 2024)			Terdapat gap antara kebutuhan laboratorium dengan kondisi yang sesuai standar	Pengadaan Alat laboratorium dapat dilakukan sesuai dengan standar	

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA								
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi	
			Selesai*	Belum**				
				Rencana Aksi				Target waktu penyelesaian
12		Penyediaan bahan baku pembanding untuk untuk laboratorium kimia kosmetika, dan obat tradisional	Tersedia baku pembanding laboratorium kosmetika dan obat tradisional (TW I 2024)	-	-	Masih terdapat baku pembanding yang tidak tersedia untuk pengujian parameter tertentu	Laboratorium dapat melakukan pengujian parameter uji sesuai standar	
13		Penyediaan sampel dengan zat aktif yang sesuai untuk laboratorium kimia obat, dan mikrobiologi.	Tersedia sampel dengan zat aktif yang sesuai untuk laboratorium kimia obat dan mikrobiologi (TW I 2024)	-	-	Terdapat ruang lingkup yang tidak dapat dilakukan pengujiannya karena tidak tersedia sampel dengan zat aktif tertentu sesuai standar	Laboratorium dapat melakukan ruang lingkup pengujian sesuai standar	
14		Melakukan koordinasi dengan UPT lain dalam region yang sama dalam pengadaan sampel untuk peningkatan ruang lingkup.		Koordinasi dengan UPT lain dalam region yang sama untuk pengadaan sampel obat dengan zat aktif dan bentuk sediaan tertentu	TW I 2024	parameter ruang lingkup pengujian obat ada yang belum dapat dilakukan karena tidak tersedia sampel dengan zat aktif dan bentuk sediaan tertentu		
15		Melakukan pelatihan internal dengan metode kepenyeliaan untuk meningkatkan kompetensi personil laboratorium		Melakukan pelatihan kepenyeliaan untuk personil	TW I - TW IV 2024	Masih terdapat gap antara kondisi eksisting dalam pemenuhan standar kompetensi laboratorium		
16	Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait pangan fortifikasi		Melakukan koordinasi ke ditwas produksi pangan olahan terkait hasil pengawasan pangan fortifikasi	TW II 2024	Masih banyaknya pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat yang produsennya berada di luar wilayah Kalimantan Barat		

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA								
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi	
			Selesai*	Belum**				
				Rencana Aksi				Target waktu penyelesaian
17	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan kemudahan akses informasi tentang Obat dan Makanan bagi masyarakat.	Telah dilakukan peningkatan penyebaran informasi, baik melalui KIE yang melibatkan tokoh masyarakat, juga melalui melalui berbagai media cetak dan elektronik, termasuk melalui platform media sosial pada TW I s/d TW IV 2023.			Pelaksanaan KIE hanya mencakup 17 titik di wilayah Kalimantan Barat	Teradi peningkatan jumlah titik KIE menjadi 30 titik.	
18	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan sarana produksi.	Melaksanakan koordinasi kepada pemerintah daerah terkait pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada TW I s/d TW IV 2023.			Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Kemandirian pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan sarana produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	
19		Melakukan KIE/bimbingan teknis/pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka implementasi pemenuhan CPPOB dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.	Melakukan bimbingan teknis pendampingan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CPPOB pada TW II 2023.			Banyaknya pelaku usaha yang belum memahami prinsip penerapan CPPOB	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek CPPOB.	
20		Meningkatkan komitmen industri pangan dalam memenuhi kebutuhan personel pengujian dan peralatan laboratorium sehingga pengujian produk oleh sarana produksi dapat dilakukan secara periodik.	Melakukan komunikasi dengan lembaga penerbit SNI produk AMDK di Kalimantan Barat terkait pelaksanaan uji mikrobiologi yang dilakukan sarana produksi AMDK pada TW III dan TW IV 2023.			Belum ada kesepahaman terkait klausul uji mikrobiologi dalam persyaratan SNI AMDK.	Adanya persamaan persepsi terkait klausul uji mikrobiologi dalam persyaratan SNI AMDK.	
21								
22	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Mengoptimalkan koordinasi dan advokasi kepada lintas sektor dalam upaya pembinaan serta pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.	Melibatkan lintas sektor dalam melakukan pembinaan/ pengawasan sarana distribusi.			Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan	Pemerintah daerah mulai berinisiatif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan secara mandiri.	

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CAPAIAN KINERJA								
NO	Indikator	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	Keterangan/Justifikasi	
			Selesai*	Belum**				
				Rencana Aksi				Target waktu penyelesaian
23		Memberikan sanksi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan peraturan yang berlaku.	Menyampaikan pelaksanaan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) pada forum komunikasi sarana distribusi, sebagai bentuk komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku.			Pengabaian pelaku usaha terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.	Meningkatnya <i>awareness</i> pelaku usaha terhadap ketegasan BBPOM di Pontianak dalam pemberian sanksi terhadap hasil pengawasan.	
24		Meningkatkan kompetensi petugas/inspektur terkait pengawasan sarana distribusi.	Melakukan bimtek pemanfaatan aplikasi E-Was dalam rangka pengawasan sarana distribusi obat			Tidak ada data penyaluran obat sebelum petugas melakukan pemeriksaan	Petugas memiliki tambahan informasi terkait data obat yang disalurkan pada sarana yang akan diperiksa.	
25		Mendorong komitmen lintas sektor dalam mendukung pemenuhan persyaratan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.		Pengawasan dan pendampingan pada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).	TW IV 2024	Belum ada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang mendapatkan surat keterangan pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)		
26	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan kedeputian dan lintas sektor terkait untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi.	Telah dilakukan koordinasi kepada kedeputian terkait terhadap tindak lanjut rekomendasi pada TW III dan TW IV 2023.			Kurangnya atensi kedeputian terhadap tindak lanjut/rekomendasi hasil inspeksi.	Meningkatnya respon kedeputian terhadap tindak lanjut/rekomendasi hasil inspeksi.	
27	Persentase keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha terkait upaya tindak lanjut hasil inspeksi secara formal dan informal.	Telah dilakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi melalui optimalisasi penggunaan Siperkasa untuk pelaporan CAPA pada TW I s/d TW IV 2023.			Penggunaan aplikasi Siperkasa untuk pelaporan CAPA belum optimal.	Adanya peningkatan pelaporan CAPA yang dilakukan melalui aplikasi Siperkasa	

